



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 41 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 50
TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018**

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NO 41 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NO 50 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018.....	1
LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.4 Maksud dan Tujuan	I-5
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I-6
BAB II GAMBARAN DAN EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018	II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Sukoharjo	II-72
2.3 Permasalahan Pembangunan	II-122
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-1
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1 Visi.....	IV-1
4.2 Misi.....	IV-2
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	V-1
BAB IV KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH....	VI-1
6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2018	VI-1
BAB VII PENUTUP	VII-1



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 50 TAHUN
2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

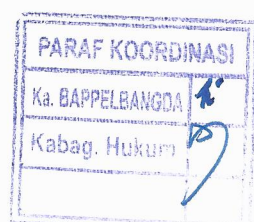
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

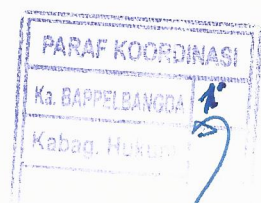
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 semester I dan terdapat penambahan program serta kegiatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu dilakukan penyesuaian terhadap program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, maka Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);



23. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 51) diubah sebagai berikut :

Pasal 3

RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Juli 2018

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 41



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50
TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun ke depan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu, RKPD Tahun 2018 memuat langkah-langkah untuk mendukung “Terwujudnya Masyarakat Sukoharjo Yang Sejahtera, Maju, Dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Profesional” yang menjadi Visi Kabupaten Sukoharjo dalam RPJMD 2016-2021.

RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran Tahunan, dan RKPD menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana Tahunan dengan rencana strategis mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah-langkah Tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah.

RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD akan menjadi landasan penyusunan APBD yang ditetapkan secara bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian RKPD Tahun 2018 adalah pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah untuk Tahun 2018 dan RAPBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018.

RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 ini disusun dengan mengembangkan hubungan (*link*) di antara peraturan perundangan yang

telah ditetapkan, sehingga RKPD sebagai dokumen rencana Tahunan mudah diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Kebijakan Umum Anggaran APBD (KUA APBD), Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-PD) dan APBD.

1.2. Dasar Hukum

Terdapat beberapa landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses, dan prosedur tentang RKPD khususnya dan perencanaan dan penganggaran daerah, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2015;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sukoharjo;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.
25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat dikategorikan berdasarkan jangka waktu (Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Tahunan), pelaksana (Perencanaan Induk, Perencanaan Managerial, Perencanaan Taktis Strategis dan Pelaksanaan Teknis Operasional), kewenangan pemerintahan (Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota), dan keruangan (spasial dan aspasial). Perencanaan yang bersifat spasial secara garis besar tertuang dalam Rencana Tata Ruang dari tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten.

RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 mempunyai keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2021, dilakukan melalui penyelarasan:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan Tahunan daerah kabupaten dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten; dan

- b. rencana program serta kegiatan prioritas Tahunan daerah kabupaten dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten.
2. RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 mengacu pada RPJMD provinsi, dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan provinsi. Program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten, mencakup dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, dan wilayah perbatasan antar kabupaten/kota.
3. RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 mengacu pada RPJMN, dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan prioritas pembangunan nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 yang memuat prioritas pembangunan, kerangka ekonomi makro disusun dengan maksud untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan dalam memanifestasikan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo. Bagi Badan/Dinas/Kantor atau satuan kerja di jajaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berkewajiban menyusun rencana kerja. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Badan/Dinas/Kantor dan satuan kerja dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, swasta, donor, masyarakat, dan sebagainya. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2018, menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran- Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018.

Untuk pelaksanaan setiap program dalam RKPD diharapkan menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding*, yaitu transparansi, akuntabilitas, serta monitoring dan evaluasi. Prinsip ini perlu dilakukan sebagai semangat mewujudkan *good governance* dan *good corporate governance* untuk peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses dan implementasi kebijakan.

Selain itu, dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi pada setiap program yang dilakukan, akan diperoleh masukan untuk perbaikan penyusunan dan pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Monitoring dan evaluasi juga akan menghasilkan alasan serta argumentasi mengapa program tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

1.4.2. Tujuan

Penyusunan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 bertujuan untuk:

- 1) Menjabarkan RPJMD Tahun 2016 – 2021 dan sinkronisasi dengan sasaran Program RKP Nasional Tahun 2018, Program RKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 ke dalam Rencana Program kegiatan Prioritas Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
- 2) Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintah;
- 3) Mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya Nasional, Regional dan Daerah dalam rangka pembangunan daerah;
- 4) Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2018;
- 5) Memberikan landasan operasional Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD Tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra PD, Renja PD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD Kabupaten Sukoharjo dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Sukoharjo dan sasaran penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Sukoharjo.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH DAN EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018

Memuat penjelasan tentang gambaran umum dan kondisi daerah Kabupaten Sukoharjo beserta capaian kinerja tahun sebelumnya.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis

terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan Tahunan, kedudukan Tahun 2018 (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH DAN

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografis

Secara geografis Kabupaten Sukoharjo terletak diantara Bagian ujung timur 110.57⁰ LS, Bagian Ujung Sebelah Barat 110.42⁰LS, Bagian Ujung Sebelah Utara 7.32⁰BT, Bagian Ujung Sebelah Utara 7.49⁰32.00⁰BT. Kabupaten Sukoharjo memiliki batas-batas wilayah administrasi sebelah utara Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar, sebelah selatan Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri, sebelah timur Kabupaten Karanganyar, dan sebelah barat Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten.

Secara administrasi, Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri atas 167 Desa/Kelurahan yang meliputi 17 Kelurahan dan 150 Desa, dengan luas wilayah 46.666 Ha. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Polokarto yaitu 6.218 Ha (13% dari luas Kabupaten), dan Kecamatan yang paling kecil adalah Kecamatan Kartasura dengan luas 1.923 Ha (4% dari luas Kabupaten). Secara lebih lengkap, luas per kecamatan di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Weru	4.198	13 Desa
2	Bulu	4.386	12 Desa
3	Tawang Sari	3.998	12 Desa
4	Sukoharjo	4.458	14 Kelurahan
5	Nguter	5.488	16 Desa
6	Bendosari	5.299	13 Desa, 1 Kelurahan
7	Polokarto	6.218	17 Desa

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan
8	Mojolaban	3.554	15 Desa
9	Grogol	3.000	14 Desa
10	Baki	2.197	14 Desa
11	Gatak	1.947	14 Desa
12	Kartasura	1.923	10 Desa, 2 Kelurahan

Sumber: BPS Kab. Sukoharjo

Sedangkan mengenai letak masing-masing kecamatan dan perbatasan wilayah dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sukoharjo



Sumber: BAPPELBANGDA Kabupaten Sukoharjo

2.1.2. Topografi, Geologi, Hidrologi dan Klimatologi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sukoharjo memiliki kondisi kelerengan yang relatif datar antara 0-8%. Sedangkan kelerengan yang cukup curam hanya terdapat pada sedikit wilayah di bagian selatan kabupaten, yaitu pada Kecamatan Weru yang terdapat daerah dengan kelerengan 8-15%, dan pada Kecamatan Bulu yang terdapat daerah dengan kelerengan 8-15%, 15-25% dan 25-40%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Sukoharjo memiliki kelerengan yang relatif datar.

Ditinjau dari segi geologi, terdapat tiga jenis geologi yang menyusun wilayah Kabupaten Sukoharjo. Pada bagian utara, yaitu pada Kecamatan Kartasura, Gatak, Baki, Grogol, Mojolaban, dan Polokarto banyak disusun oleh breksi gunung api. Hal ini terjadi karena masih berdekatan dengan Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang terdapat pada Kabupaten Boyolali. Pada bagian tengah, yaitu pada Kecamatan Sukoharjo, Polokarto, Bendosari, Tawangsari, Bulu, dan sebagian Kecamatan Weru banyak didominasi oleh lempung, lanau, dan pasir. Sedangkan lava andesit hanya terdapat sedikit pada bagian selatan, yaitu pada Kecamatan Weru dan Bulu.

Wilayah Kabupaten Sukoharjo memiliki enam jenis tanah yang berbeda. Jenis tanah yang paling banyak ditemui adalah jenis gromosol yang tersebar di bagian tengah, yaitu pada Kecamatan Mojolaban, Polokarto, Bendosari, Nguter, Tawangsari, dan Bulu. Kemudian jenis aluvium pada Kecamatan Baki, Grogol, Sukoharjo dan Nguter. Jenis Latosol pada Kecamatan Polokarto, Bendosari, dan Nguter. Jenis regosol pada ujung bagian barat, yaitu Kecamatan Kartasura, Gatak, Weru dan Tawangsari. Lalu, jenis litosol banyak ditemukan di Kecamatan Tawangsari dan Bulu. Sedangkan yang paling sedikit ditemukan adalah jenis mediteran yang banyak ditemui di Kecamatan Mojolaban.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan analisis indeks resiko bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBD) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013, Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten/kota yang memiliki resiko tinggi terhadap bencana

(urutan ketigabelas dari tigapuluh lima kabupaten dan kota) (Bappenas, 2014). Jika dilihat dari data kebencanaan yang ada, Kabupaten Sukoharjo mempunyai beberapa ancaman bencana, antara lain banjir, misalnya Banjir di Kecamatan Grogol dan Kecamatan Mojolaban akhir April 2015); longsor misalnya di Kecamatan Nguter bulan Februari 2015; angin ribut misalnya di Kecamatan Baki, Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Bendosari bulan Februari 2015. Selain tiga ancaman bahaya utama tersebut, terdapat pula ancaman bahaya kekeringan, kebakaran hutan/lahan, serta gempa bumi (*Data BPBD Sukoharjo, 2012*).

a. Kerawanan Bencana Banjir

Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Kabupaten Sukoharjo memiliki paling tidak sebelas sungai, yang meliputi Sungai Bengawan Solo, Sungai Dengkeng, Sungai Jlantah, Sungai Brambang, Sungai Samin, Sungai Ranjing, Sungai Walikan, Sungai Langsur, Sungai Palur, Sungai Premulung dan Sungai Tanggul. Keberadaan sungai-sungai tersebut di satu sisi memberikan keuntungan ketersediaan air di Kabupaten Sukoharjo, namun di sisi lain pada musim-musim penghujan misalnya pada bulan Desember hingga bulan maret dapat memberikan ancaman banjir pada wilayah yang datar dan tidak memiliki kawasan resapan.

Berikut adalah tabel jumlah kawasan yang rawan bencana banjir:

Tabel 2. 2

**Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2017**

No	Kecamatan	Jumlah Kawasan Rawan Banjir
1	Weru	11
2	Bulu	2

No	Kecamatan	Jumlah Kawasan Rawan Banjir
3	Tawang Sari	9
4	Sukoharjo	11
5	Nguter	9
6	Bendosari	2
7	Polokarto	7
8	Mojolaban	5
9	Grogol	11
10	Baki	2
11	Gatak	3
12	Kartasura	0

Sumber: BPBD Sukoharjo

Pada tahun 2017, bencana banjir di Sukoharjo tidak menimbulkan korban jiwa, hanya saja kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp. 236.000.000,-. Sedangkan, jumlah pengungsi akibat bencana banjir mencapai 17.377 orang.

b. Kerawanan Bencana Longsor

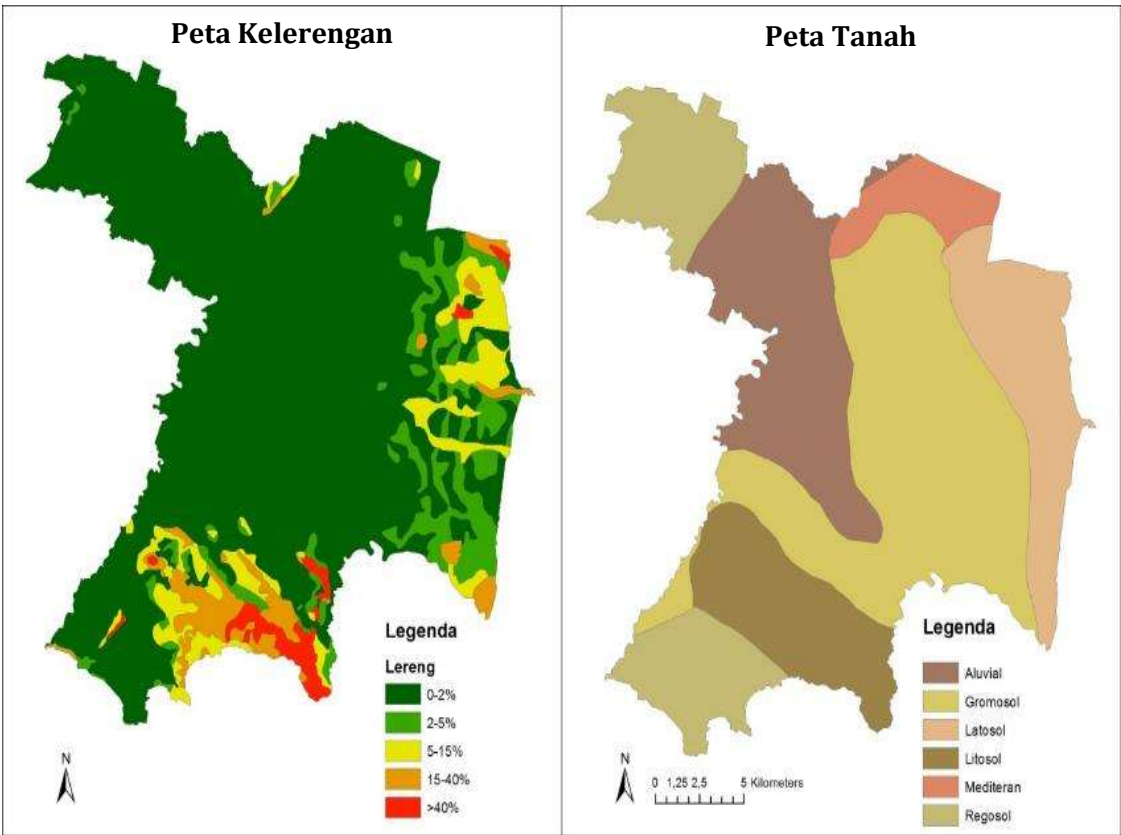
Kabupaten Sukoharjo, terdapat tiga kecamatan yang memiliki ancaman terhadap longsor, yakni Kecamatan Bulu, Kecamatan Weru dan Kecamatan Tawang Sari. Berdasarkan kemiringan lahan, ketiga kecamatan tersebut memiliki wilayah yang bergelombang (5-15%), curam (15-40%) hingga sangat curam (40%) (a). Selain itu, apabila dilihat dari jenis tanahnya, sebagian besar tanah yang berada di wilayah yang curam dan cukup curam merupakan tanah litosol (b). Tanah litosol merupakan jenis tanah berbatu-batu dengan lapisan tanah yang tidak begitu tebal. Penampangnya besar dan berbentuk kerikil, pasir atau batu-batuan kecil, karena sedikit sekali mengalami perubahan struktur atau profil dari batuan

asal. Tanah litosol miskin unsur hara. Jenis tanah ini banyak ditemukan di lereng gunung dan pegunungan di seluruh Indonesia yang mengalami proses erosi parah.

Jika suatu wilayah yang memiliki kriteria lereng dan jenis tanah yang rentan terhadap longsor terguyur oleh hujan dengan intensitas yang tinggi, maka bukan tidak mungkin di wilayah tersebut akan terjadi bencana longsor. Jika kita amati, wilayah Kabupaten Sukoharjo bagian selatan, terutama di Kecamatan Bulu, Weru serta Tawangsari, merupakan wilayah yang memiliki ancaman bencana longsor.

Gambar 2.2

Peta Kelerengan dan Peta Tanah Kabupaten Sukoharjo



Sumber: BAPPELBANGDA Kabupaten Sukoharjo

Tabel 2. 3

Kawasan Rawan Longsor di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Kawasan Rawan Banjir
1	Weru	3
2	Bulu	3
3	Tawang Sari	0
4	Sukoharjo	1
5	Nguter	7
6	Bendosari	2
7	Polokarto	3
8	Mojolaban	0
9	Grogol	0
10	Baki	0
11	Gatak	3
12	Kartasura	0

Sumber: BPBD Sukoharjo

c. Kerawanan Bencana Kekeringan

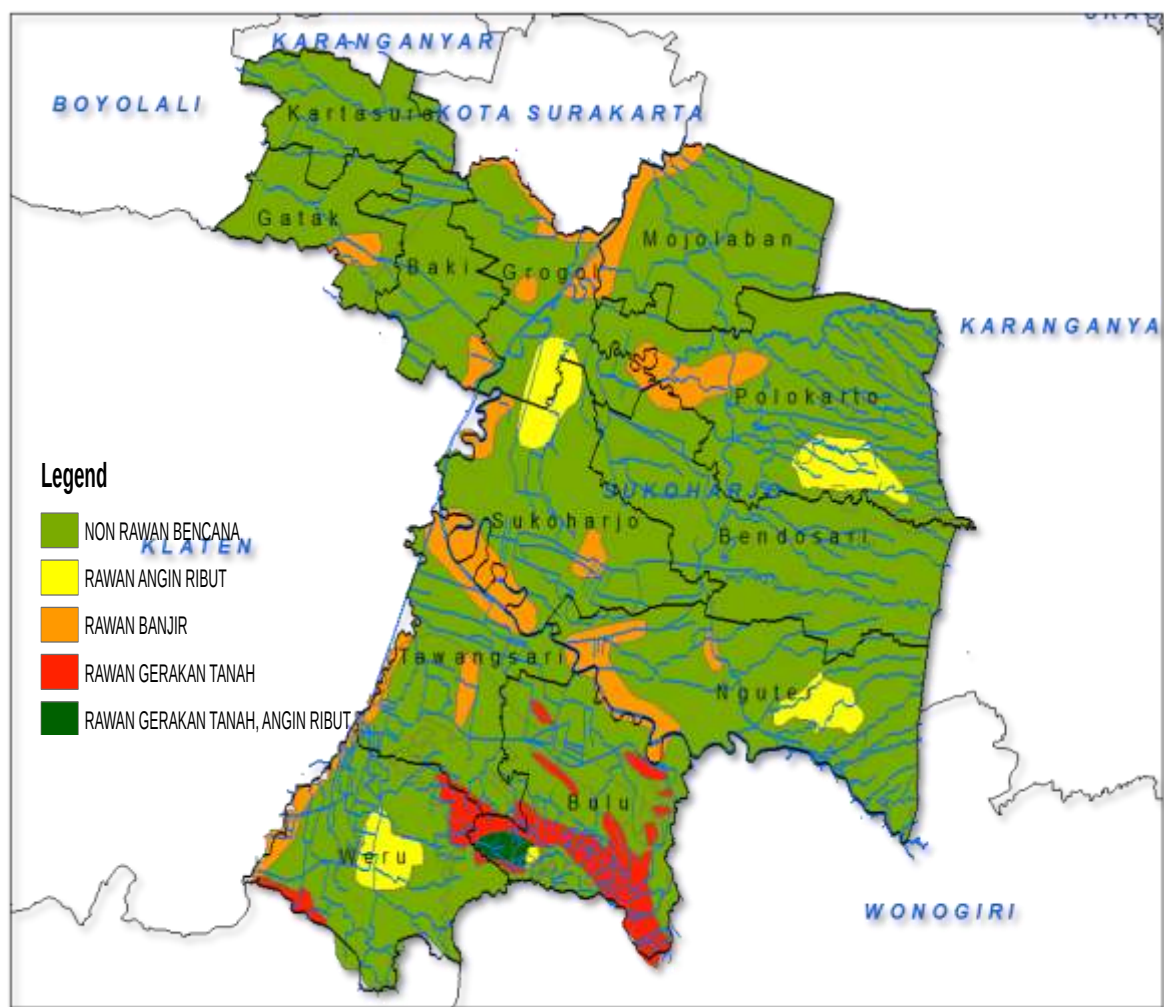
Apabila dikaji dari aspek akuifer air tanah, wilayah Kabupaten Sukoharjo dapat dibagi menjadi enam wilayah, yakni wilayah dengan akuifer produktif dengan penyebaran luas, akuifer produktivitas tinggi penyebaran luas, akuifer produktivitas sedang penyebaran luas, akuifer produktivitas sedang setempat, akuifer produktivitas sedang dan daerah air tanah langka. Sedangkan jika dilihat dari intensitas curah hujan, wilayah barat Kabupaten Sukoharjo memiliki intensitas yang lebih tinggi dibanding di wilayah tengah dan

timur. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa wilayah yang mempunyai ancaman kekeringan di musim kemarau, khususnya di wilayah selatan Kabupaten Sukoharjo, tepatnya di Kecamatan Weru, Tawang Sari dan Bulu. Beberapa data bencana menyebutkan bahwa kekeringan pernah melanda Kecamatan Bulu (Agustus 2009) dan Kecamatan Tawang Sari dan Weru (Agustus 2013). Sedangkan kekeringan pertanian, melanda sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Sukoharjo yang mengandalkan Dam Colo sebagai sumber pasokan irigasi.

d. Kerawanan Bencana Angin Ribut/Puting Beliung

Di Kabupaten Sukoharjo terdapat beberapa wilayah yang pernah atau bahkan beberapa kali terkena angin ribut maupun puting beliung, misalnya Kecamatan Baki (Februari 2015), Kecamatan Polokarto (Februari 2015), Kecamatan Weru (Oktober 2013) Kecamatan Nguter (Januari 2014) dan Kecamatan Kartasura (Januari 2014). Wilayah yang terlanda angin puting beliung biasanya wilayah yang terbuka. Menurut beberapa penelitian, wilayah yang pernah terlanda angin ribut maupun puting beliung secara umum memiliki ancaman terhadap angin ribut atau puting beliung di masa datang. Terdapat beberapa wilayah yang memiliki ancaman terhadap bencana ini yang tersebar di beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Baki, Polokarto, Weru, Nguter dan Kartasura.

Gambar 2.3
Peta Rawan Bencana Kabupaten Sukoharjo



Sumber: BAPPELBANGDA Kabupaten Sukoharjo

2.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan karakteristik perkembangan kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo dibagi menjadi tiga kawasan yaitu kawasan bagian utara, kawasan bagian tengah dan kawasan bagian selatan.

Tabel 2.4
Karakteristik Kawasan di Kabupaten Sukoharjo

KAWASAN	KARAKTERISTIK
KAWASAN BAGIAN UTARA	
Kawasan SUROGOLBANTAKI	Kawasan ini meliputi Kecamatan Kartasura, Grogol, Mojolaban, Gatak dan Baki.

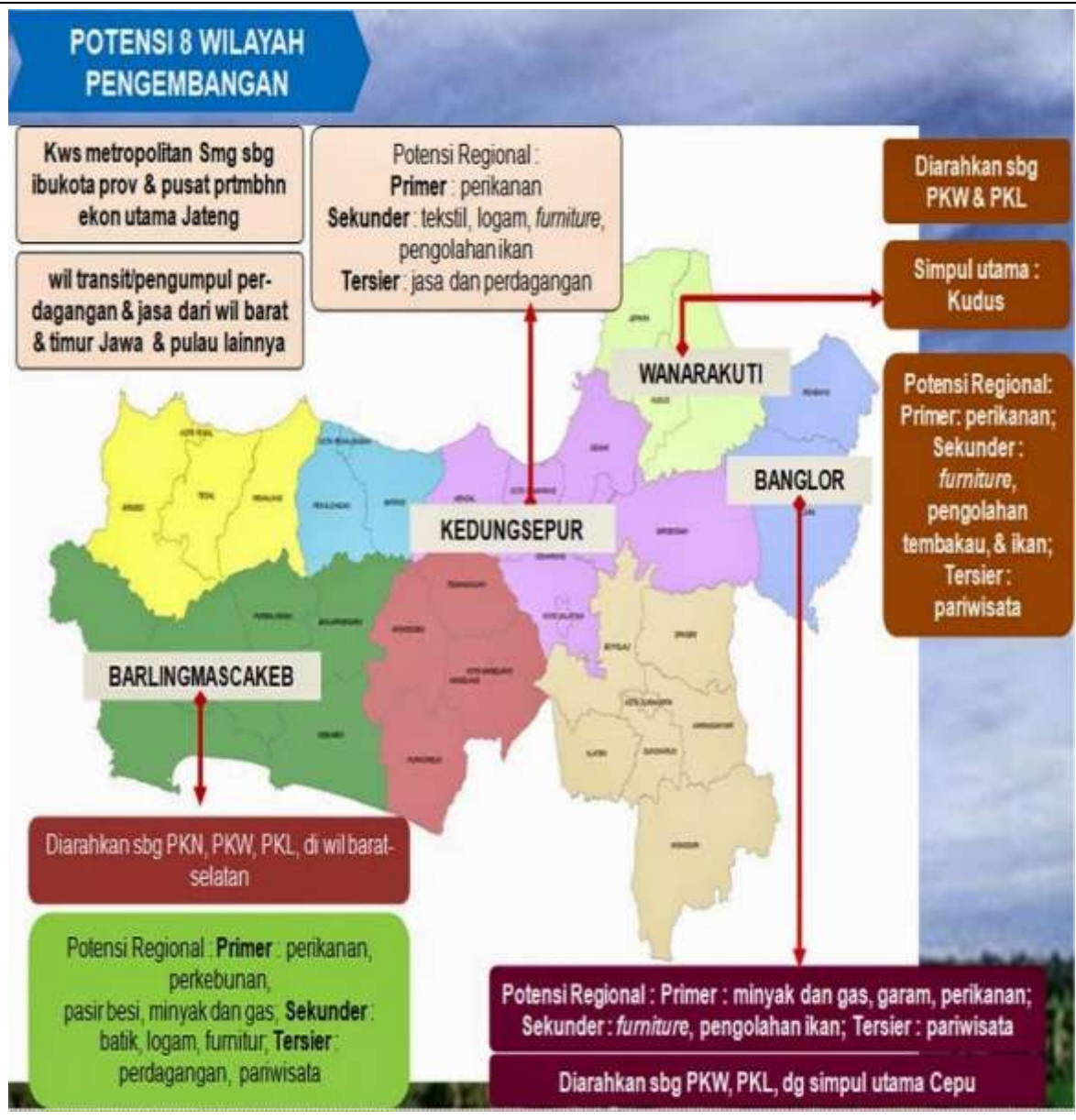
KAWASAN	KARAKTERISTIK
	Perkembangan dipengaruhi oleh limpasan perkembangan dari Kota Surakarta. Karakteristik merupakan permukiman perkotaan, dan pusat perdagangan jasa dengan kepadatan bangunan yang berkembang dari padat menjadi sangat padat
KAWASAN BAGIAN TENGAH	
Kawasan SUKOSARIKARTO	- Kawasan ini meliputi Kecamatan Sukoharjo, Bendosari, dan Polokarto - Perkembangan kawasan dipengaruhi oleh perkembangan Kecamatan Sukoharjo sebagai pusat pelayanan kabupaten. Kepadatan bangunan berkembang dari sedang menjadi padat. Ciri perkotaan terlihat terutama pada permukiman-permukiman baru, sedangkan perkampungan umumnya masih bercampur antara ciri perkotaan dan pedesaan. Muncul aktivitas perdagangan pada koridor jalan utama, dan terdapat aktivitas industri
KAWASAN BAGIAN SELATAN	
Kawasan NGULURUSARI	- Kawasan ini meliputi Kecamatan Nguter, Bulu, Weru, dan Tawang Sari - Merupakan kawasan penyangga perkotaan, dengan perkembangan kepadatan yang masih rendah. Perkembangan kawasan sebagian besar masih bercirikan pedesaan, kawasan perkampungan berkembang sporadis dan mengelompok yang dipisahkan oleh kawasan pertanian. Kegiatan perdagangan dan jasa, serta industri

<i>KAWASAN</i>	<i>KARAKTERISTIK</i>
	berkembang linier terhadap jaringan jalan.

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Sukoharjo mengingat posisinya yang strategis dekat dengan dua kutub pusat pertumbuhan yaitu D.I. Yogyakarta dan Solo dan merupakan wilayah yang diakses oleh transportasi dari Surabaya yang akan menuju ke arah barat seperti Yogyakarta menjadikan Kabupaten Sukoharjo akan terus meningkatkan jalur transportasi. Selain itu adanya Solo Baru yang merupakan perluasan area perkotaan dari Kota Solo menjadikan potensi ekonomi di bidang perdagangan dan jasa semakin intens sehingga pantas apabila Kecamatan Grogol yang pada Perda No. 14 Tahun 2011 ditetapkan status sistem perkotaanya menjadi PKLp berpotensi meningkat menjadi PKWp pada evaluasi RTRW terbaru. Potensi pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah secara umum dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.4

Potensi Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Kajian dan Evaluasi RTRW, 2015

Perubahan rencana status sistem perkotaan yang ada di kabupaten Sukoharjo dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5

Hirarki dan Rencana Status Perkotaan Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Perda no.14 tahun 2011		Hasil Analisis	
		Hirarki	Status	Hirarki	Status
1	Weru	III	PPK	III	PPK
2	Bulu	III	PPK	III	PPK
3	Tawang Sari	III	PPK	III	PPK
4	Nguter	III	PPK	II	PKL
5	Sukoharjo	I	PKL	III	PPK
6	Bendosari	III	PPK	II	PPK
7	Polokarto	III	PPK	III	PPK
8	Grogol	II	PKLp	I	PKWp
9	Mojolaban	III	PPK	II	PKL
10	Baki	III	PPK	II	PPK
11	Gatak	III	PPK	III	PPK
12	Kartasura	I	PKL	I	PKL

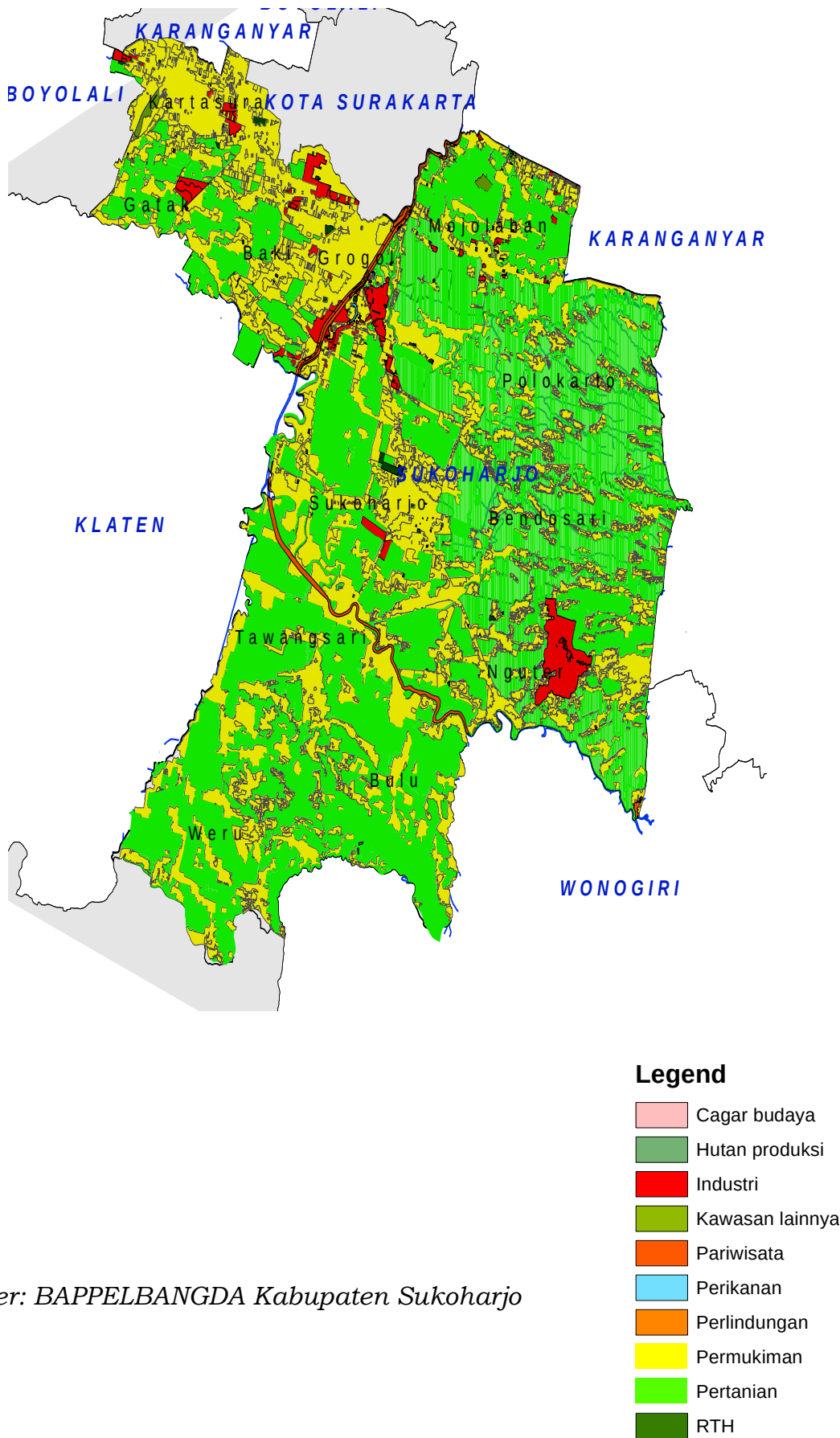
Sumber: Kajian dan Evaluasi RTRW, 2015

Kecamatan Grogol menurut perda no. 14 tahun 2011 berstatus PKLp namun pada hasil analisis scalogram dan indeks sentralitas di ketahui bahwa jumlah dan jenis fasilitas sosial, ekonomi yang ada di Kecamatan Grogol cukup variatif dan banyak sehingga ada potensi untuk peningkatan status tidak hanya PKL namun dapat menjadi PKWp. Sementara Kecamatan yang termasuk dalam PKL ada tiga yaitu Kecamatan Kartasura, Mojolaban dan Nguter. Kecamatan Kartasura merupakan kecamatan dengan jumlah fasilitas yang cukup banyak yaitu sebanyak 1.934 unit. Kondisi ini dapat diasumsikan bahwa Kecamatan Kartasura merupakan pusat perdagangan dan kegiatan pendidikan kesehatan yang dapat menarik penduduk kecamatan lain untuk migrasi menuju lokasi ini. Kecamatan Nguter merupakan pusat industri sehingga pemerintah perlu memberikan fasilitas infrastruktur yang memadai untuk investor agar mau menanamkan modal untuk pengembangan kawasan industri Nguter. Sedangkan Kecamatan Mojolaban akan menjadi lokasi perluasan permukiman di

Karanganyar yang sudah mendesak menuju Kabupaten Sukoharjo karena arah laju perkembangan kota terus menuju ke selatan.

Gambar 2.5

Peta Pola Ruang Kabupaten Sukoharjo



Sumber: BAPPELBANGDA Kabupaten Sukoharjo

2.1.5 Aspek Demografi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, pada tahun 2017, jumlah penduduk di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 893.169 orang dengan rincian sebanyak 449.309 penduduk laki-laki dan 443.860 penduduk perempuan. Tabel berikut menjelaskan sebaran penduduk per Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2013-2017

Kecamatan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Weru	60.781	61.444	61.030	59.439	59.471
Bulu	42.277	42.446	42.253	39.134	40.442
Tawang Sari	57.729	57.438	57.146	55.294	56.058
Sukoharjo	90.886	90.930	92.343	92.615	93.264
Nguter	57.692	58.714	58.348	55.900	57.029
Bendosari	62.346	63.212	63.579	62.759	63.091
Polokarto	82.879	84.183	83.879	83.353	84.002
Mojolaban	86.651	86.660	87.938	88.143	88.743
Grogol	118.823	117.765	118.432	121.149	120.478
Baki	67.731	67.989	68.773	71.033	69.911
Gatak	51.158	51.649	51.483	52.519	52.215
Kartasura	104.410	103.993	104.762	109.337	108.465
Kab. Sukoharjo	883.363	886.423	889.966	890.675	893.169

Sumber: Dispendukcapil Kab. Sukoharjo

Mengenai Tingkat Kepadatan Penduduk tahun 2017, Kecamatan Kartasura merupakan kecamatan terpadat dengan 5.640 jiwa/km² dan kecamatan dengan paling rendah yaitu kecamatan Grogol dengan 402 jiwa/km². Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Tingkat Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013-2017 (jiwa/km²)

Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017
Weru	1.606	1.615	1.454	1.422	1.417
Bulu	1.178	1.178	963	903	922
Tawang Sari	1.490	1.488	1.429	1.367	1.402
Sukoharjo	1.184	1.958	2.071	2.090	2.092
Nguter	1.184	1.186	1.063	1.028	1.039
Bendosari	1.184	1.302	1.200	1.190	1.191
Polokarto	1.216	1.222	1.349	1.349	1.337
Mojolaban	2.299	2.323	2.474	2.490	2.497
Grogol	3.585	3.622	3.948	4.040	402
Baki	2.493	2.518	3.130	3.238	3.182
Gatak	2.586	2.614	2.644	2.702	2.682
Kartasura	4.925	4.983	5.448	5.677	5.640

Sumber : Dispendukcapil Kab. Sukoharjo

2.1.6 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara/ daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

Tabel. 2.8**PDRB Kabupaten Sukoharjo Menurut Harga Berlaku Tahun 2013-2017 (dalam Juta Rupiah)**

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.338.414.27	2.359.928.60	2.657.130.24	2.809.593.96	2.945.664.83
B	Pertambangan dan Penggalian	94.344.32	117.218.81	138.919.07	146.352.17	147.472.90
C	Industri Pengolahan	8.624.414.94	9.745.454.20	10.368.908.70	11.380.047.78	12.408.833.47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	27.814.96	28.015.69	28.402.19	32.497.00	36.829.72
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.155.73	8.614.02	9.100.99	10.720.18	11.237.32
F	Konstruksi	1.400.213.29	1.560.510.58	1.756.017.76	1.922.351.95	2.111.382.86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	3.996.673.78	4.310.660.98	4.721.567.22	5.077.136.81	5.535.492.43

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
	Mobil dan Sepeda Motor					
H	Transportasi dan Pergudangan	647.697.56	755.298.98	859.521.48	936.207.35	1.036.237.43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	777.394.78	884.398.18	996.537.57	1.113.072.57	1.210.354.29
J	Informasi dan Komunikasi	848.697.02	989.341.31	1.112.024.35	1.217.805.12	1.394.848.31
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	839.120.60	895.656.19	1.008.862.91	1.127.896.62	1.215.894.41
L	Real Estate	472.935.99	535.272.15	597.272.99	651.004.97	706.275.66
M,N	Jasa Perusahaan	78.469.92	87.511.82	100.274.18	113.032.42	127.018.88
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	550.175.42	584.381.73	639.113.44	699.704.02	741.268.35
P	Jasa Pendidikan	863.950.95	982.734.87	1.086.759.37	1.200.499.00	1.341.116.62
Q	Jasa Kesehatan	188.141.60	223.053.03	256.071.41	280.475.52	309.252.66

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
	dan Kegiatan Sosial					
R,S,T,U	Jasa lainnya	292.188.47	339.437.67	364.232.93	401.209.55	436.234.05
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	22.048.803.61	24.407.488.81	26.700.716.80	29.119.606.98	31.715.414.17

Sumber: BPS Sukoharjo

Tabel. 2.9

PDRB Kabupaten Sukoharjo Menurut Harga Konstan Tahun 2013-2017 (dalam Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.913.143.34	1.844.193.63	1.976.391.80	2.025.492.06	2.075.272.74
B	Pertambangan dan Penggalan	86.061.57	90.145.76	91.863.36	93.645.51	90.948.29

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
C	Industri Pengolahan	7.551.722.03	8.045.937.72	8.285.661.50	8.733.131.48	9.254.975.35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	29.594.91	29.759.37	28.674.57	30.275.56	31.556.57
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.823.79	8.000.90	8.158.02	8.782.29	9.158.62
F	Konstruksi	1.225.425.50	1.266.624.32	1.366.476.56	1.467.913.25	1.563.977.65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.661.153.97	3.837.603.68	4.057.039.94	4.247.990.37	4.460.847.58
H	Transportasi dan Pergudangan	637.990.90	694.754.01	759.022.79	820.587.72	882.061.90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	704.409.38	750.312.10	802.607.42	855.384.97	908.304.75
J	Informasi dan	841.635.41	993.921.19	1.137.810.26	1.244.404.28	1.366.169.43

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
	Komunikasi					
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	695.636.42	700.844.29	757.344.66	823.233.53	855.357.07
L	Real Estate	456.596.02	485.443.34	523.664.75	562.996.15	606.117.26
M,N	Jasa Perusahaan	67.563.51	72.763.13	79.247.16	86.269.91	92.938.73
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	464.354.72	462.221.12	485.834.72	505.638.95	519.081.74
P	Jasa Pendidikan	633.953.01	696.701.80	755.469.31	811.741.18	869.997.23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	153.307.37	174.464.49	191.628.81	206.440.11	222.580.44
R,S,T,U	Jasa lainnya	271.517.58	295.319.00	305.182.56	322.055.49	343.594.12
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	19.401.889.44	20.449.009.84	21.612.078.19	22.845.982.81	24.152.939.48

Sumber: BPS Sukoharjo

Sedangkan laju pertumbuhan PDRB tahun dasar 2010 menurut Lapangan Usaha tergambar sebagai berikut:

Tabel 2.10

Laju Pertumbuhan PDRB Tahun Dasar 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013-2017 (%)

Kategori	Uraian	2013	2014	2015r	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.60	-3.60	7.17	2.48	2.46
B	Pertambangan dan Penggalian	2.93	4.75	1.91	1.94	-2.88
C	Industri Pengolahan	7.89	6.54	2.98	5.40	5.98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10.52	0.56	-3.65	5.58	4.23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.26	2.26	1.96	7.65	4.29
F	Konstruksi	4.41	3.36	7.88	7.42	6.54
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.12	4.82	5.72	4.71	5.01
H	Transportasi dan Pergudangan	9.81	8.90	9.25	8.11	7.49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.71	6.52	6.97	6.58	6.19
J	Informasi dan Komunikasi	9.20	18.09	14.48	9.37	9.79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.51	0.75	8.06	8.70	3.90

Kategori	Uraian	2013	2014	2015r	2016*	2017**
L	Real Estate	8.04	6.32	7.87	7.51	7.66
M,N	Jasa Perusahaan	13.45	7.70	8.91	8.86	7.73
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.97	-0.46	5.11	4.08	2.66
P	Jasa Pendidikan	9.29	9.90	8.44	7.45	7.18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.63	13.80	9.84	7.73	7.82
R,S,T,U	Jasa lainnya	10.01	8.77	3.34	5.53	6.69
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5.78	5.40	5.69	5.71	5.72

Sumber: BPS Sukoharjo

Berdasarkan tabel 2.8 dan 2.9, baik PDRB ADHB maupun ADHK Tahun 2017 mengalami kenaikan dari tahun 2016. Dari keduanya, 3 sektor terbesar antara lain (1) Industri Pengolahan, (2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (3) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sedangkan, 3 sektor terendah antara lain (1) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (2) Pengadaan Listrik dan Gas, (3) Jasa Perusahaan.

Pada tabel, laju pertumbuhan PDRB ADHB juga mengalami kenaikan menjadi 5,72%. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada sektor jasa lainnya, yaitu dari 5,53% menjadi 6,69%. Sedangkan penurunan signifikan terlihat pada sektor jasa keuangan dan asuransi, yaitu dari 8,70% menjadi 3,90%. Penurunan hingga mencapai angka sangat rendah terjadi pada sektor pertambangan dan penggalan, yaitu dari 1,94% menjadi -2,88%.

Mengenai distribusi persentasi PDRB ADRB, dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.11
Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013-2017 (%)

Kategori	Uraian	2013	2014	2015r	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.61	9.67	9.95	9.65	9.29
B	Pertambangan dan Penggalian	0.43	0.48	0.52	0.50	0.46
C	Industri Pengolahan	39.12	39.93	38.83	39.08	39.13
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.13	0.11	0.11	0.11	0.12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04
F	Konstruksi	6.35	6.39	6.58	6.60	6.66
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.13	17.66	17.68	17.44	17.45
H	Transportasi dan Pergudangan	2.94	3.09	3.22	3.22	3.27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.53	3.62	3.73	3.82	3.82
J	Informasi dan Komunikasi	3.85	4.05	4.16	4.18	4.40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.81	3.67	3.78	3.87	3.83
L	Real Estate	2.14	2.19	2.24	2.24	2.23

Kategori	Uraian	2013	2014	2015r	2016*	2017**
M,N	Jasa Perusahaan	0.36	0.36	0.38	0.39	0.40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.50	2.39	2.39	2.40	2.34
P	Jasa Pendidikan	3.92	4.03	4.07	4.12	4.23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.85	0.91	0.96	0.96	0.98
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.33	1.39	1.36	1.38	1.38
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100.0 0	100.0 0	100.0 0	100.0 0	100.0 0

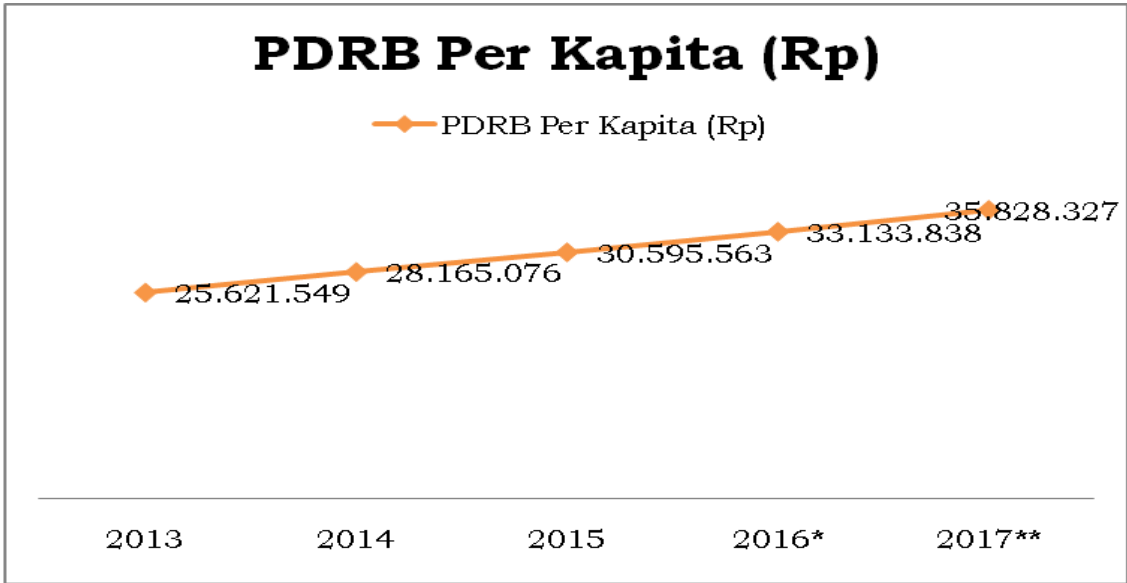
Sumber: BPS Sukoharjo

Sementara yang dimaksud dengan PDRB perkapita adalah PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah itu, maka akan menghasilkan suatu PDRB perkapita. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Dari tahun 2013 hingga 2017, PDRB Per Kapita menunjukkan tren naik. Berikut secara rinci gambaran PDRB Per Kapita Kabupaten Sukoharjo.

Gambar 2.6

PDRB Per Kapita (Rp)

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013-2017



Sumber : BPS Sukoharjo

2. Laju Inflasi

Inflasi menurut Bank Indonesia adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dampak dari inflasi ini salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa.

Angka inflasi di Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu tahun 2013-2017 dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2.12
Tingkat Inflasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013-2017

Tahun	Tingkat Inflasi
2013	8,42
2014	7,93
2015	2,69
2016	2,34
2017	3,40

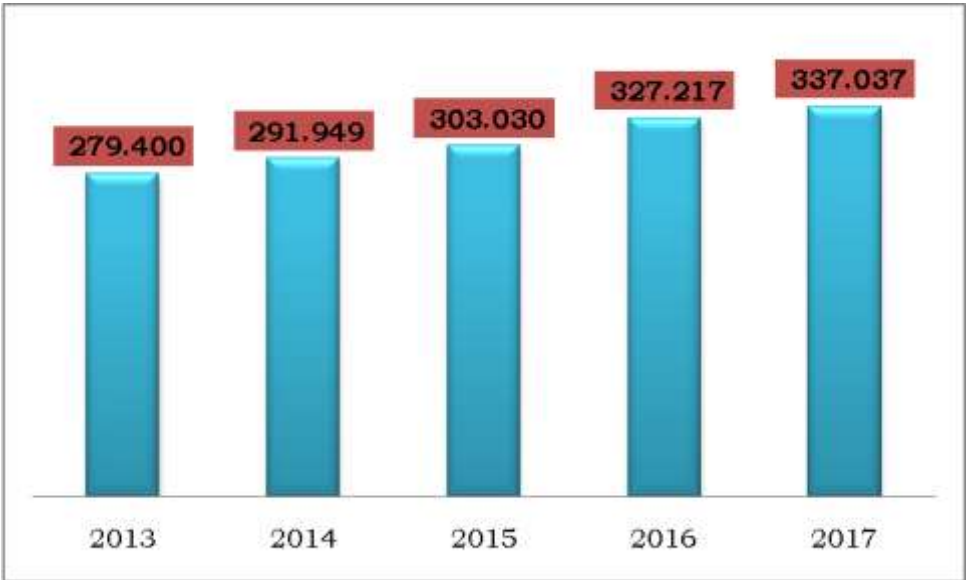
Sumber: BPS Kab. Sukoharjo

3. Penduduk Miskin

Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah, tidak terkecuali juga bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Berbagai macam program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta diharapkan dapat terus menekan angka kemiskinan sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita perhari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Garis kemiskinan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.7

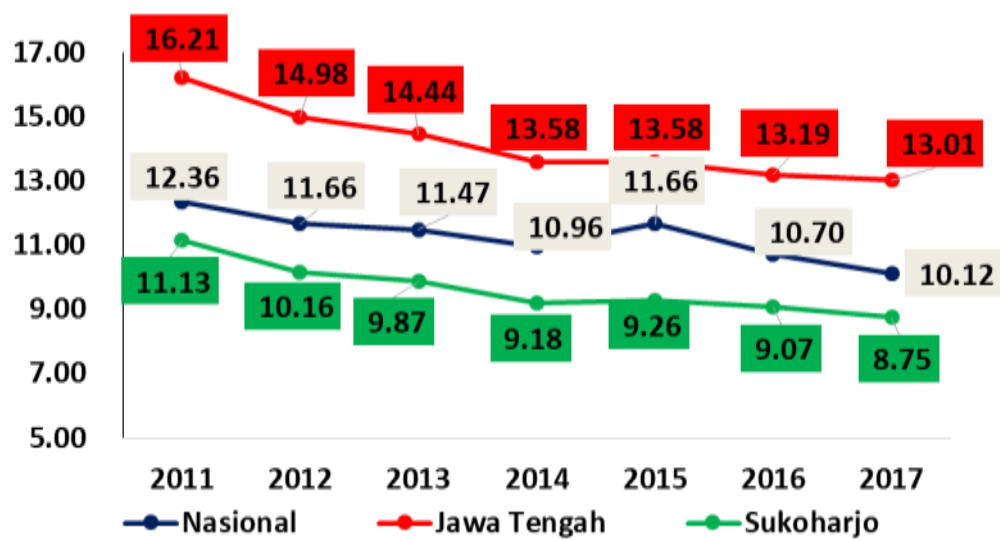
Garis Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013-2017
(Rp/Kapita/Bulan)



Sumber: BPS Sukoharjo

Sedangkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 2.8
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2011-2017

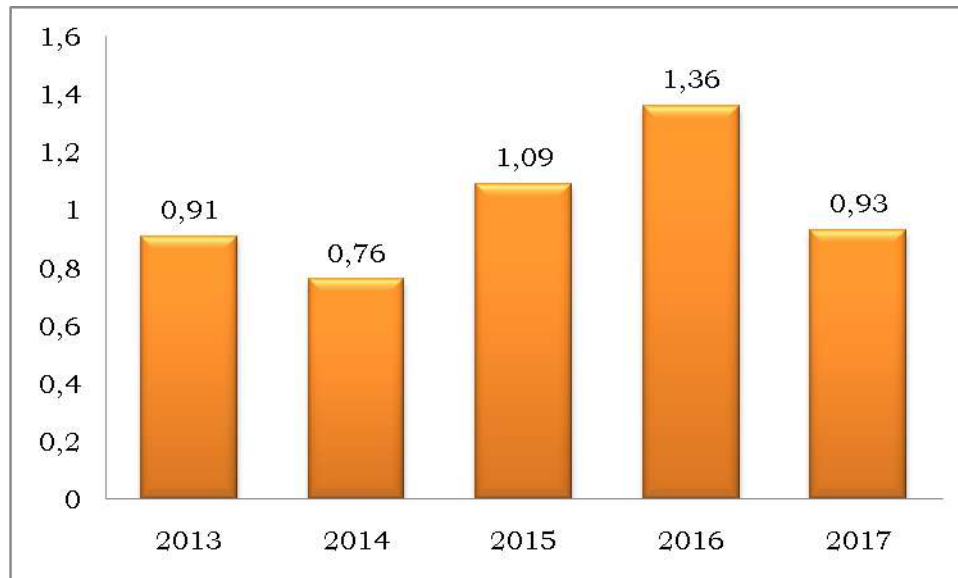


Sumber: BPS Sukoharjo

1) Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan disajikan dalam gambar 2.9 sebagai berikut:

Gambar 2.9
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013-2017



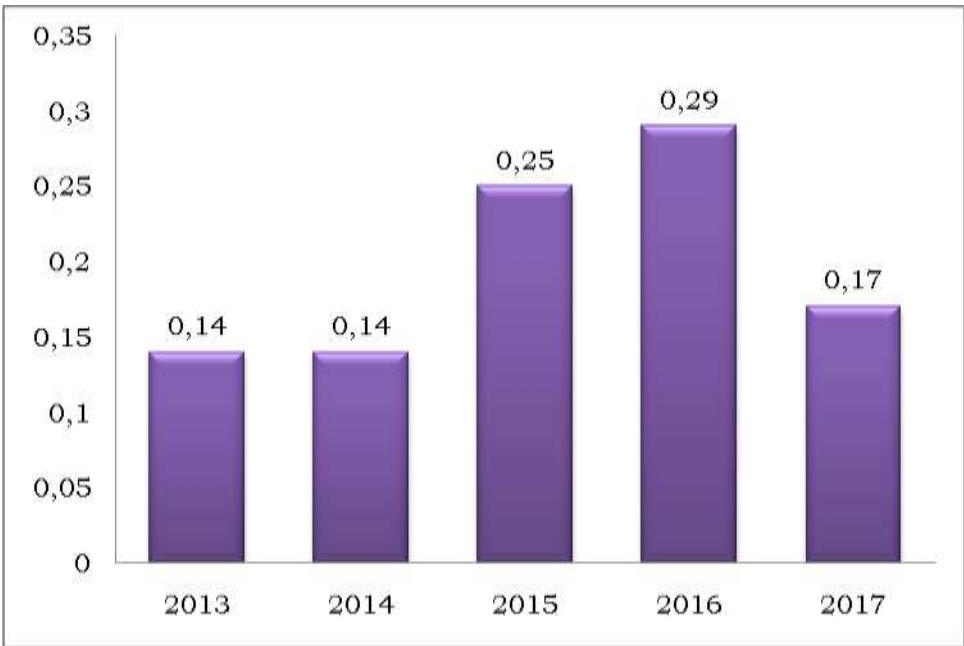
Sumber : BPS Sukoharjo

Meskipun indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo mulai menunjukkan tren menurun pada tahun 2014, angka ini mengalami kenaikan pada tahun 2015-2016. Pada tahun 2017, indeks kembali turun menjadi 0,93%.

2) Indeks Keparahan Kemiskinan

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan satuan indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan disajikan ke dalam gambar 2.10 sebagai berikut:

Gambar 2.10
Grafik Perkembangan Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013-2017



Sumber : BPS Sukoharjo

Walau sempat menunjukkan tren naik, angka Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) pada tahun 2017 menunjukkan angka 0,17 atau turun sebesar 0,12% dari tahun 2016.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi: meliputi Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

IPM Kabupaten Sukoharjo dari tahun ke tahun kondisinya selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan manudia di Kabupaten Sukoharjo semakin baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, angka IPM mencapai 75,56.

Tabel 2.13
Capaian IPM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
IPM	74,91	73,76	74,53	75,06	75,56

Sumber: BPS Prov. Jateng

Gambaran indikator pembentuk IPM secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini.

1) Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Sukoharjo secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata usia harapan hidup yang semakin panjang. Capaian rata-rata angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan kecenderungan meningkat.

Tabel 2.14
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka harapan hidup (Tahun)	77,44	77,45	77,46	77,46	77,49

Sumber: BPS Prov.Jateng

2) Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Tabel 2.15
Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Harapan lama sekolah (tahun)	12,66	12,96	13,42	13,79	13,8

Sumber: BPS Prov. Jateng

3) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan Formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Angka rata-rata lama sekolah bermanfaat untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam Pendidikan Formal. Capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan fluktuasi. Dalam kurun waktu 2012 – 2016 capaian rata-rata lama sekolah meningkat dari 8,53 tahun menjadi 8,58 tahun. Kemudian, angka tersebut naik pada tahun 2017 menjadi 8,71 tahun.

Tabel 2.16
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2013-2017 (Tahun)

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rata-Rata Lama Sekolah	8,82	8,50	8,50	8,58	8,71

Sumber: BPS Prov. Jateng

4) Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per Kapita tahun 2017 Kabupaten Sukoharjo mengalami kenaikan dari tahun 2016 yakni menjadi sebesar Rp. 10. 765 ribu/orang/tahun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan. Perkembangan pengeluaran per kapita Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17
Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2013-2017 (ribu rupiah/orang/tahun)

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pengeluaran per kapita	654,95	10.264	10.416	10.452	10.765

Sumber: BPS Prov. Jateng

5. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tersebut. Pada tahun 2017, APK SD/MI dan APK SMP/MTs sudah mencapai angka 100, sedangkan APK SMA/SMK/MA masih berada di angka 88,60. Secara lengkap berikut APK di 3 jenjang pendidikan di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2.18
APK SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	APK SD/MI	113,70	112,85	112,84	113,55	113,37
2	APK SMP/MTs	101,44	105,14	106,90	105,91	104,84
3	APK SMA/SMK/MA	76,51	81,22	83,38	85,15	88,60

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo

6. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut.

Pada tahun 2017, APM SD/MI mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sedangkan APM SMP/MTs dan APM SMA/SMK/MA mengalami kenaikan. Secara rinci data APM di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada Tabel 2.19 berikut:

Tabel 2.19
Capaian APM SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	APM SD/MI	99,10	98,20	97,99	99,03	98,83
2.	APM SMP/MTs	70,61	76,65	82,16	77,57	77,61
3.	APM SMA/SMK/MA	52,59	54,47	56,46	56,64	58,92

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo

7. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk hamil ektopik), persalinan, abortus (termasuk *abortus mola*), dan masa dalam kurun 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk didalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental. Salah satu penyebab AKI di Sukoharjo belum bisa mencapai angka nol karena masih adanya ibu hamil resti dengan penyakit penyerta yang terdeteksi setelah ibu dalam kondisi hamil dan ibu hamil ditemukan resiko tinggi pada trimester 3. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013-2017 disajikan ke dalam tabel berikut.

Tabel 2.20**Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH
di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013-2017**

Tahun	AKI per 100.000 KH/ Kasus
2013	98,86 / 13 Kasus
2014	102,47 / 13 Kasus
2015	159,05/ 20 Kasus
2016	94,8/ 12 Kasus
2017	31,94 / 4 Kasus

Sumber: Dinas Kesehatan

Salah satu upaya penurunan kasus kematian ibu adalah melalui pemberian pelayanan yang optimal kepada ibu hamil dan ibu melahirkan. Pelayanan kepada ibu hamil antara lain melalui pemeriksaan rutin selama proses kehamilan. Selain pemeriksaan kepada ibu hamil, upaya lain dalam rangka mengurangi AKI adalah melalui pertolongan pada persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih.

8. Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kasus kematian bayi 0-12 bulan dalam kurun waktu satu tahun. Angka Kematian Balita (AKABA) adalah kasus kematian bayi umur 0-12 bulan ditambah anak umur 1-5 tahun dalam kurun waktu satu tahun. AKB dan AKABA di Kabupaten Sukoharjo tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Data selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.21**AKB dan AKABA di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2013-2017**

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	AKB (per 1.000 Kelahiran Hidup)/ kasus	10,79 (142 Kasus)	10,43 (135 Kasus)	9,94 (125 Kasus)	9,0 (114 Kasus)	6,39 (80 Kasus)

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
2	AKABA (per 1.000 Kelahiran Hidup)/kasus	12,47 (164 Kasus)	11,98 (155 Kasus)	11,92 (125 Kasus)	10,82 (137 Kasus)	8,54 (107 Kasus)

Sumber: Dinas Kesehatan

9. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Kapabilitas dasar manusia yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) tetapi secara khusus memberi tekanan pada pencapaian yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan dengan melihat beberapa indikator, yaitu hidup yang lama dan sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sukoharjo selalu menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 2011-2015, dari sebesar 95,16 pada tahun 2011 menjadi 96,56 pada tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia perempuan di Kabupaten Sukoharjo semakin membaik, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengalami kenaikan dari sebesar 67,46 pada tahun 2011 menjadi 70,45 pada tahun 2015. Perkembangan IPG dan IDG Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada Tabel 2.22 berikut:

Tabel 2.22

IPG dan IDG di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2016

INDIKATOR	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
IPG	95,16	95,34	95,53	96,34	96,56
IDG	67,46	68,73	67,02	71,94	70,45

Sumber: BPS Kab. Sukoharjo

10. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Jumlah grup kesenian yang ada di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2017 tercatat sebanyak 202 organisasi, terdiri atas kelompok seni tari, kelompok reog/jathilan, kelompok seni kethoprak/teater, kelompok Pewayangan/Pedalangan, kelompok karawitan, kelompok campursari, kelompok musik modern, kelompok religi (laras madya/hadrah) dan kelompok seni rupa.

Tabel 2.23
Jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2013-2017

Jenis Olahraga (KLUB)		2013	2014	2015	2016	2017
1	Cabor Aeromodeling	1	1	1	1	1
2	Cabor Bola Voli/Voli Pantai	12	12	12	12	12
3	Cabor Balap Sepeda	2	2	2	2	2
4	Cabor Bulu Tangkis	75	75	75	75	75
5	Cabor Gantole	1	1	1	1	1
6	Cabor Paralayang	2	2	2	2	2
7	Cabor Panjat Tebing	2	2	2	2	2
8	Cabor Pencak Silat	7	7	7	7	7
9	Cabor Renang/Loncat Indah	6	6	6	6	6
10	Cabor Sepak Bola/Futsal	61	61	61	61	61
11	Cabor Senam	10	10	10	10	10
12	Cabor Tennis Meja	2	2	2	2	2
13	Cabor Tennis Lapangan	17	17	17	17	17
14	Cabor Tinju	4	4	4	4	4
JUMLAH		202	202	202	202	202

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Sukoharjo

2.1.7 Aspek Pelayanan Umum

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

- Taman Kanak-Kanak

Tabel 2.24

Banyaknya Sekolah & Murid Taman Kanak-Kanak
Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2012– 2016

Tahun	Sekolahan			Jumlah Murid
	Neg.	Swasta	Jumlah	
2013	3	352	355	12.735
2014	3	349	352	12.775
2015	3	347	350	13.775
2016	3	347	350	13.924
2017	3	356	359	14.192

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.
Sukoharjo

- Sekolah Luar Biasa (SLB)

Sekolah Luar Biasa Negeri di Kabupaten Sukoharjo ada 5 unit yaitu di Kecamatan Tawang Sari, Bendosari, Polokarto dan Kartasura yang diperuntukkan bagi para penyandang cacat. Berikut adalah data mengenai jumlah SLB dan jumlah siswa menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2.25

Jumlah SLB dan Jumlah Siswa Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017

Jumlah SLB		Jumlah Siswa Menurut Jenjang Pendidikan			
Negeri	Swasta	TKLB	SDLB	SMPLB	SMLB
1	4	50	268	116	56

- Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Tabel 2.26

Data jumlah SD Negeri/Swasta dan MI Negeri/ Swasta
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013-2017

Tahun	SD			MI		
	Neg.	Swasta	Jml	Neg.	Swasta	Jml.
2013	456	24	480	6	71	76
2014	456	25	481	6	68	74
2015	2.864	8.186	11.050	6	68	74
2016	442	29	471	6	68	74
2017	443	29	472	6	71	77

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo

Tabel 2.27

Jumlah Murid SD dan MI di kabupaten Sukoharjo
Tahun Ajaran 2013-2017

Tahun	Jumlah Murid	
	SD	MI
2013	63.264	13.372
2014	61.963	14.850
2015	61.050	14.742
2016	61.050	14.853
2017	59.726	17.541

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo

- Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan MTs merupakan pembangunan pendidikan untuk meningkatkan angka partisipasi SMP/MTs; meningkatkan angka transisi ke SMA dan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan serta mengurangi angka putus sekolah. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan; ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik merupakan hal pokok yang harus diperhatikan.

Tabel 2.28

**Data Jumlah SLTP Negeri/Swasta dan MTs Negeri/Swasta
Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2013-2017**

Tahun	SMP			MTs		
	Neg.	Swas	Jml	Neg	Swas	Jml.
2013	41	25	66	3	14	17
2014	41	26	67	3	14	15
2015	41	27	68	4	11	15
2016	41	27	68	4	11	15
2017	41	31	72	3	12	15

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sukoharjo

Tabel 2.29

**Data Jumlah Murid SMP dan MTs di Kabupaten Sukoharjo
Tahun Ajaran 2013-2017**

Tahun	Jumlah Murid	
	SMP	MTs
2013	29.171	6.608

2014	29.440	7.092
2015	25.514	4.454
2016	30.318	4.488
2017	29.814	6.656

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo

- Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah (MA)

Tabel 2.30

Data Jumlah SMA Negeri/Swasta dan MA Negeri/Swasta Kabupaten Sukoharjo TA. 2013-2017

Tahun	SMA			MA		
	Neg.	Swas	Jml	Neg	Swas	Jml.
2013	6	15	21	1	4	5
2014	6	22	28	1	4	5
2015	10	17	27	1	5	6
2016	10	17	27	1	5	6
2017	10	17	27	1	5	6

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo

Tabel 2.31
Data Jumlah Murid SMA Negeri/Swasta dan MA
Negeri/Swasta
Kabupaten Sukoharjo 2013-2017

Tahun	SMA			MA		
	Neg.	Swas	Jml	Neg	Swas	Jml.
2013	8.542	2.357	10.899	441	1.335	1.776
2014	8.141	2.602	10.743	430	1.438	1.868
2015	8.387	2.739	11.126	430	1.432	1.862
2016	8.387	2.739	11.126	430	1.438	1.868
2017	9.417	3.177	12.594	561	1.779	2.340

*Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sukoharjo*

Tabel 2.32
Data Jumlah SMK Negeri/Swasta Kab.Sukoharjo
TA. 2013-2017

Tahun	SMK		
	Negeri.	Swasta	Jumlah
2013	5	23	26
2014	6	22	28
2015	4	24	28
2016	6	24	30
2017	6	26	32

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo memiliki 6 perguruan tinggi yaitu Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Veteran Bantara Sukoharjo, Universitas Terbuka, Akademi Teknik Warga,

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta.

Jumlah Guru di Kabupaten Sukoharjo pada ajaran 2013-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.33
Data Jumlah Guru TK s/d SMK Kab.Sukoharjo
Tahun Ajaran 2013-2017

No	Guru	2013	2014	2015	2016	2017
1	TK	1.400	1.242	2.012	1.225	1.151
2	SD	5.469	4.908	4.658	4.917	4.902
3	MI	1.031	1.019	1.038		
4	SMP	2.291	2.195	2.356	2.190	2.159
5	MTs	571	525	547		563
6	SMA	3.293	980	2.283	1.012	1.002
7	MA	249	221	240		243
8	SMK	1.199	1.246	1.316	1.316	1.360
JUMLAH		15.503	12.494	14.450	10.660	11.380

*Sumber Data : Dinas Pendidikan & Kemenag Kab.
Sukoharjo*

b. Kesehatan

Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan diantaranya ditentukan oleh tersedianya fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai. Semakin banyak dan lengkap fasilitas dan tenaga medis yang ada berarti akan semakin baik pula pelayanan kesehatan di Kabupaten Sukoharjo, sehingga pelayanan kesehatan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Sedangkan keberadaan Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, diperlukan upaya meningkatkan mutu, sarana dan prasarana agar dapat memberikan pelayanan dasar, memberikan rujukan kepada rumah sakit. Untuk

perkembangan sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Sukoharjo, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.34
Sarana Prasarana Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2013-2017

No	Sarana Kesehatan (Unit)		2013	2014	2015	2016	2017
1	Posyandu		1.156	1.165	1.168	1.178	1.182
2	Poskesdes		167	167	167	167	167
3	Puskesmas						
	a.	Induk	12	12	12	12	12
	b.	Pembantu	48	48	48	57	57
	c.	Keliling	79	79	79	79	
4	Rumah Sakit Umum						
	a.	Tipe A					
	b.	Tipe B	1	3	3	1	1
	c.	Tipe C (Swasta)	1	6	6	1	
	d.	Tipe D (Swasta)	2	2	2	3	
5	Rumah Sakit Khusus		22	22	22	22	
6	Klinik/Praktek Dokter		485	485	601	108	

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo

Unit dan jumlah puskesmas pada tahun 2016 dengan total 148 unit meliputi 12 Puskesmas Induk dan 57 Puskesmas Pembantu serta 79 Puskesmas Keliling. Puskesmas tersebut berada di setiap kecamatan se-Kabupaten Sukoharjo.

Rumah Sakit Umum Daerah ada 1 (RSUD Sukoharjo), rumah sakit umum swasta ada 4 yaitu RSU Dr. Oen Solo Baru, RSU Nirmala Suri, RSIS Yarsis, dan RS Indriati. Rumah Sakit Khusus terdiri dari Rumah

Sakit Ortopedi Dr. Soeharso, RSK Paru Sokasari Husada, RSK Ibu Anak Griya Husada dan RSK Bedah Karima Utama.

Tabel 2.35
Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2017

No	Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Dokter Umum	46
2	Dokter Gigi	22
3	Bidan	372
4	Perawat	183
5	Apoteker	4
6	Sarjana Teknis Kefarmasian	23
7	Tenaga Sanitasi Lingkungan	19
8	Nutrisisionis	18

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum adalah jenis pelayanan publik bidang pekerjaan umum yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Pentingnya penyelenggaraan urusan pekerjaan umum ini telah disadari oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan secara bertahap dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2019. Melihat kondisi tersebut perlu dilakukan penyusunan target SPM per tahun yang diintegrasikan dengan RPJMD.

Urusan pekerjaan umum merupakan pelayanan dalam menyediakan sarana dan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan pembangunan suatu daerah. Pekerjaan umum merupakan salah satu urusan pada suatu daerah yang perlu mendapatkan perhatian.

Pelayanan urusan pekerjaan umum difokuskan pada pelayanan urusan Jalan dan Jembatan, Sumber Daya Air, Perkotaan dan Perdesaan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung dan Lingkungan, dan Jasa Konstruksi.

Panjang jalan di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2017 secara keseluruhan sepanjang 683,72 Km terbagi menjadi 25,19 Km jalan nasional; 53,41 Km jalan provinsi, dan 605,12 Km jalan Kabupaten.

Tabel 2.36
Kondisi Jalan
di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017

NO.	KONDISI JALAN	STATUS JALAN		
		JALAN NEGARA (Km)	JALAN PROVINSI (Km)	JALAN KABUPATEN (Km)
1	Baik	25,19	53,41	281,25
2	Sedang	16,09	152,08	152,08
3	Rusak Ringan	9,1	107,92	107,92
4	Rusak Berat	-	63,87	63,87
	Jumlah	25, 19	53,41	605,12

Sumber : Bidang Bina Marga DPUPR Kab. Sukoharjo

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan perumahan dan pemukiman khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terus dilakukan guna memberi pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Tabel 2.37
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah
1	Weru	3.931
2	Bulu	2.209
3	Tawang Sari	2.487
4	Sukoharjo	1.181
5	Nguter	2.128
6	Bendosari	1.501
7	Polokarto	1.627
8	Mojolaban	589
9	Grogol	566
10	Baki	91
11	Gatak	166
12	Kartasura	291

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Perkembangan jumlah kriminalitas di Kabupaten Sukoharjo sejak tahun 2012 s/d 2016 secara umum mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015 terdapat 54 kasus kriminalitas, jumlah kasus meningkat pada tahun 2016 menjadi 242 kasus. Berikut rincian kasus kriminalitas yang terjadi.

Tabel 2.38
Banyaknya Kasus Kriminalitas menurut Jenisnya
Tahun 2012 - 2016

No	Jenis Kejahatan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pencurian	300	279	24	24	137
2	Perampokan	2	-	-	-	-
3	Penipuan	112	15	-	-	43
4	Perjudian	10	-	-	-	-
5	Perkosaan	7	-	3	3	-
6	Pembunuhan	1	-	-	-	2
7	Obat Terlarang	24	3	10	10	23
8	Perkelahian dan Penganiaan	50	-	17	17	37
9	Pencucian Uang	0	-	-	-	-
10	Perdagangan Manusia	0	-	-	-	-
11	Lainnya	82	-	-	-	-
	Jumlah	588	297	54	54	242

Sumber data : POLRES Sukoharjo

Sementara jumlah konflik yang terjadi di masyarakat di Kabupaten Sukoharjo, pada tahun 2016 tidak terdapat konflik yang terjadi di masyarakat.

Tabel 2.39
Jumlah Konflik yang terjadi di Masyarakat menurut Sumbernya
Tahun 2012 - 2016

No	Sumber Konflik	2012	2013	2014	2015	2016
1	Suku/Separatis	0	0	0	0	0
2	Agama	0	2	0	0	0
3	SDA / Lingkungan	0	0	0	0	0
4	Hak Asasi Manusia (HAM)	0	0	0	0	0
5	Status Sosial / Kemiskinan	0	0	0	0	0
6	Kepemimpin Daerah	0	4	0	0	0
Jumlah		0	6	0	0	0

Sumber data : Kesbangpolinmas dan Satpol PP Sukoharjo

f. Sosial

Masih banyaknya kalangan masyarakat yang hidupnya kurang beruntung seperti pakir miskin dan anak-anak terlantar/anak jalanan orang jompo dan lanjut usia, orang cacat dan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya maka pembangunan daerah harus memperhatikan sistem yang lebih baik bagi masyarakat yang kurang beruntung.

Tabel 2.40
Panti-panti di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 - 2016

No	Panti	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1)	Panti Sosial Asuhan Anak	buah	9	10	10	10	10
2)	Panti Sosial Bina Remaja	buah	1	1	1	1	1

No	Panti	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
3)	Panti Sosial Tresna Wirda	buah	1	1	1	1	1
4)	Panti Sosial Bina Grahita	buah	1	1	1	1	1
5)	Panti Sosial Bina Laras	buah	3	1	1	1	1

Sumber data : Dinas Sosial Kab. Sukoharjo

2.1.8 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi tenaga kerja (*labor force participation rate*) adalah rasio antara angkatan kerja (semua yang saat ini bekerja atau mencari kerja) dengan total penduduk usia kerja. Dalam kurun waktu lima tahun (2013-2017), dua variabel utama bidang ketenagakerjaan menunjukkan kinerja yang membaik. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan tren yang fluktuatif.

Tabel 2.41

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	67,89	69,38	67,17	n/a	67,29
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	5,98	4,60	4,52	n/a	2,27

Sumber: Dispernaker Kabupaten Sukoharjo

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat

pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Terkait dengan pemberdayaan perempuan dan anak, pemerintah berupaya untuk memberikan hak yang sama dalam pembangunan melalui upaya kesetaraan gender. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Permendagri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 mengamanatkan pengintegrasian isu gender dalam berbagai bidang pembangunan, pembentukan kelembagaan PUG serta dukungan pembiayaan pembangunan yang *responsive gender*. Selain itu juga telah diamanatkan Standar Pelayanan Minimal urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pelaksanaan SPM tersebut merupakan konsekuensi pelaksanaan program pembangunan yang responsif gender dan responsif anak.

Tabel 2.42
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak
1	Weru	0	0
2	Bulu	0	0
3	Tawang Sari	0	0
4	Sukoharjo	3	0
5	Nguter	1	0
6	Bendosari	2	1

7	Polokarto	1	0
8	Mojolaban	1	0
9	Grogol	6	0
10	Baki	4	0
11	Gatak	0	0
12	Kartasura	5	0

Sumber: DPPKB dan P3A Kab. Sukoharjo

c. Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan di suatu daerah mencakup empat komponen, yaitu: (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; (3) aksesibilitas/ keterjangkauan terhadap pangan; dan (4) kualitas/ keamanan pangan.

Tabel 2.43

Jumlah Komoditas Pangan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017

Komoditas	Jumlah (Ton)
Komoditas Pangan Nabati	
Beras	391.675
Jagung	17.088
Kedelai	4.644
Kacang Tanah	9.225
Ubi Kayu	20.466
Sayur	684
Buah-buahan	17.094
Gula	2.917

Komoditas	Jumlah (Ton)
Komoditas Pangan Hewani	
Daging Sapi dan Kerbau	2.237
Daging Ayam	4.773
Telur	9.131
Susu	2
Ikan	13.346

Sumber: Dinas Pangan

d. Pertanian

Sesuai pasal 2 ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanian, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam bidang pertanian sebagai berikut:

- 1) Pemberian izin lokasi, yang meliputi: (a). izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal; (b). perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku; dan (c). penanaman modal adalah yang menggunakan maupun tidak menggunakan fasilitas penanaman asing maupun penanaman modal dalam negeri.
- 2) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan. Pengadaan tanah adalah kegiatan untuk memperoleh tanah baik dengan cara memberikan ganti kerugian maupun tanpa memberikan ganti kerugian (secara sukarela).
- 3) Penyelesaian sengketa tanah garapan. Sengketa tanah garapan adalah pertikaian ataupun perbedaan kepentingan dari dua pihak atau lebih atas tanah garapan.
- 4) Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Ganti kerugian adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian tersebut atau bentuk lain.

- 5) Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* yang menjadi tanah *objek landreform*.
- 6) Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong. Tanah kosong adalah tanah yang dikuasai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai tanah, hak pengelolaan, atau tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagainya, yang belum dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.
- 7) Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong. Tanah kosong adalah tanah yang di kuasai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai tanah, hak pengelolaan, atau tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagainya, yang belum dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.
- 8) Pemberian izin membuka tanah. Diartikan sebagai izin yang diberikan kepada seseorang untuk mengambil manfaat dan mempergunakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
- 9) Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Hal ini diartikan merupakan pelaksanaan dan penetapan letak tepat rencana kegiatan yang telah jelas anggarannya baik dari pemerintah, swasta maupun perorangan yang akan membutuhkan tanah di wilayah Kabupaten/Kota tersebut berdasarkan data informasi pola penatagunaan tanah yang sesuai dengan kawasan rencana tata ruang wilayah. Adapun pola penatagunaan tanah adalah informasi mengenai keadaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan kawasan yang disiapkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Pembangunan dan penataan pertanahan menjadi sesuatu hal yang penting untuk dikembangkan menjadi lebih baik karena mempunyai peranan sosial dan ekonomi yang penting. Oleh karena itu, untuk dapat menguatkan dan membuktikan kepemilikan akan tanah perlu dibuatkan alat bukti berupa

sertifikat tanah. Sertifikat tanah terdiri atas Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), Hak Pengelolaan, dan Wakaf. Pengembangan kebijakan penataan ruang dengan keselarasan dan keseimbangan antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang yang adil, transparan, dan produktif melalui pemantapan koordinasi dan konsultasi antar pusat dan daerah, serta kerjasama antar daerah dengan lembaga dan organisasi masyarakat dalam kegiatan penataan ruang ditingkat daerah.

Tabel. 2.44
Uraian Tata Ruang di Kab. Sukoharjo Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
	Tata Ruang					
a.	Luas Kawasan Lindung					
	1). Hutan	304,2	304,0	304	304	304
	2). Bukan Hutan		2.454	2.454	2.459	2.459
b.	Luas Kawasan Pemukiman	17.674,40	17.674,40	17.674	17.674	14.808,60
c.	Luas Kawasan Industri	1.116,30	1.116,30	1.116	1.116	1.116
d.	Luas Lahan Produktif	21.000,00	27.903	27.903	27.903	27.903
e.	Luas Lahan Kritis	12.004,94	4.584,58	4584,58	4.584,58	4.584,58

Sumber: BPS Kab. Sukoharjo

e. Lingkungan Hidup

Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo terus dilakukan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan pengurangan efek gas rumah kaca serta pemanasan global. Adapaun capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 disajikan dalam tabel 2.36 sebagai berikut:

Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu unsur hayati (biotik), unsur sosial budaya dan unsur fisik (abiotik). Dalam hal ini perlu di bahas hal-hal mengenai lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Sukoharjo diantaranya:

1) Pencemaran

Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lngkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfingsi lagi sesuai dengan peruntukannya (UU Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982). Menurut tempat terjadinya, pencemaran dibedakan menjadi pencemaran udara, air, dan tanah. Di Kabupaten Sukoharjo terdapat kasus pencemaran sebagai berikut:

Tabel 2.45
Jumlah Pencemaran di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2012 - 2016

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah pencemaran					
1). Tanah	1	1	0	0	2
2). Air	2	2	4	3	2
3). Udara	-	3	2	1	5

Sumber: DLH Kab. Sukoharjo

f. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan administrasi kependudukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang pemerintahan dalam negeri meliputi (1) Cakupan

Penerbitan Kartu Keluarga; (2) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk; (3) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran; dan (4) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian. Berikut capaian masing-masing indikator bidang pemerintahan dalam negeri jenis pelayanan dokumen kependudukan.

Tabel 2.46
Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun 2017

No	Jenis Layanan	Jumlah yang diterbitkan
1	Akte Kelahiran	784.111
2	Akte Kematian	2.739
3	Perkawinan	168
4	Perceraian	8
5	Pengakuan Anak	11
6	KTP	627.970

Sumber: Dispendukcapil

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usahanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Disini subjek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat atau objek saja. Rukun Warga atau Rukun Tetangga (RW/RT) sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat hendaknya didorong untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya. Selain RT/RW, PKK menjadi aktor lain yang juga perlu mendapat perhatian.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Berkualitas tidaknya penyelenggaraan pelayanan publik tidak terlepas

dari kapasitas SDM aparat kelurahan. Secara umum kapasitas aparat kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan belum optimal, pemahaman dan kemampuan aparat dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi atas hasil pembangunan belum menunjukkan hasil yang cukup baik.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukoharjo salah satunya disebabkan oleh keberhasilan program Keluarga Berencana. Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Sukoharjo setiap tahunnya dibawah 2 artinya masih dalam kondisi belum mengkhawatirkan dibawah rata-rata nasional dan provinsi. Walaupun terjadi peningkatan rata-rata jumlah anak per keluarga.

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukoharjo salah satunya disebabkan oleh keberhasilan program Keluarga Berencana. Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Sukoharjo setiap tahunnya dibawah 2 artinya masih dalam kondisi belum mengkhawatirkan dibawah rata-rata nasional dan provinsi. Walaupun terjadi peningkatan rata-rata jumlah anak per keluarga.

Tabel 2.47
Jumlah Peserta KB Berdasarkan Alat/Metode
di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017

Jenis KB	Jumlah Peserta (Orang)
Implant	9.948
Obat/Pil KB	14.297
IUD/Spiral	19.175
Suntik	52.550
Kondom	2.022
Vasektomi	389
Tubektomi	8.959

Sumber : DPPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo

i. Perhubungan

Pembangunan sektor perhubungan dan transportasi bertujuan untuk meperlancar arus barang, penumpang dan jasa baik yang bersifat lokal, regional maupun nasional. Sehingga sektor transportasi dan perhubungan mempunyai peran yang sangat vital untuk mendukung pembangunan sektor lainnya.

Tabel 2.48
Moda Angkutan
di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017

Nama	Jumlah (Unit)
Moda Angkutan Barang	
Truk Barang Umum	1656
Mobil Box	507
Mobil Peti Kemas	0
Mobil Tangki	15
Moda Angkutan Umum	
Bus	247
Angkutan Kota	83
Taksi	50

Sumber : Dishub Kab. Sukoharjo

j. Komunikasi dan Informatika

Pembangunan dalam urusan informasi dan komunikasi ditandai melalui indikator pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi, serta kerjasama informasi dan media massa.

Jaringan komunikasi adalah saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain. Pembangunan jaringan komunikasi dimaksudkan sebagai upaya mempercepat koordinasi dan penyelesaian berbagai tugas organisasi kelompok maupun perorangan. Untuk mendukung sistem informasi dan

komunikasi pembangunan, masing-masing PD didorong untuk membangun jaringan komunikasi online melalui website. Pengguna website di Sukoharjo sudah 100% atau seluruh PD. Tujuan pembangunan web bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah mempermudah komunikasi dengan antar lembaga, dengan masyarakat ataupun pihak-pihak terkait yang berusaha menjalin komunikasi untuk mendapatkan informasi. Komunikasi melalui website akan jauh lebih mudah karena tidak mengenal perbedaan lokasi baik jauh maupun dekat dan juga lebih efisien dalam hal biaya dan waktu.

k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Penopang utama Sistem perekonomian daerah adalah: Usaha Mikro, UMKM dan Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Jumlah Koperasi di Sukoharjo yang sudah berbadan hukum sebanyak 826 unit, yang terdiri dari koperasi yang aktif sebanyak 419 unit dan yang tidak aktif sebanyak 427 unit. Jumlah koperasi dan UMKM di Kabupaten Sukoharjo disajikan dalam tabel 2.49 sebagai berikut:

Tabel 2.49
Koperasi di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017

Jenis Koperasi	Koperasi Produksi	Koperasi Konsumsi	Koperasi Simpan Pinjam	Koperasi Serba Usaha
Jumlah	1	0	256	49

Sumber : Disdagkop dan UKM Kab. Sukoharjo

Peran Usaha Mikro, UMKM dan Koperasi di Kabupaten Sukoharjo memegang peran strategis dalam kegiatan perekonomian, harus mampu memberikan kontribusi terhadap produksi daerah, membuka lapangan kerja dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi daerah.

1. Penanaman Modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus melaksanakan kewenangan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewenangan tersebut antara lain memberikan izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; melaksanakan pelayanan

terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota baik di dalam negeri maupun ke luar negeri; mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten/kota.

Tabel 2.50

Jumlah Investasi di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017

Jenis Investasi	Jumlah (Rp. Juta)
PMA	49.551
PMDN	3.039.486
Non PMA/PMDN	5.035.848

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo

m. Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Ketentuan yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan dan bertujuan untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan demikian, pembangunan kepemudaan memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan tinggi rasa nasionalismenya. Kegiatan dalam rangka

pembinaan kepada pemuda dan kegiatan kepemudaan secara langsung dapat meningkatkan daya kreatif dan inovatif pemuda dan membiasakan kepada pemuda untuk selalu peka terhadap perkembangan jaman dan perkembangan lingkungannya. Berikut gambaran bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017.

2.51
Jumlah Pemuda dan Organisasi Pemuda
di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Pemuda		Jumlah Organisasi Pemuda
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Weru	6.708	6.356	1
2	Bulu	5.016	4.638	0
3	Tawang Sari	6.675	6.319	0
4	Sukoharjo	10.742	10.571	10
5	Nguter	6.576	6.188	0
6	Bendosari	7.267	7.059	6
7	Polokarto	9.718	9.411	0
8	Mojolaban	10.221	10.002	1
9	Grogol	14.557	13.837	1
10	Baki	8.206	7.852	0
11	Gatak	5.880	5.637	0
12	Kartasura	12.517	11.955	3

Sumber: Dispora Kabupaten Sukoharjo

n. Kebudayaan

Pembangunan dan melestarikan kebudayaan diusahakan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada

budaya leluhur, keragaman budaya dan tradisi, meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat, menumbuhkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dan memperkuat ketahanan budaya. Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keragaman suku bangsa dan bahasa. Termasuk didalamnya adalah Kabupaten Sukoharjo, terdapat beberapa suku-bangsa, tetapi mayoritas adalah suku Jawa Cagar Budaya yang dimiliki daerah meliputi :

1. Benda Cagar Budaya jumlah 192 buah
2. Bangunan Cagar Budaya jumlah 24 buah
3. Situs Cagar Budaya jumlah 6 lokasi
4. Kawasan Cagar Budaya jumlah 2 kawasan

Sedangkan untuk bahasa, menggunakan bahasa lokal (bahasa Jawa). Untuk kawasan wisata budaya meliputi:

- wisata situs bersejarah meliputi:
 - peninggalan Keraton Kartasura di Kartasura;
 - peninggalan Keraton Pajang di Kartasura;
 - pesanggrahan Langenharjo di Kecamatan Grogol;
 - peninggalan Pabrik Gula Gembongan di Kartasura;
 - peninggalan Benteng Singopuran di Kartasura; dan
 - peninggalan Kandang Menjangan di Kartasura.
- wisata religi/ziarah meliputi:
 - makam Ki Ageng Purwoto Sidik di Desa Jatingarang Kecamatan Weru;
 - makam Balakan di Kecamatan Bendosari;
 - makam Kyai Banyubiru di Kecamatan Weru;
 - makam Majasto di Kecamatan Tawang Sari;
 - makam Kyai Shirot di Kecamatan Kartasura;
 - makam Patih Pringgoloyo di Kecamatan Kartasura; dan
 - makam Mbah Marbot/Sayyidiman di Kecamatan Bendosari.
- Wisata Benda Cagar Budaya Univet di Kecamatan Bendosari.
- Kawasan wisata buatan meliputi:
 - Pandawa Water World di Solo Baru.
 - Wisata air Waduk Mulur di Kecamatan Bendosari.
 - Wisata air Dam Colo di Kecamatan Nguter.
 - Wisata air dan pemancingan di Kecamatan Grogol.
 - Wisata air dan pemancingan di Kecamatan Mojolaban.

- Agrowisata Lembah Hijau di Kecamatan Mojolaban.

o. Perpustakaan dan Arsip

Kinerja pembangunan urusan perpustakaan menurut Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu jumlah perpustakaan, tingkat kunjungan perpustakaan per tahun, dan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah.

Kabupaten Sukoharjo memiliki 1 (satu) perpustakaan daerah yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

2.1.9 Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Sub sektor perikanan menyumbang PDRB sebesar 0,17 %. Dengan nilai produksi yang diperoleh sebesar Rp. 18.612,14 juta. Adapun produk perikanan yang ada di Kabupaten Sukoharjo merupakan produk perikanan umum yang berasal dari rawa, waduk, sungai, karamba dan sawah. Sehingga produksi komersial untuk perairan umum yang ada di Kabupaten Sukoharjo hanya mampu memenuhi pasar lokal untuk dikonsumsi masyarakat sekitar/lokal saja.

Tabel 2.56
Produksi Perikanan
di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017

Jenis Ikan	Produksi (Ton)	Nilai (Rp 000)
01. K a r p e r		0
02. T a w e s	57	342.360
03. M u j a i r		0
04. L e l e	9707	155.007.051
05. W a d e r	44	263.394
06. B e l u t	38	459.672
07. Katak Hijau	37	335.025
08. S o g o		0
09. T a g e h		0
10. G a b u s	18681	186.810

Jenis Ikan	Produksi (Ton)	Nilai (Rp 000)
11. U d a n g	43	596.148
12. Senggaringan		0
13. Nila Merah	921	19.711.132
14. Lain-lain : Gurami	104	3.278.559
Patin	91	1.526.259
Lain-lain	53	373.758

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Sukoharjo

b. Pariwisata

Beberapa Obyek wisata di wilayah Kabupaten Sukoharjo meliputi :

- Objek wisata alam diantaranya Objek Wisata Batu Seribu, Gunung Sepikul, Dam Colo, Waduk Mulur, Alas Karet Polokarto dan Pandawa Water World.
- Objek wisata ziarah diantaranya Makam Ki Ageng Balak, Pesanggrahan Langenharjo, Makam Ki Ageng Sutowijoyo, Makam Ki Ageng Purwotosidik dan Candi Sonosewu.
- Objek wisata sejarah diantaranya Petilasan Kraton Pajang dan Petilasan Kraton Kartasura. Selain itu Kabupaten Sukoharjo juga mempunyai wisata Seni Budaya diantaranya Pulung Langse, Kebo Kinul dan Jurit Suropaten,
- Wisata kuliner yang terdiri dari Jenang Krasikan, Nasi Liwet dan Gempol Pleret serta wisata kerajinan yang berupa Tatah sungging, ukir kaca dan gamelan.

Sementara data tentang Kepariwisataan di Kabupaten sukoharjo, dapat dikalsifikasikan sebagai berikut :

Tabel 2.57
Data Kepariwisataan Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2012-2016

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Obyek Wisata	2	2	2	2	2

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
2	Jumlah Hotel	13	15	16	20	20
3	Jumlah Restoran	4	19	24	25	25
4	Jumlah Even Tahunan	7	7	7	3	3
5	Jumlah Pengusaha Pariwisata terbina	100	50	50	30	30

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo

c. Pertanian

Kabupaten Sukoharjo merupakan lumbung padi nasional. Banyak lahan persawahan di Kabupaten Sukoharjo yang mampu panen 3 (tiga) kali dalam setahun. Produksi padi di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016 mencapai 152.776 ton atau dengan produktivitas 63,57 Kwintal/Ha. Penyumbang kontribusi terbesar dari sektor pertanian ini diberikan oleh tanaman bahan pangan yaitu sebesar 14,09% dari PDRB.

Tabel 2.58

**Luas Panen dan Produksi Pertanian Tanaman Pangan
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012-2016**

No	Jenis Tanaman Pangan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
a.	Padi					
	1) Luas areal produksi (panen) (Ha)	43.823	35.290	24.079	49.028	28.144
	2) Jumlah produksi gabah(ton)	300.927	266.634	152.776	310.753	181.148
	3) Produksi beras(ton)	190.186	143.982	0	0	152.776
	4) Jumlah konsumsi	52.259				

No	Jenis Tanaman Pangan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
	beras(ton/th)					
	5) Produktivitas (kw/ha)	68,67	75,56	63,67	63,38	63,57
b.	Jagung					
	1) Luas areal produksi (panen) (Ha)	2.907	762	462	2.210	1.668
	2) Produktivitas (kw/ha)	74,51	63,34	270,29	83,96	76,83
	2) Jumlah produksi(ton)	21.660	14.842	3.757	18.556	12.816
	3) Jumlah konsumsi	64				
c.	Kacang kedelai					
	1) Luas areal produksi (panen) (Ha)	2.654	1.244	1.094	1.626	658
	2) Jumlah produksi(ton)	4.841	2.592	2.163	3.006	1.422
	3) Produktivitas (kw/ha)	18,24	20,84	19,77	12,12	21,61
	4) Jumlah konsumsi	55.722				
e.	Ubi Kayu					
	1) Luas areal produksi (panen)(Ha)	2.434	1.992	1.600	1.600	4
	2) Jumlah produksi(ton)	39.511	37.063	29.176	27.870	7
	3) Produktivitas (kw/ha)	162,33	186,06	176,82	174,19	192,46
	4) Jumlah konsumsi					

Sumber data : Dinas Pertanian

d. Perdagangan

Sarana perdagangan di Kabupaten di Sukoharjo didominasi oleh pasar tradisional, akan tetapi kondisi yang ada sekarang insfrastuktur

perdagangan ini direvitalisasi karena kapasitas yang ada sudah tidak mampu memenuhi daya tampung yang ada.

Tabel 2.59
Sarana Perdagangan di Kabupaten Sukoharjo

No	Sarana Perdagangan	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1)	Pasar Tradisional	buah	26	26	26	26	26
2)	Pasar Swalayan	buah	60	60	66	82	82
3)	HyperMarket	buah	2	4	4	2	2
4)	Mal	buah	1	2	3	2	2
5)	Pasar hewan	buah	2	2	2	-	3
8)	Toko Kelontomg	unit	6523	6654	6654		

Sumber: Disdagkop UKM Kab. Sukoharjo

e. Perindustrian

Pembangunan sektor industri untuk menumbuh kembangkan home industri di pedesaan sesuai potensi desa, meningkatkan peran industri kecil dan menengah dalam memperdayakan ekonomi kerakyatan, dan memperkuat penguasaan teknologi peralatan dalam upaya pencapaian akses pasar dan penguasaan modal.

Sektor industri dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sukoharjo mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan perekonomian daerah yaitu mencapai 44,74% pada tahun 2015. Sektor industri merupakan penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2.60

Unit Kerja dan Nilai Produksi Industri kecil di Kab. Sukoharjo
Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
	Industri kecil					
1).	Unit Kerja (unit)	16.852	16.906	16.977	17.054	17.085
2).	Tenaga Kerja (orang)	144.672	146.732	149.764	154.335	155.784
3).	Nilai Produksi (Rp. Juta)	7.518.364,65	7.825.865,77	8.033.213,80	8.529.845,09	9.061.427,09

Sumber: Disdagkop UKM Kab. Sukoharjo

Tabel 2.61

Unit Kerja dan Nilai Produksi Industri Besar di Kab. Sukoharjo
Tahun 2012 - 2016

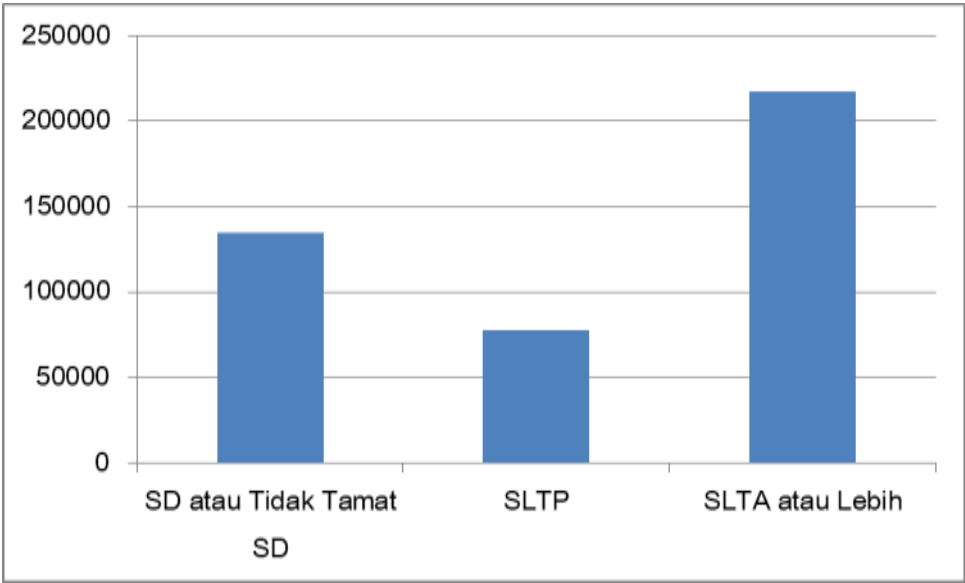
No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
	Industri Besar					
1).	Unit Kerja (unit)	93	105	112	125	129
2).	Tenaga Kerja (orang)	60.927	62.329	64.357	68.017	69.011
3).	Nilai Produksi (Rp. Juta)	4.498.375,56	4.682.359,12	4.814.794,05	5.258.055,25	5.646.305,25

Sumber: Disdagkop UKM Kab. Sukoharjo

2.10 Aspek Daya Saing Daerah

Sumber daya manusia yang termasuk dalam usia produktif (15-64 tahun) yang bekerja di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016 berjumlah 429.197 penduduk. Dari angka tersebut, 134.422 jiwa merupakan tamatan SD, 77.898 jiwa merupakan tamatan SMP, dan 216.877 jiwa merupakan tamatan SMA atau lebih. Jumlah Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Berdasarkan Tingkatan Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 disajikan pada gambar 2.11 sebagai berikut.

Gambar 2.11
Jumlah Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Berdasarkan
Tingkatan Pendidikan
di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016



Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Sukoharjo, 2017

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RKPD KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2018

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 2.62

Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terwujudnya Pendidikan Anak Usia Dini	Tahun	1	0,5
2	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Tahun	1	0,5
3	Program Pengembangan Nilai Budaya	Terwujudnya Pengembangan Nilai Budaya	Tahun	1	0,5
4	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terwujudnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Tahun	1	0,5
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Tahun	1	0,5
6	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terwujudnya Pengelolaan Kekayaan Budaya	Tahun	1	0,5
7	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Terwujudnya Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tahun	1	0,5
8	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Tahun	1	0,5
9	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terwujudnya Pengelolaan Keragaman Budaya	Tahun	1	0,5
10	Program Pengembangan Kemitraan	Terwujudnya Pengembangan Kemitraan	Tahun	1	0,5

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
11	Program Pendidikan Non Formal	Terwujudnya Pendidikan Non Formal	Tahun	1	0,5
12	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Terwujudnya Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Tahun	1	0,5
13	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terwujudnya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tahun	1	0,5
14	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terwujudnya Manajemen Pelayanan Pendidikan	Tahun	1	0,5
15	Program Pendidikan Kesiswaan	Terwujudnya Pendidikan Kesiswaan	Tahun	1	0,5
16	Program Pendidikan Menengah Pertama	Terwujudnya Pendidikan Menengah Pertama	Tahun	1	0,5

2. Dinas Kesehatan

Tabel 2.63
Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian S/D Triwulan II
1	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Prosentase Ketersediaaan Obat Dan Vaksin Puskesmas	%	100	25
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan	%	100	25
3	Program Pengawasan Obat Dan Makanan	Produk Pangan Dan Pelayanan Kefarmasian Di Fasyankes Sesuai Standar Serta Prosentase	%	100	25

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian S/D Triwulan II
		Pemeriksaan Sampel Mamin, Air Bersih, Air Minum Dan Kesehatan Klinis (%)			
4	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Produk Simplisia Obat Tradisional Yang Dihasilkan Memenuhi Standar Kompendia (Produk)	Produk	3	1
5	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Perilaku Sehat (PHBS)	%	78	0
6	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prosentase Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK)	%	13	0
		Prosentase Ibu Hamil Yang Mendapat Tablet Tambah Darah	%	90	0
		Prosentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapat ASI Eksklusif	%	40	0
		Prosentase Bayi Baru Lahir Mendapat IMD	%	90	0
		Prosentase Remaja Putri Yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	20	0
7	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Tercapainya Pengembangan Lingkungan Sehat	%	90	0
		Prosentase Desa/ Kelurahan Yang Melaksanakan STBM	%	53	0
		Prosentase TTU Yang Memenuhi	%	0	0

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian S/D Triwulan II
		Syarat Kesehatan			
		Prosentase Penduduk Akses Air Minum	%	0	0
8	Program Pencegahan Dan Penanggulanga n Penyakit Menular	Menurunnya Morbilitas Penyakit Menular	%	10	0
9	Program Pengadaan, Peningkatan/ Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/ Pustu Dan Jaringannya	Prosentase Puskesmas/Pustu Dan Jaringannya Yang Memiliki Sarana Dan Prasarana Sesuai Standart	%	100	0
10	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terakreditasinya Puskesmas	%	100	
11	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Menurunkan Angka Kematian Balita (AKABA) /1000 KH	/1000 KH	11	0
12	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	80	0
13	Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Cakupan Pemberian Ijin P.IRT Sesuai Standar	Lokasi	168	0
14	Program Peningkatan Keselamatan Ibu	Prosentase Persalinan Di Fasilitas Pelayanan			

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian S/D Triwulan II
	Melahirkan Dan Anak	Kesehatan			
		Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal Minimal 4 Kali (K4)			
15	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Penerapan BLUD Puskesmas	%	100	0

3. Rumah Sakit Umum Daerah

Tabel 2.64
Capaian Kinerja RSUD Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian S/D Triwulan II
1	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RS. Jiwa/RS. Paru-paru	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit	%	100	56,31

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2.65
Capaian Kinerja DPUPR Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian S/D Triwulan II
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten	Tahun	1	0,5
		Terlaksananya pembangunan jalan 4 ruas	Tahun	1	0,5
		Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan	Tahun	1	0,5
		Terlaksananya pembangunan jalan	Tahun	1	0,5

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian S/D Triwulan II
2	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Terlaksananya Pembangunan Drainase/ gorong-gorong	Tahun	1	0,5
3	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tahun	1	0,5
		Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan jala kabupaten	Tahun	1	0,5
		Meningkatnya kelancaran arus lalu-lintas	Tahun	1	0,5
		Meningkatkan kelancaran berlalu lintas bagi masyarakat	Tahun	1	0,5
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Meningkatkan Kegiatan Kebinarmargaan	Bulan	12	6
5	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan pengairan	Tahun	1	0,5
		Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi	Tahun	1	0,5
		Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi	Tahun	1	0,5
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Tahun	1	0,5
		Tersedianya prasarana dan sarana air minum	Tahun	1	0,5
7	Program Pembangunan Infrastruktur	Pembangunan infrastruktur perdesaan	Tahun	1	0,5

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian S/D Triwulan II
	Pedesaan	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan program PPIP Kab. Sukoharjo dan kelancaran arus lalu lintas pedesaan (1 Tahun)	Tahun	1	0,5
		Terwujudnya kelancaran pelaksanaan program PPIP Kab. Sukoharjo dan kelancaran arus lalu-lintas pedesaan (1 Tahun)	Tahun	1	0,5
8	Program Perencanaan Tata Ruang	Perencanaan Tata Ruang	Tahun	1	0,5
		Terlaksananya penetapan kebijakan RDTRK	Tahun	1	0,5
		Terlaksananya penetapan kebijakan RDTRK	Tahun	1	0,5
		Terlaksananya penyusunan RDTRK	Tahun	1	0,5
		Terlaksananya penyusunan Rencana Tata Bangunan dan lingkungan	Tahun	1	0,5
		Terlaksananya Pelatihan Tata Ruang	Tahun	1	0,5
9	Program Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan tata ruang daerah	Tahun	1	0,5
		Terlaksananya Sosialisasi RTRW	Tahun	1	0,5
10	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengendalian pemanfaatan ruang	Tahun	1	0,5
		Meningkatkan Pengawasan Pemanfaatan	Tahun	1	0,5

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian S/D Triwulan II
		ruang			
11	Program Pengembangan Perumahan	Pengembangan Perumahan	Tahun	1	0,5
12	Program Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	Terlaksananya pembangunan Masjid Agung Sukoharjo	Masjid	1	1
13	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	Terlaksananya sosialisasi sistem pendaftaran tanah	Tahun	1	0,5
14	Program Penataan Pengusaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terjaminnya kepastian hukum kepemilikan tanah	Tahun	1	0,5
15	Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan	Terwujudnya fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Tahun	1	0,5
16	Program Pengadaan Lahan Pemerintah	Terwujudnya dokumen rencana tindakan pengadaan tanah dan permukiman	Tahun	1	0,5
17	Program Pengembangan dan Pembinaan Bidang Ketenagalistrikan	Pelayanan penerangan jalan umum	Tahun	1	0,5

5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.66

Capaian Kinerja DPKP Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
1	Program Pengembangan Perumahan	Tersedianya perumahan	Tahun	1	0,5
2	Program Lingkungan sehat perumahan	Peningkatan kesehatan lingkungan perumahan	Tahun	1	0,5
3	Program Pemberdayaan komunitas perumahan	Tersedianya perumahan bagi masyarakat	Tahun	1	0,5
4	Program Pengelolaan Ruang terbuka hijau (RTH)	Tersedianya RTH	Tahun	1	0,5
5	Program Pengelolaan Areal pemakaman	Meningkatnya pengelolaan areal pemakaman	Tahun	1	0,5

6. Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 2.67

Capaian Kinerja Kantor Kesbangpol Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
1	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100	
2	Program pengembangan wawasan pembangunan	Terwujudnya Peningkatan wawasan Kebangsaan	%	100	
3	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Kebhinekaan	%	100	14

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
		bangsa yang Berwawasan Kebangsaan			
4	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat	%	100	
5	Program pendidikan politik masyarakat	Terciptanya Koordinasi, Komunikasi Antar Elemen Masyarakat dan Meningkatnya Pendidikan Politik di Masyarakat	%	100	
6	Program peningkatan komunikasi dengan lingkungan masyarakat	Terjalinnnya Koordinasi dan Komunikasi Antar Elemen Masyarakat (	%	100	89
7	Program peningkatan hubungan antar lembaga	Terwujudnya Peningkatan Hubungan Antar Lembaga di Elemen Masyarakat	%	100	
8	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilu	Tersebar nya Informasi Pelaksanaan Pemilu dan Terwujudnya Kondusifitas Daerah	%	100	73

7. Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 2.68
Capaian Kinerja Satpol PP Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
7	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terpeliharanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kecamatan	12	
8	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terpeliharanya kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Kecamatan	12	
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Terprliharanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kecamatan	12	
10	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya kebakaran	Terwujudnya Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	unit	9	3
11	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Menurunnya Penyakit Masyarakat (Pekat)	Kecamatan	12	
12	Program Peningkatan Ketertiban Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kesadaran dan Ketaatan Masyarakat Terhadap Perda/ Perbub	Kecamatan	12	

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
13	Program peningkatan hubungan antar lembaga	Meningkatnya Hubungan Antar Lembaga	%	100	

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 2.69
Capaian Kinerja BPBD Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
1	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terwujudnya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Tahun	1	0,5
		Tercapainya Kelancaran Evakuasi Penduduk dari Ancaman/ Korban Bencana Alam			
		Terpenuhinya Kebutuhan Logistik dan Obat-obatan Bagi Penduduk Tempat Penampungan Sementara			
		Terwujudnya Peningkatan dan Pengetahuan dan Keterampilan Aparat dan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana di			

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
		Daerah Rawan Bencana			
		Tercapainya Pengurangan Tingkat Kerugian Akibat Dampak Bencana	Hari		
		Tercapainya Kelancaran Evakuasi Penduduk	Bulan		
		Terwujudnya Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat di Daerah Siaga Bencana	Orang		
		Terwujudnya Kelancaran Kegiatan Distribusi Logistik dan Peralatan	Bulan		
		Terwujudnya Data Hasil Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana	Bulan		
		Terwujudnya Dokumen Study Pendugaan Potensi Air Tanah dengan Metode Geolistik	Lokasi		
		Meningkatnya Kelancaran dan Kebersihan	Kali		

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
		Aliran Sungan			

9. Dinas Sosial

Tabel 2.70
Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya	Terlaksananya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial			
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah	Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan PMKS			
3	Program Pembinaan Anak Terlantar	Cakupan Anak Terlantar yang dibina			
4	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Penanganan dan Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma			
5	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo				
6	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Cakupan Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosia			
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan	Lembaga Sosial Mandiri			

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
	Kesejahteraan Sosial	dan Orsosdes			

10. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Tabel 2.71

Capaian Kinerja Dispernaker Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang diberangkatkan	KK	10	
2	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Meningkatnya penggunaan IPTEK untuk sistem prduksi	IKM	35	
3	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kmpetensi <spm>	Peserta	160	
4	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Usaha IKM	IKM	430	
5	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	Orang	3.000	
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertib administrasi barang, aset dan Kekayaan daerah di Organisasi Perangkat Daerah	%	100	
7	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi	Meningkatnya industri kecil menggunakan	IKM	120	

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
	Industri	teknologi industri			
8	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Angka Sengketa Perusahaan - Pekerja per tahun	kasus	20	
		Besaran pekerja/buruh menjadi peserta program jamsostek aktif	%	75	
9	Program Transmigrasi Regional	Penyuluhan Transmigrasi regional	peserta	300	300
10	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tersedianya dokumen perencanaan yang Acaountable	%	75	
11	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Keikutsertaan IKM dalam Pameran	kali	6	
12	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Ketersediaan Peraturan tentang perindustrian dan Ketenagakerjaan di Daerah	buah	1	

11. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

Tabel 2.72

Capaian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
1	Program penciptaan iklim usaha menengah yang kondusif	Menciptakan iklim UMKM yang kondusif	Tahun	1	
2	Program perlindungan konsumen dan pengamanan	Meningkatnya kualitas barang yang beredar	Kecamatan	12	12

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
	perdagangan	sesuai SNI			
3	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah	Berkembangnya wirausaha baru dan keunggulan kompetitif UMKM	Tahun	1	
4	Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah	Berkembangnya sistem pendukung bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Tahun	1	
5	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Meningkatnya nilai ekspor	%	1	
6	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terwujudnya pembinaan, penyuluhan dan penertiban pedagang	Bulan	12	
7	Program penataan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah	Peraturan	3	
8	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Terwujudnya kelancaran arus distribusi barang dan jasa	Kecamatan	12	
9	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Meningkatkan kualitas kelembagaan bagi koperasi	Tahun	1	
10	Program pembangunan	Terwujudnya pembangunan	Pasar	11	

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
	infrastruktur pedesaan	dan pemeliharaan pasar			

12. Dinas Pemuda dan Olah Raga

Tabel 2.73

Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
1	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiatan	1	1
		Jumlah dokumen data potensi kepemudaan	dokumen	1	1
2	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	kelompok	21	
3	Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Olah Raga	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	orang	50	
4	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah klub olahraga	Klub	202	
		Jumlah organisasi olahraga	Pengkab	33	
		Jumlah kegiatan olahraga	kegiatan	8	
		Jumlah cabang olahraga berprestasi	Cabor	22	
		Jumlah prestasi olahraga	Penghargaan	200	
		Jumlah sarana olahraga	Unit	589	

13. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Tabel 2.74

Capaian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
1	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Terwujudnya Perpustakaan Pembelajar sepanjang Hayat	%	100	
2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Pengelolaan dan penyelamatan arsip/dokumen secara sistematis	%		
3	Program pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana kearsipan	Terwujudnya pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana kearsipan	%	100	
4	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Tercapainya peningkatan kualitas layanan informasi arsip	%	100	

14. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tabel 2.75

Capaian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
1	Program Penelitian dan Pengembangan	Terwujudnya Pembangunan yang didasarkan pada pengembangan IPTEK	%	100	
2	Program Pengembangan Data/Informasi	Tingkat Ketersediaan data dalam penyusunan perencanaan	%	95	

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
3	Kerjasama Pembangunan	Kerjasama Pembangunan antar Daerah	%	100	
4	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Peningkatan dan Pengembangan Prasarana Permukiman	%	100	
5	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Tingkat Pemahaman Aparatur Perencana	%	100	
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan dokumen RKPD, RPJMD dan RPJPD serta LKPJ	%	100	
7	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi	%	100	
8	Program Perencanaan Sosial Budaya	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya	%	100	
9	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	%	100	
10	Program Pengembangan Sumber Daya Iptek	Terciptanya Produktifitas dan Inovasi Masyarakat	%	100	
11	Program Perencanaan Tata	Tingkat ketersediaan dokumen tata	%	100	

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
	Ruang	ruang			

15. Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 2.76

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah di Kabupaten Sukoharjo	%	25	21,1
		Jumlah bank sampah yang terbentuk di masyarakat	Bank sampah	4	2
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup	Persentase usaha dan / atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	100	
		Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	90
		Cakupan pelaksanaan penilaian dokumen AMDAL	%	100	50

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
		Persentase rekomendasi izin pembuatan TPS B3 yang diterbitkan	%	100	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	49,25	
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Potensi penambahan air tanah dari air hujan	M3	94,2	94,2
		Luas kerusakan tanah dan / atau lahan untuk produksi biomassa yang diinformasikan ke publik	Hektar	4.708	4.708
4	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data dan informasi untuk status lingkungan hidup daerah	%	85	29
5	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	%	100	6
6	Program Pengelolaan	Luasan RTH yang dikelola	M2	4000	0

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
	Ruang Terbuka Hijau	perangkat daerah			

16. Dinas Pangan

Tabel 2.77
Capaian Kinerja Dinas Pangan Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	92,4	0
		Persentase Ketersediaan pangan utama yang terjangkau	%	193	258
		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	85.86	96
		Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	%	86	
2	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Persentase peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	%	3.3	0

17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 2.78
Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan	%	100	
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Meningkatnya kinerja lembaga ekonomi pedesaan	%	100	
3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di pedesaan	%	100	
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan	%	100	
5	Program Penanganan Penduduk Miskin	Terlaksananya program-program penanganan kemiskinan	%	100	

18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 2.79

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Tercapainya Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investas	%	100	

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Tercapainya Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	%	100	
3	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Tercapainya Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	%	100	
4	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Tercapainya Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	%	100	
5	Program Pelayanan Perijinan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Perijinan	%	100	

19. Dinas Perhubungan

Tabel 2.80
Capaian Kinerja Dinas Perhubungan
Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terlaksananya kelancaran arus lalu lintas	%	75	
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Terpeliharanya prasarana fasilitas lalu lintas	%	75	
3	Program Peningkatan	Terwujudnya	%	75	

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
	Pelayanan Angkutan	peningkatan pelayanan angkutan			
4	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Meningkatkan tertib Lalu Lintas	%	75	
5	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	%	80	

20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.81
Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya sarana dan prasarana infrastruktur program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Tahun	1	

21. Dinas Pertanian dan Perikanan

Tabel 2.82
Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan

Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Terwujudnya peningkatan pengetahuan, sikap dan ketrampilan aparat serta kemampuan lembaga tan	%	100	
2	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	Tercapainya peningkatan penjualan hasil produksi pertanian	%	100	
3	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Produksi Padi	Ton GKG	350.817	
4	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya pelaksanaan APBD yang didukung oleh tertibnya pengelolaan administrasi keuangan	%	100	
5	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Tercapainya peningkatan penjualan hasil produksi pertanian	%	100	
6	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Per kebun	Produksi tebu	ton	4.415	
7	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Per	Terwujudnya peningkatan pengetahuan, sikap dan	%	100	

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
	kebunan Lapangan	ketrampilan aparat			
8	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi budidaya ikan	ton	11.269	
9	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Terwujudnya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	%	100	
10	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Terwujudnya peningkatan produksi peternakan, pembibitan dan pemeliharaan ternak	%	100	
11	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Terwujudnya peningkatan produksi peternakan, pembibitan dan pemeliharaan ternak	%	100	
12	Program pengembangan data/informasi	Kualitas Layanan Data /Informasi	Bulan	12	
13	Program penataan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Administrasi Peraturan Perundang-Undangan	Bulan	6	

22. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.83
Capaian Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualtas Anak dan Perempuan	Profil data berbasis gender dan anak	%	100	25
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	Terwujudnya peningkatan peran dan aparat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan berspektif gender	Bulan	12	3
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	%	100	
4	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Terwujudnya peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	%	100	
5	Program Keluarga Berencana	Terwujudnya Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana	%	100	
6	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Tersosialisasi ya kesehatan reproduksi remaja	%	100	

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
7	Program Pelayanan Kontrasepsi	Terwujudnya peningkatan pelayanan program KB dan KR	%	100	
8	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Terwujudnya pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	%	100	
9	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Terwujudnya peningkatan kesehatan ibu, bayi dan anak	%	100	
10	Program Pengembangan Pusat Pelayanan dan Informasi dan Konseling KRR	Terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja	%	100	
11	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Terwujudnya pertumbuhan anak usia dini dengan baik dan berkualitas	%	100	
12	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Terwujudnya peningkatan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	%	100	
13	Program Pengembangan Model Operasional BKB-	Terselenggara nya integrasi operasional dan pelayanan program BKB-	%	100	

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
	POSYANDU-PADU	Posyandu-Padu			
14	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah	Terlaksananya pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	%	100	

23. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2.84
Capaian Kinerja
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya persyaratan menjadi PNS	Orang	2	
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terwujudnya pelayanan data PNS Kabupaten Sukoharjo yang terintegrasi	Tahun	1	
3	Program pendidikan kedinasan	Meningkatnya kemampuan aparatur sesuai jabatannya	Tahun	1	

24. Badan Keuangan Daerah

Tabel 2.85
Capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah
Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
6	Program Penataan Pengusaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terlaksananya penataan dan pensertifikata n tanah milik pemkab	%	75	
7	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Jumlah dokumen untuk dislamatkan	Dokumen	6500	
8	Program Peningkatan Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah WTP	Tahun	1	
9	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rehabilitasi lapangan olah raga	%	100	
11	Program Pendidikan Kedinasan	Peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	Orang	125	

25. Inspektorat

Tabel 2.86
Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
7	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (WTP)	WTP	1	0
		Persentase cakupan PD yang menjadi obyek pemeriksaan dalam kegiatan pengawasan	%	20	0
		Maturitas SPIP pemerintah kabupaten Sukoharjo	Level	2	0
		Terkendalnya kebijakan KDH bidang pengawasan	%	100	
8	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase APIP yang memiliki kompetensi	%	100	
9	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Prosentase kebijakan pengawasan berjalan baik	%	100	
		Persentase kebijakan pengawan berjalan baik	%	100	100

26. Sekretariat DPRD

Tabel 2.87
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terwujudnya peningkatan kapasitas lembaga DPRD	%	100	36

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
2	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Meningkatnya kerja sama informasi dengan mas media	%	100	5

27. Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.88

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
1	Program Persandian	Tercapainya fungsi persandian dan keamanan informas	Tahun	1	
2	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	berkembangnya sarana komunikasi, informasi dan media masa	Tahun	1	
3	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	dokumen kinerja pelaksanaan pembangunan	%	100	
4	Program Fasilitas Peningkatan Sdm Bidang Komunikasi dan Informasi	tersedianya fasilitas peningkatan sdm	Tahun	1	
5	Program Kerjasama Dengan Mas Media	terjalinnya kerjasama informasi dengan mass media, hiburan rakyat, jumpa monitor	Tahun	1	
6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan	Tahun	1	

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
	Informasi	teknologi informasi			

28. Sekretariat Daerah

Tabel 2.89
Capaian Kinerja
Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
1	Program pengembangan lingkungan sehat	Prosentase Desa /Kelurahan yang melaksanakan STBM	%	50	
2	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka kesakitan DBD	kasus/100.000 orang	249	
		Prosentase desa/kelurahan yang melaksanakan pos pelayanan terpadu (posbindu) PSM,Pemeriksaan Hipertensi dan DM	%	30	
3	Program peningkatan hubungan antar lembaga	Terwujudnya Pemilu dengan Lancar dan terjaganya Kondusifitas Daerah	%	100	100
4	Program peningkatan pelayanan	Pelayanan pemberangkatan ibadah haji	%	100	

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
	sosial keagamaan	kabupaten Sukoharjo			
		Kegiatan pembinaan keagamaan bagi PNS dan Umum	%	100	
5	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan)	Tercapainya monitoring, evaluasi dan pelaporan subsidi pupuk	Kecamatan	12	
6	Program peningkatan keberdayaan masyarakat	Bimbingan Teknis Bagi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa	%	100	
7	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Terwujudnya Kemitraan Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Tahun	1	
8	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	%	100	
9	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa	Berkembangnya Sarana Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tahun	1	
10	Program kerjasama informasi	Meningkatnya Kerjasama Informasi	Tahun	1	

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
	dengan mas media	Dengan Mass Media			
11	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tahun	1	
12	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Tercapainya Pelaksanaan Sosialisasi dan Koordinasi Bidang LKM	Tahun	1	
13	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Jumlah cabang olahraga berprestasi	%	0,6	
		Jumlah prestasi olahraga	Penghargaan	10	
14	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Terwujudnya Data/Informasi Statistik Daerah	Tahun	1	
15	Program pengelolaan keragaman budaya	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	Keg.	3	
		Jumlah group kesenian	Kelompok	95	
16	Program peningkatan kesejahteraan petani	Tercapainya Peningkatan Kelembagaan P3A Gabungan	%	100	
17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Terwujudnya Sosialisasi Pengembangan Industri Mikro Kecil	Tahun	1	

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
		dan Menengah			
18	Program peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi Pembuatan Raperda, Pameran dan Pasar Murah	Tahun	1	
19	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Prosentase Pemenuhan Sarana Pendukung Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	%	100	
20	Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Terwujudnya Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik	Tahun	1	
21	Program penataan peraturan perundang-undangan	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati menindaklanjuti peraturan yang berlaku	Tahun	1	
22	Program penataan daerah otonomi baru	Terevaluasinya Kelembagaan Perangkat Daerah sesuai Organisasi Perangkat Daerah yang telah di revisi	Tahun	1	
23	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan				

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
	pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh				
24	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan	WTP		
25	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Terselenggaranya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Tahun	1	
26	Program pengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat	Terwujudnya intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	%	100	
27	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Tahun	1	
28	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu	%	100	
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP		

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
		Daerah			
29	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Terselenggara nya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Tahun	1	

29. Kecamatan Sukoharjo

Tabel 2.90
Capaian Kinerja Kecamatan Sukoharjo Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Prosentase Pembangunan Jalan dan Jembatan	%	100	37
7	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Tingkat Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%	100	
8	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase Penyelesaian Pelanggaran K3	%	100	57
9	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Tingkat Keberdayaan Masyarakat	%	100	22
10	Program Pembangunan Saluran Drainase/Goro	Prosentase Pembangunan Saluran Drainase/Goro	%	100	30

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
	ng/gorong	ng-gorong			
11	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Tingkat Peran Serta Kepemudaan	%	100	
12	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Prosentase Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	%	100	41
13	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Prosentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	%	100	
14	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kualitas Laporan Keuangan Kelurahan	%	100	50
15	Program Peningkatan Peran serta Jender Dalam Pembangunan	Prosentase Keterwakilan Perempuan Dalam Proses Pembangunan	%	100	58
16	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	%	100	25
17	Program Pembinaan dan Masyarakat an Olah Raga	Prosentase Pembinaan dan Masyarakat an Olah Raga	%	100	

30. Kecamatan Weru

Tabel 2.91
Capaian Kinerja Kecamatan Weru Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	bulan	12	6
2	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Terpeliharanya arsip dan dokumen kantor	bulan	12	6
3	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Tercapainya kesiapan Paskibraka	bulan	12	6
4	Program Peingkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Tercapainya pembinaan organisasi perempuan	bulan	12	6
5	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Terwujudnya administrasi keuangan Desa yang tertib	bulan	12	6

31. Kecamatan Bulu

Tabel 2.92
Capaian Kinerja Kecamatan Bulu Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kecamatan	%	100	50
2	Program pemeliharaan rutin/berkala	Jumlah arsip yang terpelihara	berkas	500	330

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
	sarana dan prasarana kearsipan				
3	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pelayanan operasional kegiatan hari Kemerdekaan	%	100	
4	Program Peingkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Prosentase keterwakilan perempuan dalam proses pembangunan	%	100	50
5	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Kualitas Laporan Keuangan Desa	%	100	50

32. Kecamatan Tawangsari

Tabel 2.93
Capaian Kinerja Kecamatan Tawangsari Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	100	50
2	Program Kemitraan Pengembagan Wawasan Kebangsaan	terwujudnya Kemitraan Pengembagan Wawasan Kebangsaan	%	100	50
3	Program peningkata n peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangun	Terwujudnya Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	%	100	50

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
	an				
4	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	%	100	50

33. Kecamatan Nguter

Tabel 2.94
Capaian kinerja Kecamatan Nguter Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya penyelesaian pelanggaran keamanan	%	95	
2	Program Kemitraan Pengembagan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya pelayanan operasional hari kemerdekaan	%	100	
3	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Meningkatnya peran serta perempuan dalam proses pembangunan	%	100	
4	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatnya kualitas laporan keuangan desa	%	100	

Tabel 2.95

Capaian Kinerja Kecamatan Bendosari Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pembinaan masalah ketertiban di masyarakat	%	100	
2	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat	%	100	
3	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Pemeliharaan saluran/Gorong-gorong	%	100	99, 2
4	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	%	100	
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tahun	1	
6	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terwujudnya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	100	
7	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Terwujudnya Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	%	100	

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
8	Program Rehabilitasi/P emeliharaan jalan dan Jembatan	Terpeliharanya jalan dan jembatan	%	100	98,17
9	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa	%	100	
10	Program Rehabilitasi/p emeliharaan Talud/Bronjong	Pemeliharaan dan rehabilitasi talud	Paket	100	

35. Kecamatan Polokarto

Tabel 2.96

Capaian Kinerja Kecamatan Polokarto Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
1	Program peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,Ket entraman,Kein dahan) di Kecamatan	%	100	
2	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pelayanan Operasional Kegiatan Hari Merdeka	%	100	
3	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Prosentase Keterwakilan Perempuan Dalam Proses Pembangunan	%	100	
4	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan	Kwalitas Laporan Keuangan	%	100	

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
	keuangan desa	Desa			
5	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perdesaan	Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Pedesaan	%	100	
6	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Prosentase Pemeliharaan Rutin Sarana Pengolahan, Penyimpanan Arsip	%	100	

36. Kecamatan Mojolaban

Tabel 2.97
Capaian Kinerja Kecamatan Mojolaban Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
1	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Terwujudnya administrasi keuangan dan pelaporan desa yang handal	%	100	
2	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	%	100	48
3	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan	%	100	50
4	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terwujudnya fasilitasi penanaman ideologi cinta tanah air bagi generasi muda	%	100	

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
5	Program Peingkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Terwujudnya peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	%	100	58,18

37. Kecamatan Grogol

Tabel 2.98

Capaian Kinerja Kecamatan Grogol Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
1	Program peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Presentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kecamatan	%	100	
2	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Kearsipan	%	100	
3	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pelayanan Operasional Kegiatan Hari Kemerdekaan	%	100	
4	Program Peingkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Presentase Keterwakilan Perempuan Dalam Proses Pembangunan	%	100	
5	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Kualitas Laporan Keuangan Desa	%	100	

38. Kecamatan Baki

Tabel 2.99
Capaian Kinerja Kecamatan Baki Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
1	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten	Bulan	12	6
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana Prasarana Kearsipan	Bulan	12	6
3	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pelayanan Operasional Kegiatan Hari Kemerdekaan	Tahun	1	
4	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	Keterwakilan Perempuan dalam Proses Pembangunan	Bulan	12	6
5	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kualitas Laporan Keuangan Desa	Desa	14	7
6	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Terlaksannanya Koordinasi Rutin	Tahun	1	

39. Kecamatan Gatak

Tabel 2.100

Capaian Kinerja Kecamatan Gatak Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
1	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Kualitas Laporan Keuangan Desa	%	100	100
2	Program peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,Ket entraman, Keindahan) di Kecamatan	%	100	
3	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pelayanan Operasional Kegiatan Hari Kemerdekaan	%	100	
4	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Prosentase Keterwakilan Perempuan dalam Proses Pembangunan	%	100	
	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN	Jumlah Arsip yang terpelihara	%	100	

40. Kecamatan Kartasura

Tabel 2.101

Capaian Kinerja Kecamatan Kartasura Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
1	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan	Kualitas Laporan Keuangan Desa	%	100	50

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Capaian s/d Triwulan II
	keuangan desa				
2	Program peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten	%	100	50
3	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pelayanan Operasional kegiatan hari kemerdekaan	%	100	100
4	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Prosentase Keterwakilan Perempuan Dalam Proses Pembangunan	%	100	50
5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Yang Terbina	%	100	50
6	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Terbina	%	100	25
7	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Prosentase jumlah Arsip yang Terpelihara	%	100	50

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan. Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun terakhir, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan

tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

1. Ketimpangan Pendapatan Masyarakat dan Antar Wilayah

Indeks Gini merupakan indikator untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Kabupaten Sukoharjo selama Tahun 2008 – 2013 cenderung memburuk yaitu sebesar 0,24 pada Tahun 2008, menjadi 0,34 pada Tahun 2013. Indeks tersebut menunjukkan pergeseran kelompok ketimpangan pendapatan masyarakat dari kelompok ketimpangan rendah menjadi ketimpangan sedang.

Ditinjau dari sudut pandang produktivitas ekonomi riil, hanya terdapat tiga kecamatan yang memiliki produktivitas ekonomi sangat tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Ketiga kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo, dan Kecamatan Kartasura. Lebih dari setengah (50%) PDRB Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2010 – 2015 dihasilkan oleh kegiatan ekonomi yang berpusat di tiga kecamatan tersebut.

Statistik ini relatif tidak berubah sepanjang tahun tersebut yang menandakan bahwa perekonomian Kabupaten Sukoharjo relatif terkonsentrasi di ketiga kecamatan tersebut. Kecamatan Grogol dan Kecamatan Kartasura sebagai kecamatan yang diindikasikan perekonomian Kabupaten Sukoharjo relatif terkonsentrasi di daerah tersebut mempunyai letak administratif yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan Kota Surakarta di bagian Barat dan Selatan mendorong kegiatan perekonomian di daerah perbatasan Kabupaten Sukoharjo secara signifikan. Hal ini menunjukkan fenomena urbanisasi dalam pengertian telah terjadi pergeseran karakteristik daerah perdesaan menjadi perkotaan, khususnya di Kecamatan Grogol dan Kecamatan Kartasura.

Dari hasil analisis klasifikasi Tipologi Klasen yang perlu mendapat perhatian adalah kecamatan-kecamatan yang masuk dalam kategori daerah berkembang dan daerah tertinggal. Ada pola distribusi ruang yang sangat jelas tergambar dari hasil analisis ini. Kecamatan yang dikategorikan sebagai daerah berkembang berada secara berdampingan dengan kecamatan-kecamatan yang masuk kategori daerah maju.

Sedangkan kecamatan-kecamatan yang masuk dalam kategori daerah tertinggal berada jauh atau tidak berdampingan langsung dengan daerah maju. Hal ini menunjukkan terjadinya konsentrasi kegiatan perekonomian yang berada di sekitar daerah maju saja sebagaimana teori pusat pertumbuhan. Namun demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi ketimpangan performa perekonomian yang lebih berkonsentrasi di bagian Utara dibandingkan bagian Selatan Kabupaten Sukoharjo.

2. Kemiskinan

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, kemiskinan perkotaan masih menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan. Secara kuantitas jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terus mengalami penurunan, namun belum sepenuhnya terselesaikan. Satu hal yang perlu dicermati terkait angka kemiskinan adalah potensi meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori rawan miskin yang sangat rentan terkena dampak perubahan kebijakan ekonomi.

Selain menimbulkan masalah ekonomi, kemiskinan kota juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Berbagai gangguan dan masalah sosial seringkali disebabkan karena tekanan kemiskinan sebagai faktor pemicu. Apabila tidak ditangani dengan serius dan sistematis kondisi ini dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Penanganan masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan pada pemerintah saja, akan tetapi dibutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terutama pemuka masyarakat, tokoh agama dan para pembina masyarakat di tingkat lokal.

3. Ketenagakerjaan

Permasalahan dalam ketenagakerjaan antara lain terkait dengan kesejahteraan di Kabupaten Sukoharjo Tingkat Upah Minimum belum sepenuhnya memenuhi standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL), belum optimalnya jaminan sosial tenaga kerja utamanya pada akses layanan kesehatan dan kepemilikan rumah layak huni; dan belum optimalnya perlindungan tenaga kerja. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka akibat rendahnya tingkat pendidikan/ketrampilan/keahlian calon tenaga kerja menjadikan sebuah tantangan untuk mengupayakan bagaimana angka pengangguran tersebut dapat diturunkan. Salah satunya adalah dengan cara memperluas kesempatan kerja dan berusaha. Penyediaan

tenaga terampil menjadi isu yang perlu ditangani sesuai tuntutan kebutuhan global, sehingga dapat meningkatkan nilai jual tenaga kerja. Dengan demikian diharapkan Kabupaten Sukoharjo dapat menyediakan tenaga kerja terampil yang siap bersaing di bursa tenaga kerja regional, nasional, dan internasional. Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja perlu dilakukan sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Sukoharjo.

Pengangguran dapat diartikan sebagai tidak terserapnya sebagian angkatan kerja ke dalam kesempatan kerja yang diciptakan oleh pencapaian tingkat pertumbuhan. Tingkat pengangguran selama periode lima tahun yang lalu mengalami fluktuasi yang cenderung sedikit penurunannya yakni pada tahun 2015 tingkat pengangguran 4,4% dari total angkatan kerja. Masih terjadi kesenjangan yang cukup tajam dalam tingkat pengangguran terbuka antar Kecamatan yakni 6 Kecamatan yang mempunyai tingkat pengangguran terbuka diatas angka rata-rata Kabupaten maupun Provinsi. Kondisi ini akan berdampak kurang baik bagi pembangunan daerah, maka dari itu sasaran pengangguran terbuka selama periode 5 (lima) tahun ke depan yaitu dari tahun 2016-2021 harus mampu ditekan. Sementara itu, peningkatan angkatan kerja juga dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal ini timbul akibat tidak berjalannya program keluarga berencana dengan baik sebagai alat kontrol laju pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya memberikan beban kepada penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

4. Pendidikan

Permasalahan dalam pembangunan pendidikan adalah belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Terkait dengan aspek ketersediaan. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator antara lain APM SD/MI/SDLB 98,20 APM SMP/MTs/SMPLB mencapai 76,55.

Pencapaian indeks pendidikan merupakan gabungan dari Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pembangunan bidang pendidikan perlu diprioritaskan pada upaya akselerasi penuntasan program Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun melalui pendidikan formal maupun nonformal, serta rintisan Wajib Belajar 12 tahun. Tantangan yang dihadapi di bidang pendidikan adalah bagaimana meningkatkan APM/APK SMA untuk memperkecil kesenjangan yang terjadi antara APM/APK SMP

dan SMA. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan menumbuhkan kesadaran diri untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan memberikan kesempatan yang luas untuk dapat mengakses pelayanan pendidikan menengah disertai dengan sistem pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Sebagaimana menjadi program pendidikan nasional, pengembangan pendidikan kejuruan perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini terkait dengan kebutuhan tenaga kerja terampil untuk menyongsong era pasar bebas.

Aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, menjadi perhatian dalam meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan, termasuk penyerapan lulusannya di dunia kerja. Seiring dengan hal tersebut perlu upaya mengedepankan sekolah kejuruan dengan fokus pembelajaran pada pendidikan vokasional (*life skill*) yang mengutamakan kompetensi daerah.

5. Kesehatan

Pembangunan kesehatan secara umum telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun demikian masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu penyelesaian dan mendapat perhatian semua pemangku kepentingan antara lain: belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan, masih adanya angka kematian ibu dan anak, keterbatasan jumlah dan mutu tenaga kesehatan, serta penyebarannya yang kurang merata, pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas juga masih perlu ditingkatkan kualitasnya, masih tingginya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan.

Penyelenggaraan kesehatan dikembangkan dengan mendorong promosi kesehatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan perorangan, optimalisasi sistem jaminan pelayanan kesehatan bagi warga Kabupaten Sukoharjo khususnya keluarga miskin, penerapan ISO pada fasilitas kesehatan, penyempurnaan sistem rujukan, optimalisasi kegawat daruratan, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesehatan.

6. Pertumbuhan dan Pergerakan Penduduk

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukoharjo mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,518%. Pertumbuhan penduduk paling tinggi terjadi di Kecamatan Kartasura (0,846%) dan paling rendah di

Kecamatan Bulu (0.027%). Apabila dilihat dari perkembangan penduduk, Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Grogol mempunyai pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang relatif tinggi dibandingkan dengan perkembangan penduduk di desa lainnya. Dalam rentang waktu tahun 2010-2015 pertumbuhan penduduk kedua kecamatan tersebut relatif tinggi, masing-masing sebesar 0,846% dan 0,834%.

Jumlah penduduk yang bertambah secara signifikan terlihat pada jumlah penduduk Kecamatan Grogol pada tahun 2009-2014 dengan jumlah penduduk 102.307 jiwa menjadi 107.555 jiwa. Angka pertumbuhan ini sangat besar dibandingkan dengan kecamatan lain. Pertambahan penduduk tersebut menunjukkan adanya daya tarik lokasi yang mampu mendorong penduduk di sekitar wilayah tersebut masuk, dengan Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Grogol yang merupakan pusat pelayanan dan dilewati jalur utama transportasi darat, serta pusat kegiatan-kegiatan sosial ekonomi lainnya seperti: pendidikan, perdagangan, jasa, kesehatan dan kegiatan lainnya. Dengan memperhatikan hal tersebut serta kecenderungan pertumbuhan jumlah penduduk, maka diprediksikan Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Grogol akan terus mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang paling tinggi dibandingkan kecamatan yang lain di tahun-tahun mendatang.

Pusat perdagangan yang meliputi pertokoan, pasar swalayan, pasar tradisional dan kegiatan jasa terkonsentrasi di pusat kota yaitu di Ibukota Kabupaten Sukoharjo maupun di Kecamatan Kartasura. Hampir semua fasilitas perdagangan terdapat wilayah-wilayah tersebut, sehingga mengakibatkan pergerakan penduduk ke arah pusat-pusat perdagangan dan fasilitas pelayanan yang lain. Permasalahan yang timbul dari pemusatan fasilitas perdagangan dan jasa adalah terjadi pembebanan terhadap beberapa kapasitas jalan arteri dan kolektor di wilayah Kecamatan Kartasura yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Grogol yang dilewati jalan utama Kota Surakarta dengan Kabupaten Wonogiri. Hal ini juga berdampak pada kecenderungan perkembangan wilayah di Kabupaten Sukoharjo mengikuti pola jalan atau linear. Dengan demikian perlu dikembangkan alternatif fasilitas perdagangan di luar jalan utama (arteri dan kolektor) yang ada.

7. Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pemenuhan kebutuhan rumah masih dihadapkan pada masalah penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Sementara kebutuhan rumah terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan keluarga baru. Perhitungan kekurangan kebutuhan rumah (*backlog*) mencapai 36.766 rumah dalam kurun waktu empat tahun terakhir atau sekitar 3.000 rumah setiap tahunnya.

Permasalahan lainnya terkait kondisi dan kualitas lingkungan adalah permukiman yang kurang sehat dan tertata. Meskipun luas permukiman kumuh cenderung menurun dan menjadi 21,524 hektar pada tahun 2015, namun peningkatan kualitas lingkungan permukiman perlu terus dilakukan untuk mencegah terjadinya permukiman kumuh baru. Selain itu masih banyak kawasan permukiman kumuh liar yang menempati lahan publik misalnya sepanjang bantaran sungai, rel kereta api, waduk dan lahan kosong.

8. Pengelolaan Air Bersih

Pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas kota maka kebutuhan air bersih juga terus meningkat. Permasalahan pokok dalam pemenuhan air bersih, meliputi: i) masih terbatasnya cakupan pelayanan air bersih; ii) terbatasnya sumber air bersih selain yang berasal dari air tanah; iii) keterbatasan jaringan pelayanan air bersih.

Penyediaan air bersih yang berasal dari sumber air tanah perlu dikendalikan secara ketat dengan memperhatikan prinsip keseimbangan lingkungan. Pengambilan air tanah yang tidak terkendali menimbulkan dampak terhadap penurunan muka tanah (*land subsidence*). Penurunan muka tanah juga disebabkan oleh adanya beban bangunan (*settlement*), konsolidasi alamiah dari lapisan-lapisan tanah dan gaya-gaya tektonik.

Meskipun penyediaan air bersih sudah mencakup lebih dari 76 persen rumah tangga, namun secara kualitas penyediaan air bersih masih menggunakan sumber air tanah (sumur) dan cakupan pelayanan dari sistem perpipaan masih rendah. Ketersediaan air baku secara berkelanjutan sebagai sumber air bersih menjadi masalah utama yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air bersih perpipaan, karena selama ini sumber air baku masih mengandalkan pengolahan air sungai dan pasokan air baku dari Waduk Mulur.

9. Pencemaran Lingkungan

Permasalahan pencemaran lingkungan dapat berdampak pada keberlanjutan pembangunan kota sehingga perlu diselesaikan secara komprehensif. Terdapat 3 (tiga) kelompok permasalahan pencemaran lingkungan yaitu persampahan, pengelolaan air limbah dan penanganan polusi udara.

Pengelolaan persampahan dihadapkan pada masalah meningkatnya produksi sampah kota, sistem pengelolaan sampah yang belum terpadu, dan terbatasnya penyediaan tempat pemrosesan akhir. Peningkatan produksi sampah kota merupakan konsekuensi logis dari pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya meningkatkan konsumsi serta peningkatan aktivitas perkotaan. Pengelolaan sampah kota masih dilaksanakan dengan paradigma “membuang sampah” belum pada “mengolah sampah dari sumbernya”. Dengan kata lain masyarakat belum didorong sepenuhnya untuk melakukan pengelolaan sampah dengan sistem 3R (*reduce, reuse, recycle*).

Pengelolaan kualitas air permukaan masih dihadapkan pada terus meningkatnya pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah domestik rumah tangga dan sampah padat. Cakupan pelayanan sistem pengelolaan air limbah terpusat belum memadai dan melayani seluruh wilayah kota. Selain itu pengelolaan limbah setempat belum banyak digunakan terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang tidak terencana.

Pencemaran air tanah disebabkan terutama oleh penggunaan *septic tank* yang belum memenuhi standar lingkungan. Saat ini pada kawasan perumahan baru terencana penggunaan septic tank sebagai penampungan limbah domestik sudah banyak dilakukan, meski masih perlu disosialisasikan tentang penggunaan septic tank yang memenuhi standar lingkungan. Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) belum banyak diterapkan pada skala kota, tetapi masih terbatas pada lokasi industri logam berat dan pengolahan limbah rumah sakit.

Sedangkan sumber utama pencemaran udara berasal dari emisi kendaraan bermotor. Polusi udara berpengaruh pada penurunan kualitas kesehatan penduduk yang pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas daerah.

10. Iklim Investasi

Permasalahan iklim investasi yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo

diantaranya adalah kurang maksimalnya kebijakan pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, kewenangan pelayanan terpadu satu pintu pada saat ini hanya sebatas menerima berkas dokumen izin dan non izin selanjutnya akan diproses oleh PD terkait. Melihat tujuan dibentuknya pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk mengurangi prosedur dan mempercepat waktu proses perizinan, maka kondisi yang terjadi saat ini belum menunjukkan proses yang ideal.

Selanjutnya, selain permasalahan perizinan dan kepastian investasi dalam perbaikan iklim investasi, juga dipengaruhi oleh kondisi dan ketersediaan infrastruktur, kondisi ketentraman dan sistem ketenagakerjaan. Infrastruktur yang perlu mendapat perhatian adalah jalan, dan sistem transportasi yang masih belum mendukung secara maksimal bagi dunia usaha. Permasalahan lainnya adalah mensinergikan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan perbaikan iklim investasi.

11. Koperasi dan UMKM

Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional harus mampu berperan sebagai penopang utama sistem perekonomian daerah. Dengan demikian koperasi di Kabupaten Sukoharjo harus mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap produksi daerah, membuka lapangan kerja, memegang peran strategis dalam kegiatan perekonomian dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi daerah. Jumlah Koperasi di Sukoharjo yang sudah berbadan hukum sebanyak 825 unit, yang terdiri dari koperasi yang aktif sebanyak 680 unit dan yang tidak aktif sebanyak 145 unit. Pengembangan UMKM-Koperasi dihadapkan pada masalah internal maupun eksternal, untuk masalah internal yaitu; rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, belum terbangunnya sistem informasi yang handal dalam mendukung pemasaran produk UMKM-Koperasi, rendahnya kemampuan UMKM-Koperasi dalam memanfaatkan Teknologi Informasi.

Masalah eksternal antara lain yang dihadapi UMKM-Koperasi adalah belum optimalnya pemberdayaan kerjasama antara instansi pemerintah dan dunia usaha serta kemitraan usaha antara UMKM-Koperasi dengan BUMN/BUMD dan perusahaan besar, pola sinergi pemberdayaan UMKM-Koperasi yang belum optimal.

Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditumbuhkembangkan. Hal tersebut disebabkan kurangnya efektifitas fungsi dan peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan serta rentannya UMKM terhadap perubahan harga bahan bakar. Masih tingginya kredit konsumsi dibandingkan dengan kredit investasi juga menghambat kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga kurang menopang aktivitas sektor riil. Selain itu, dibutuhkan pengembangan UMKM dan koperasi yang mampu mengembangkan agroindustri dan bisnis pariwisata guna menunjang daya beli dan ketahanan pangan.

12. Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling hakiki bagi manusia. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi agar kelangsungan hidup masyarakat terjaga dengan baik. Permasalahan ketahanan pangan yang perlu mendapat perhatian antara lain: kontinuitas pemenuhan gizi masyarakat, aksesibilitas masyarakat atas pangan, pola konsumsi pangan, peningkatan mutu dan keamanan pangan, penguatan jalur distribusi pangan, dan kehandalan kelembagaan pangan dan gizi.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan perlu upaya untuk meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan terutama kelembagaan yang menangani masalah pangan dan gizi.

Upaya peningkatan ketersediaan pangan perlu dilakukan terutama dalam kaitannya dengan distribusi komoditas kebutuhan pokok. Selain itu, ketatnya persaingan pasar antara produk domestik dengan produk impor diduga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat di pasar. Permasalahan lainnya adalah mensinergikan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Sukoharjo yang berkelanjutan.

13. Reformasi Birokrasi

Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam melaksanakan percepatan reformasi birokrasi adalah belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mendukung perwujudan reformasi birokrasi. Penataan struktur kelembagaan dilakukan secara parsial karena masih menunggu regulasi yang mengatur organisasi perangkat daerah. Hal lain

yang perlu lebih ditingkatkan yaitu berkaitan dengan pengembangan etos dan budaya kerja.

Aspek-aspek lain yang belum dikembangkan secara baik adalah belum efektifnya manajemen SDM dalam peningkatan profesionalitas aparatur, transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur, masih terjadi inefisiensi pengelolaan keuangan daerah, masih lemahnya sistem pengawasan internal, serta pelayanan publik yang belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan dan dinamika masyarakat.

14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengarusutamaan gender masih belum optimal dan program-program berkaitan dengan pemenuhan hak anak masih belum berjalan dengan baik, serta kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender masih belum optimal. Keberpihakan terhadap peningkatan peran perempuan di seluruh sektor pembangunan perlu dilakukan. Keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan tercermin dari Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender. Indeks pemberdayaan gender meliputi keanggotaan perempuan dalam parlemen (10%), perempuan dalam angkatan kerja dan upah pekerja non pertanian, sedangkan indeks pembangunan gender meliputi Angka Harapan Hidup (AHH) laki-laki dan perempuan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) laki-laki dan perempuan, Angka Melek Huruf (AMH) laki-laki dan perempuan dan persentasi angkatan kerja. Upaya pengarusutamaan gender masih perlu ditingkatkan, antara lain melalui peningkatan pemahaman tentang pengarusutamaan gender kepada seluruh lapisan masyarakat, peningkatan komitmen pemerintah, serta peningkatan pengarusutamaan gender kepada seluruh program dan kegiatan.

Anak adalah amanah dan merupakan sumber daya pembangunan, juga potensi kekayaan dan kesejahteraan bangsa di masa depan, yang harus kita jaga, kita bina dan kita penuhi hak-haknya, sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang cerdas-ceria, inovatif dan kreatif, bermartabat dan berakhlak mulia. Keberhasilan program perlindungan anak terlihat dari terpenuhinya seluruh hak anak (31 hak anak). Empat hak dasar anak yang harus dapat terpenuhi adalah hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapat perlindungan dari segala perlakuan yang salah serta hak untuk berpartisipasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi

pengembangan diri, sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

15. Politik

Pembangunan politik merupakan bagian dari gerak pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis sehingga terwujud ketertiban politik. Permasalahan dalam pembangunan politik yaitu masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, serta masih belum optimalnya peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat terutama pemilih pemula.

Hal ini tercermin dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang baru mencapai 63,95% atau 428.429 pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 669.993 pemilih. Selain itu keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kepentingan publik dan penentuan arah pembangunan yang bersifat strategis dirasakan masih belum optimal.

16. Transportasi

Kondisi transportasi di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan permasalahan signifikan pada lokasi-lokasi tata guna lahan tertentu. Diantaranya adalah pada koridor Ruas Jalan Raya Solo-Wonogiri mengalami beberapa tundaan sampai dengan kemacetan lalu lintas yang disebabkan karena permasalahan-permasalahan bangkitan dan tarikan perjalanan, serta hambatan lalu lintas akibat perilaku pengguna kendaraan, parkir tepi jalan, serta aktivitas pasar tumpah, maupun penyeberangan orang.

Beberapa permasalahan gangguan lalu lintas banyak terjadi pada beberapa lokasi :

- Koridor Solo-Wonogiri menunjukkan kondisi angka maksimum adalah 1.946,60 smp/jam, sedangkan angka lalu lintas minimum sebesar 1.329,30 smp/jam.
- Koridor Solo Baru-Sukoharjo menunjukkan kondisi angka maksimum adalah 2821,40 smp/jam, sedangkan angka lalu lintas minimum sebesar 1.283,20 smp/jam.
- Koridor Surakarta-Solo Baru menunjukkan kondisi angka maksimum adalah 1.453,00 smp/jam, sedangkan angka lalu lintas minimum sebesar 775,30 smp/jam.
- Koridor Weru-Sukoharjo menunjukkan kondisi angka maksimum adalah 972,50 smp/jam, sedangkan angka lalu lintas minimum sebesar

578,60 smp/jam.

- Koridor Telukan-Cuplikan menunjukkan kondisi angka maksimum adalah 1.404,70 smp/jam, sedangkan angka lalu lintas minimum sebesar 561,60 smp/jam.
- Koridor Cuplik-Sukoharjo menunjukkan kondisi angka maksimum adalah 856,10 smp/jam, sedangkan angka lalu lintas minimum sebesar 508,10 smp/jam.
- Koridor Baki-Klaten menunjukkan kondisi angka maksimum adalah 1.882,70 smp/jam, sedangkan angka lalu lintas minimum sebesar 1.189,10 smp/jam.
- Koridor Solo-Jogja menunjukkan kondisi angka maksimum adalah 2.597,50 smp/jam, sedangkan angka lalu lintas minimum sebesar 2006,10 smp/jam.
- Koridor Gatak-Klaten menunjukkan kondisi angka maksimum adalah 2.597,50 smp/jam, sedangkan angka lalu lintas minimum sebesar 2006,10 smp/jam.

Upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah Pembangunan jalan lingkar yang diharapkan dapat menjamin perkembangan ekonomi, kelancaran lalu lintas barang, jasa dan manusia, serta menjadi tertib dan aman. Untuk mendukung ini perlu disusun mengenai “Prosedur Operasi Standar” pembangunan maupun operasi jalan lingkar.

17. Kerawanan Bencana

Berdasarkan analisis indeks risiko bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013, Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana (urutan ketigabelas dari tiga puluh lima kabupaten dan kota) (Bappenas, 2014). Jika dilihat dari data kebencanaan yang ada, Kabupaten Sukoharjo mempunyai beberapa ancaman bencana, antara lain banjir, misalnya Banjir di Kecamatan Grogol dan Kecamatan Mojolaban akhir April 2015); longsor misalnya di Kecamatan Nguter bulan Februari 2015; angin ribut misalnya di Kecamatan Baki, Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Bendosari bulan Februari 2015. Selain tiga ancaman bahaya utama tersebut, terdapat pula ancaman bahaya kekeringan, kebakaran hutan/lahan, serta gempa bumi.

BAB III
RANCANGAN KERANGKA
EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.1.1 Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan sumber keuangan daerah, yang terdiri dari : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA), dan Dana Alokasi Umum; 3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 17 Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 *“Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan”*.

1. Pendapatan Asli Daerah, naik sebesar 10,00% dari target APBD Tahun
2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, terdapat pengurangan anggaran, karena penilaian laporan keuangan 2016 dalam proses pemeriksaan oleh BPK (Dana DID).

Tabel. 3.1
Rincian Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018

NOMOR URUT	U R A I A N	SEBELUM P-APBD 2018	SETELAH P-APBD 2018	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1.	PENDAPATAN DAERAH	1,887,374,030,000	1,975,061,571,000	87,687,541,000	4.65
1. 1.	Pendapatan Asli Daerah	300,348,518,000	336,878,683,000	36,530,165,000	12.16
1. 1. 1	Hasil Pajak Daerah	132,150,000,000	166,650,000,000	34,500,000,000	26.11
1. 1. 2	Hasil Retribusi Daerah	20,535,117,000	20,069,283,000	(465,834,000)	(2.27)
1. 1. 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19,606,058,000	20,905,995,000	1,299,937,000	6.63
1. 1. 4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	128,057,343,000	129,253,405,000	1,196,062,000	0.93
1. 2	Dana Perimbangan	1,244,950,442,000	1,244,950,442,000	0	0.00
1. 2. 4	Dana Transfer Umum	941,984,410,000	941,984,410,000	0	0.00
1. 2. 5	Dana Transfer Khusus	302,966,032,000	302,966,032,000	0	0.00
1. 3	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	342,075,070,000	393,232,446,000	51,157,376,000	14.96
1. 3. 1	Hibah	72,163,200,000	72,163,200,000	0	0.00
1. 3. 3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi dan Pemerintah Lainnya	107,160,518,000	145,432,040,000	38,271,522,000	35.71

NOMOR URUT	U R A I A N	SEBELUM P-APBD 2018	SETELAH P-APBD 2018	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1. 3. 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	127,001,352,000	126,076,256,000	(925,096,000)	(0.73)
1. 3. 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	13,810,950,000	13,810,950,000	0.00
1. 3. 7	Dana Insentif Daerah (DID)	35,750,000,000	35,750,000,000	0	0.00
	Jumlah Pendapatan	1,887,374,030,000	1,975,061,571,000	87,687,541,000	

Sumber data: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018

3.1.2 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

1) Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai

- Kebutuhan anggaran belanja Gaji dan Tunjangan lainnya , khususnya bagi PNSD acres 1,5% dari tahun anggaran 2017 (Dana DAU)
- Pemberian Tambahan Penghasilan PNS sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2014 (Dana APBD Kabupaten)
- Pemberian Tambahan Penghasilan Guru dan Tunjangan Profesi guru (Dana APBN-Dana Penyesuaian)

b. **Belanja Hibah**, berpedoman pada Pasal 5 huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD bahwa Belanja Hibah dapat diberikan kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang **berbadan hukum Indonesia**.

c. Belanja Bantuan Sosial, diberikan kepada Individu/Keluarga/masyarakat dan Organisasi masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, antara lain : santuan kematian dan RTLH.

d. **Belanja Bantuan Keuangan**, antara lain :

- Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dana APBD,
- Bantuan Keuangan kepada Partai Politik,
- Bantuan keuangan kepada TMMD, dan
- Dana Desa yang bersumber dana APBN.

e. **Belanja Tidak terduga**, dianggarkan untuk mengantisipasi apabila terjadi bencana yang tidak diinginkan.

2) Belanja Langsung

- Kebutuhan operasional perkantoran (Pembayaran telephone, listrik, air, ATK, gaji Tenaga Honorer, dll.)
- Kebutuhan untuk kegiatan Pokok Perangkat Daerah.
- Kebutuhan pelayanan dasar masyarakat (Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur).
- Kegiatan yang bersumber dana, antara lain dari DAK, DBHCHT, WISMP.
- **Pelaksanaan program unggulan visi dan misi Bupati 2016-2021**, antara lain : Kegiatan pembangunan kantor/gedung (lanjutan pembangunan gedung setda, pembangunan gedung budi sasono, pembuatan lapangan tenis indoor di Gelora Merdeka, infrastruktur jalan dan jembatan).

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Belanja Daerah Tahun 2018

NOMOR URUT	U R A I A N	PENETAPAN APBD 2017	PROYEKSI APBD 2018	BERTAMBAH/ (BERKURANG) APBD 2017	%
2.	BELANJA DAERAH	2,083,547,482,000	1,903,732,927,000	(179,814,555,000)	(8.63)
2. 1	Belanja Tidak Langsung	1,310,994,867,000	1,209,580,312,000	(101,414,555,000)	(7.74)
2. 1. 1	Belanja Pegawai	949,980,155,000	912,165,600,000	(37,814,555,000)	(3.98)
2. 1. 2	Belanja Bunga	0	0	0	0.00
2. 1. 3	Belanja Subsidi	0	0	0	0.00
2. 1. 4	Belanja Hibah	21,117,096,000	20,117,096,000	(1,000,000,000)	(4.74)

NOMOR URUT	U R A I A N	PENETAPAN APBD 2017	PROYEKSI APBD 2018	BERTAMBAH/ (BERKURANG) APBD 2017	%
2. 1. 5	Belanja Bantuan Sosial	12,245,000,000	12,245,000,000	0	0.00
2. 1. 6	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa	12,443,015,000	12,443,015,000	0	0.00
2. 1. 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	252,644,528,000	240,044,528,000	(12,600,000,000)	(4.99)
2. 1. 8	Belanja Tidak Terduga	62,565,073,000	12,565,073,000	(50,000,000,000)	(79.92)
2. 2	Belanja Langsung	772,552,615,000	694,152,615,000	(78,400,000,000)	(10.15)
2. 2. 1	Belanja Pegawai	42,135,290,000	42,135,290,000	0	0.00
2. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa	374,718,033,000	374,718,033,000	0	0.00
2. 2. 3	Belanja Modal	355,699,292,000	277,299,292,000	(78,400,000,000)	(22.04)
	Surplus / (Defisit)	(151,621,309,000)	(64,675,000,000)	86,946,309,000	

Sumber: BKD Kab. Sukoharjo

3.1.3 Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp. 90.000.000.000,-, sedangkan pengeluaran pembiayaan tahun 2018 diproyeksikan Rp. 26.325.000.000,-

Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2016 diarahkan pada pengeluaran untuk penyertaan modal (investasi) daerah dalam rangka pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, Pemenuhan kewajiban hutang.

Tabel 3.3.
Rincian Perubahan Pembiayaan Daerah

NOMOR URUT	U R A I A N	PENETAPAN APBD 2017	PROYEKSI APBD 2018	BERTAMBAH/ (BERKURANG) APBD 2017	%
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	239,151,186,000	298,336,229,000	59,185,043,000	
3. 1	Penerimaan Pembiayaan	270,551,186,000	467,281,226,000	196,730,040,000	
3. 1. 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	270,551,186,000	467,281,226,000	196,730,040,000	
3. 1. 2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	270,551,186,000	467,281,226,000	196,730,040,000	
3. 2	Pengeluaran Pembiayaan	31,400,000,000	31,400,000,000	0	
3. 2. 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	31,400,000,000	31,400,000,000	0	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	31,400,000,000	31,400,000,000	0	

NOMOR URUT	U R A I A N	PENETAPAN APBD 2017	PROYEKSI APBD 2018	BERTAMBAH/ (BERKURANG) APBD 2017	%
	Pembiayaan Netto	239,151,186,000	435,881,226,000	196,730,040,000	
3. 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0	137,544,997,000	137,544,997,000	

Sumber: BKD Kab. Sukoharjo

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan pada aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum perencanaan yang diinginkan dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo terpilih untuk periode Tahun 2016-2021. Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran merujuk pada arah kebijakan RPJPD kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2021 dirumuskan Sebagai berikut:

4.1. VISI

“TERUS MEMBANGUN SUKOHARJO YANG LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”

Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

SEJAHTERA:

Mengandung makna dalam lima tahun ke depan akan terjadi semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;

MAJU :

Mengandung Makna Kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan;

BERMARTABAT :

Mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan etika, moral, maupun norma agama masyarakat;

PROFESIONAL :

Mengandung Makna bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Partisipatif, Akuntabel, Transparan dan Efisien) dan bersih (bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

4.2. MISI

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Sukoharjo 2016-2021 tersebut, maka dijabarkan dalam 5 (lima) misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kabupaten Sukoharjo:

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Transparan.

Kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan dapat mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitan ini tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, tetap konsisten untuk melanjutkan program perbaikan yang sudah berjalan dengan memberikan penekanan kepada Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan; dan Peningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik. Selanjutnya masing-masing diuraikan sebagai berikut:

a. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan; terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah; peningkatan akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; makin efektifnya penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan peningkatan implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah.

b. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.

Keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, ditekankan pada peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik, dan peningkatan implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah.

2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.

Pembangunan manusia dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia sejak janin dalam kandungan sampai lanjut usia yang pada hakekatnya adalah membangun manusia sebagai sumberdaya pembangunan yang produktif dan berdaya saing, serta sebagai insan dan anggota masyarakat yang dapat hidup secara rukun, damai, gotong royong, patuh pada hukum, dan aktif dalam bermasyarakat. Dengan memperhatikan keberagaman masyarakat, dilihat dari latar belakang sosial ekonomi, budaya, dan geografi, pembangunan manusia dilakukan secara kohesif dan inklusif sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat, tanpa membedakan latar belakang mereka. Oleh karena itu kebijakan dan program yang dilaksanakan harus dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dilaksanakan melalui: (1) Peningkatan Kualitas Pendidikan; (2) Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Lainnya; (3) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Selanjutnya masing-masing diuraikan sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas Pendidikan.

Di era sekarang ini mau tidak mau 4deolo pendidikan dipaksa untuk senantiasa beradu cepat dengan perubahan zaman. Kenapa harus begitu? Karena kemajuan suatu 4deolo tentunya tidak terlepas dari kualitas dunia pendidikan yang dimiliki. Semakin tinggi kualitas pendidikan, maka semakin tinggi pula SDM yang akan dihasilkan untuk memajukan 4deolo. Sebenarnya banyak sekali 4deolo penentu kualitas pendidikan, namun ada 2 faktor utama yang sangat berperan dalam membangun kualitas pendidikan yang baik, yaitu tenaga pendidik, dan sarana prasarana pendidikan.

(1) Tenaga pendidik.

Dalam hal tenaga pendidik dan kependidikan, difokuskan pada peningkatan kualifikasi akademik, setifikasi, evaluasi, pelatihan, pendidikan, dan penguatan kemampuan guru termasuk kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam menjalankan paradigma pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, entreprenueural dan menyenangkan, peningkatan kompetensi guru melalui pengembangan profesional berkelanjutan, pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas quality ansurance, dan peningkatan efisiensi, efektifitas, pengelolaan dan pemerataan distribusi guru sesuai dengan standar pelayanan minimal.

(2) Sarana dan Prasarana Pendidikan

Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pendidikan tetap konsisten untuk melanjutkan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, seperti laboraturium, perpustakaan yang berkualitas untuk memenuhi standar pelayanan minimal, serta peningkatan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan.

b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Lainnya.

Pembangunan kesehatan merupakan komponen penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Dengan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, pembangunan

kesehatan menjadi bagian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

Perbaikan status kesehatan dan gizi masyarakat terus dilakukan melalui berbagai upaya, hal ini terus dilanjutkan dan perlu penekanan pada :

(1) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan bagi Warga Miskin.

Menghilangkan *image* masyarakat bahwa pelayanan terhadap warga miskin atau kurang mampu terjadi diskriminasi pelayanan.

(2) Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.

Seluruh rumah sakit pemerintah, apakah itu Puskesmas ataupun BLUD mendapatkan subsidi obat dari Pemerintah, dengan subsidi tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan biaya yang murah. Ini menjadi masalah yang serius, manakala yang berobat adalah warga miskin, sehingga perlu kebijakan, agar warga miskin benar-benar mampu menikmati pelayanan kesehatan yang maksimal.

c. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

(1) Meningkatkan Peranan Wanita dan Gizi Keluarga.

Peranan Wanita dan Gizi Keluarga adalah pendukung program pembangunan yang penting bagi tersedianya sumber daya pembangunan yang sehat lahir dan batin.

Prioritas dalam Program ini adalah : Meningkatkan peranan wanita yang mandiri dan partisipatif, memberdayakan peranan ibu rumah tangga dalam proses produksi sektor informal (industri rumah tangga), serta peran wanita dalam pemberdayaan lahan pekarangan dan gizi keluarga. Program ini dapat dicapai melalui : Kegiatan promotif, kursus-kursus kader fasilitator peranan wanita, kursus ditingkat RT/RW untuk memberikan ketrampilan industri rumah tangga, kursus ditingkat RT/RW untuk pengetahuan tanaman obat dan gizi keluarga.

(3) Memberikan Perlindungan bagi Orang Miskin

Upaya mengentaskan kelompok masyarakat dari kemiskinan, tidak dapat dilakukan tanpa munculnya motivasi yang kuat dari yang bersangkutan. Langkah ini bertujuan untuk melindungi orang miskin sebagai penjabaran dari Pasal 34 UUD 1945, memfasilitasi kebutuhan pekerjaan dan meningkatkan kemauan berusaha, yang dapat dicapai melalui tahapan proses pembinaan mentalitas dan penumbuhan etos kerja melalui bimbingan partisipatif, dan penyelenggaraan kursus-kursus ketrampilan praktis hal ini diharapkan agar lebih berdaya guna dan produktif.

3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah

Kawasan Pedesaan sebagai wilayah yang luasnya paling besar memerlukan penanganan lebih serius dalam hal pemerataan produktivitas mengingat seluruh sumber daya pembangunan sebenarnya terpusat dikawasan ini, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan volume kegiatan produksi di Pedesaan, langkah-langkah strategis yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Komoditi Unggulan;

Dengan luas lahan sawah yang begitu besar, Kabupaten Sukoharjo mampu memproduksi padi melebihi hasil panen rata-rata pertahun untuk padi sawah dan untuk padi jenis gogo ditambah dari hasil produksi palawija, sehingga sektor pertanian mampu menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi. Sektor pertanian ini dapat ditingkatkan lagi dengan mencobakan komoditas unggulan yang memiliki nilai jual tinggi dan efisiensi produksi yang dikerjakan dengan pola budidaya terpadu serta pengembangan sistem budidaya produksi dari hulu-hilir yang terkendali dalam tata organisasi yang terpadu dan terkendali dengan baik untuk mencapai nilai tambah yang optimal, meningkatnya swasembada beras, swasembada pangan menuju ketahanan pangan;

b. Mengoptimalkan Industri Pengolahan;

Industri Pengolahan di Kabupaten Sukoharjo memegang peranan penting disamping sektor pertanian. Industri pengolahan yang ada

seperti Rotan, Meubel Kayu, Jamu, Grafir Kaca, Tatah Sungging, Batik dan barang-barang modal merupakan sektor industri yang tumbuh subur. Untuk merangsang agar industri pengolahan dapat berkembang lebih optimal, maka diperlukan manajemen promosi yang lebih proaktif, baik dalam skala regional, Nasional maupun internasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing omset penjualan, pendapatan devisa dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Melakukan Pemetaan;

Hal ini bertujuan untuk mengembangkan produk-produk pertanian maupun potensi home industri yang sesuai dengan kondisi wilayah, sehingga mampu tercipta kawasan hasil pertanian dan home industri tertentu di suatu wilayah hingga memudahkan pembinaan dan pemasaran hasil pertanian dan industri.

d. Pelestarian Lingkungan Hidup;

Yang paling penting dalam memanfaatkan dan mengelola potensi daerah berbasis sektor pertanian dan industri ini harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dengan tetap memperhatikan RTRW Kabupaten Sukoharjo.

e. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur diprioritaskan untuk wilayah pedesaan, hal ini dimaksudkan disamping menambah nilai jual asset di pedesaan juga untuk memberikan kemudahan dan akses transportasi ekonomi bagi masyarakat, langkah-langkah yang dapat dilakukan :

- (1) Melanjutkan percepatan pembangunan jalan-jalan strategis, untuk lintas ekonomi dan perdagangan hasil bumi;
- (2) Melanjutkan pembangunan dan perbaikan saluran irigasi untuk menambah produktivitas hasil pertanian;
- (3) Menuntaskan Revitalisasi Pasar Tradisional untuk mendorong percepatan pemberdayaan ekonomi pedesaan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi;
- (4) Pengelolaan sumber daya air yang baik dan komprehensif sebagai pencegah banjir di musim hujan dan kekeringan dimusim kemarau.

4. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat.

Gotong royong yang merupakan watak, karakter dan kepribadian masyarakat kita telah mampu menghadang sifat individualisme yang menjadi kebiasaan sehari-hari, kebiasaan hidup gotong-royong yang diimplementasikan dalam kehidupan sosial di masyarakat dan dilandasi dengan nilai-nilai budaya dan agama menjadi suatu kesatuan yang mampu memperkuat dan mempererat tata kehidupan bermasyarakat, agar semangat kebersamaan tersebut dapat terbina, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

a. Meningkatkan Semangat Gotong Royong

Konsep Trisakti Bung Karno sebagai upaya untuk mengembalikan jalan 8deology bangsa Indonesia, menjadi pondasi utama dalam pembangunan karakter bangsa ke depan agar berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

Kegiatan sosial di masyarakat dapat dilakukan dengan mengaktifkan kembali semangat gotong royong di segala aspek kehidupan. Sehingga mampu meningkatkan nilai-nilai kebersamaan di masyarakat, bentuk-bentuk gotong royong yang dapat dilakukan antara lain : Perkumpulan Sosial, Perkumpulan Usaha Bersama dan Kerja Bakti di segala bidang pembangunan.

b. Melestarikan Seni dan Budaya Daerah

Budaya daerah yang adiluhung perlu dilestarikan keberadaannya, sehingga kelak nantinya dapat menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Sukoharjo, terdapat banyak sekali budaya/tradisi yang dimiliki oleh Kabupaten Sukoharjo, tetapi tidak dimiliki oleh daerah lain, contohnya : Seni Lesung, Seni Membuat Wayang, Seni Membuat Gamelan, Sanggar Lukis, Sanggar Tari dan Pedalangan. Seni budaya tersebut mampu menjadi alat pemersatu dalam kehidupan sosial di masyarakat, penyangga budaya nasional yang semakin dinamis yang tetap bertumpu pada kekayaan budaya daerah.

c. Memfasilitasi Kerukunan Kehidupan Beragama

Memfasilitasi semangat dan kemauan dalam upaya menciptakan kerukunan kehidupan beragama yang optimal, serta

meningkatkan peran lembaga keagamaan dalam pembangunan daerah.

Menciptakan horizontal antara lembaga-lembaga keagamaan dengan menyelenggarakan dialog rutin berkala antar pemimpin agama, serta memfasilitasi terwujudnya peningkatan sarana/prasarana ibadah secara merata dan berkeadilan guna memelihara kerukunan umat beragama yang semakin mantap.

5. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Tentram , Aman dan Dinamis

Kepala Daerah bertanggungjawab atas tercapainya kondusivitas suatu daerah, namun dalam menjaga kondisi tersebut, maka senantiasa bekerja sama secara harmonis, sinergis dan saling menghargai dengan institusi lain, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Kodim guna menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Disamping Institusi tersebut, yang tidak kalah pentingnya adalah membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan tokoh-tokoh kunci di daerah yaitu : Tokoh Agama/Ulama, Tokoh Budaya, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda. Tokoh Perempuan, LSM, Organisasi Masyarakat dan Lembaga-lembaga lainnya.Dengan membangun komunikasi yang harmonis dan rasa tanggungjawab bersama serta menghilangkan rasa saling curiga, maka akan tercipta kondisi masyarakat Sukoharjo yang aman, tentram dan dinamis.

Berikut keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2021:

Tabel 4.1

Misi, Tujuan, Sasaran Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Transparan	Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan melalui peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, dalam memberikan pelayanan publik yang mendasarkan prinsip – prinsip <i>Good Governance</i>	1. Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah
		2.Terwujudnyapelayanan publik yang prima
		3. Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih

Misi	Tujuan	Sasaran
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.	Meningkatkan Pembangunan Manusia dalam rangka untuk peningkatan Index pembangunan manusia atau kualitas hidup manusia dan pembangunan masyarakat.	1.Terwujudnya Peningkatan Pelayanan pendidikan yang berkualitas
		2.Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
		3.Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas
3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Penguatan Inovasi, dalam rangka mewujudkan Kemandirian dan Kedaulatan daerah	1.Terwujudnya kawasan ekonomi baru serta mendorong peningkatan investasi
		2.Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat
		3.Terwujudnya peningkatan pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
		4.Terwujudnya kedaulatan pangan di masyarakat dan komoditi unggulan
4. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat.	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat.	1. Terwujudnya peningkatan prasarana keagamaan dan aktivitas keagamaan di masyarakat
		2. Terwujudnya kelestarian kesenian dan budaya daerah sebagai identitas daerah
5. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Tentram , Aman dan Dinamis	Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	1. Terciptanya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan
		2.Terwujudnya sinergi pembangunan antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 perlu adanya kebijakan yang merupakan arah/tindakan yang diambil dan diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Kebijakan tersebut lebih lanjut diimplementasikan melalui berbagai program pembangunan daerah yang merupakan instrumen kebijakan, yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Sejumlah kebijakan dan program sebagai tindak lanjut berbagai strategi yang dirumuskan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan Peningkatan Kualitas Pendidikan.

Salah satu upaya untuk memutus rantai kemiskinan adalah dengan peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, program penuntasan pendidikan dasar perlu dilakukan, karena tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Kabupaten Sukoharjo di atas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Lebih dari itu, pendidikan sangat menentukan kemajuan dan kemakmuran bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya program pembinaan potensi unggul bagi generasi muda dan program peningkatan budaya belajar (*life long learning*, minat baca). Sudah barang tentu upaya percepatan peningkatan mutu pendidikan ini tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah semata, tetapi perlu program pelibatan masyarakat peduli pendidikan, termasuk swasta.

2. Melanjutkan Peningkatan Derajat Kesehatan.

Kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Sukoharjo dari tahun ke tahun semakin membaik, hal ini ditunjukkan dengan adanya kecenderungan kenaikan angka usia harapan hidup. Untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan maka perlu program peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang mencakup peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta pengembangan manajemen kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK), program peningkatan kecukupan pangan dan gizi, dan program pengembangan budaya sehat.

3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Miskin.

Jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Sukoharjo dari tahun ke tahun mengalami kecenderungan penurunan. Namun demikian, jumlah

masyarakat miskin dari awal pelaksanaan RPJM Daerah ini masih cukup besar. Kemiskinan ditunjukkan dari fenomena kesenjangan atau kelemahan masyarakat atau kelompok masyarakat terhadap akses sumber daya. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kelompok masyarakat miskin melalui program pengembangan lembaga keswadayaan masyarakat, serta penguatan kelompok marginal yang terutama disandang oleh kaum perempuan melalui program peningkatan kapasitas perempuan di pedesaan.

4. Melanjutkan Peningkatan Kapasitas Desa.

Kelompok tertinggal sebagian besar terletak di desa. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya afirmasi/pemberdayaan terhadap desa. Pemberdayaan ini tentu saja dimulai dari lembaga pemerintah dan mitra yang ada di desa melalui program peningkatan kapasitas aparat desa melalui program peningkatan infrastruktur desa, kapasitas dan kelembagaan dan kemitraan desa.

5. Mengimplementasikan Inisiasi *E-gov* (*Electronic Government*/Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi

Implementasi kebijakan pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas layanan publik. Layanan publik yang transparan, cepat, tepat, mudah, murah, dan ramah menjadi dambaan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan instrumen pendukung. Dalam hal ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui kebijakan *Electronic Government*.

6. Meningkatkan Implementasi Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Pemerintahan yang baik ini ditentukan oleh kemampuan, pengawasan, serta sistem pembinaan dari aparat pemerintah. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan program peningkatan kompetensi penyelenggaraan pemerintah daerah dan program peningkatan kapasitas pengawasan dengan penerapan sistem penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) serta falsafah “*melayani dengan ihklas*”.

7. Melanjutkan Peningkatan Wawasan Kebangsaan.

Tujuan pembangunan hanya dapat dicapai melalui tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan adanya peran serta seluruh pemangku kepentingan mulai dari penelaahan masalah, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta penikmatan hasil dari agenda pembangunan. Dalam rangka mendorong peran serta pemangku kepentingan perlu program peningkatan kesadaran politik

- masyarakat yang didukung dengan terciptanya suasana yang kondusif melalui pelaksanaan program peningkatan tertib berwarganegara.
8. Melanjutkan Kebijakan Penataan Basis Data Kependudukan.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk memenuhi kecukupan data dan informasi tentang kependudukan sebagai pijakan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan peristiwa kependudukan dan berbagai permasalahan yang melekat di dalamnya. Dalam penerapannya, kebijakan ini dijalankan melalui program penyempurnaan data kependudukan. Keberhasilan atas pelaksanaan kebijakan dan program tersebut, diharapkan akan mendukung terbangunnya sistem informasi kependudukan.
 9. Melanjutkan Kebijakan Penataan Basis Data Tata Ruang.
Guna terselenggaranya proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan memerlukan tersedianya basis data tata ruang yang valid dengan menerapkan kebijakan penataan basis data tata ruang yang diimplementasikan melalui program pengembangan data tata ruang. Terlaksananya kebijakan dan program dimaksud menjadi kontribusi bagi terbangunnya sistem informasi tata ruang.
 10. Melanjutkan Kebijakan Penataan Basis Data Daya Dukung Wilayah.
Efektivitas dan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sangat dipengaruhi seberapa besar daya dukung wilayah. Sementara itu, untuk mengetahui potensi daya dukung wilayah perlu adanya kebijakan yang mengarah pada upaya penataan basis data daya dukung wilayah, yang rencana aksinya dilaksanakan melalui program identifikasi daya dukung alam, rencana aksi penurunan emisi Gas Rumah Kaca dan program identifikasi daya dukung infrastruktur wilayah. Keluaran dari kebijakan dan program tersebut diharapkan dapat mendukung terbangunnya sistem informasi daya dukung wilayah.
 11. Pemanfaatan Informasi Hasil - Hasil Pembangunan.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung terbangunnya sistem informasi hasil-hasil pembangunan. Kebutuhan, pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi hasil-hasil pembangunan diarahkan untuk mendukung kinerja peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas pemerintah daerah serta untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat

yang maju dan sejahtera. Itulah sebabnya, aplikasi dari kebijakan ini diejawantahkan melalui program penerapan keterbukaan informasi, dan program mendorong pemanfaatan keterbukaan informasi.

12. Peningkatan Dialog Antar Daerah.

Dalam rangka merintis terjalinnya kerjasama daerah. Dipandang perlu untuk mengintensifkan dialog antardaerah dengan menerapkan kebijakan peningkatan dialog antar daerah melalui program penumbuhan dialog antar wilayah.

13. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah.

Kerjasama merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menyeraskan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kebijakan peningkatan kerjasama antardaerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum, khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antardaerah dan daerah tertinggal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Implementasi kebijakan tersebut dijalankan melalui program penanganan wilayah perbatasan dan program peningkatan kolaborasi regional tematik.

14. Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Salah satu hal yang diyakini dapat memperkuat landasan inovatif adalah ketersediaan infrastruktur TIK. Sementara itu kebijakan yang dipandang relevan untuk mendukung terbangunnya infrastruktur TIK adalah pengembangan jaringan TIK, yang dalam tataran operasional, dilaksanakan melalui program pengembangan jaringan teknologi informasi dan komunikasi dan program pengaturan piranti lunak.

15. Penataan Sistem Komunikasi Data.

Kebijakan penataan sistem komunikasi data merupakan bagian integral dari kebijakan penataan berbagai jenis basis data. Dengan kebijakan ini diharapkan adanya upaya standarisasi dan integrasi data. Oleh karena itu, untuk menindaklanjuti kebijakan ini perlu penerapan program standarisasi data dan program integrasi data agar sistem komunikasi data terbangun dengan baik.

16. Peningkatan Kualitas Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi hendaknya dapat disikapi untuk mendorong kemajuan daerah dalam berbagai bidang, termasuk di antaranya kemajuan dalam bidang pendidikan. Kebijakan peningkatan mutu pendidikan yang berbasis TIK yang di implementasikan melalui program penerapan manajemen pendidikan berbasis TIK dipandang perlu untuk menangkap peluang pesatnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi di bidang pendidikan.

17. Optimalisasi Peran Penelitian dan Pengembangan (Litbang).

Peran litbang harus dioptimalkan, baik sebagai *research agenda maker* (problem) maupun *research goal setter* (solusi) di daerah agar daerah mampu berdaya saing, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Litbang pemerintah daerah harus terpercaya, *resourceful* dan diperankan sebagai Komunikator yang efektif bagi beragam simpul litbang di daerah. Untuk mendorong hal tersebut, perlu kebijakan optimalisasi peran Litbang yang dalam penerapannya dilaksanakan melalui : (a) Program peningkatan kapasitas lembaga Litbang, (b) Program kerjasama antar lembaga Litbang, dan (c) Program publikasi hasil Litbang.

18. Peningkatan Insentif Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Masyarakat.

Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi dan difusi iptek perlu adanya stimulan dan rangsangan berupa insentif untuk mendorong kegiatan Litbang masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah kebijakan peningkatan insentif Litbang masyarakat agar kegiatan Litbang masyarakat semakin berkembang. Tindak lanjut kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program penumbuhan kegiatan Litbang masyarakat dan program apresiasi dan pemanfaatan hasil Litbang.

19. Inventarisasi Pengetahuan Tradisional.

Secara garis besar pengetahuan tradisional merupakan hasil proses kreatif komunal dan sosial antargenerasi yang menunjukkan dan mencerminkan sejarah komunikasi, budaya dan jati diri sosial pada komunitas, dan sistem nilai pada komunitas. Upaya perlindungan terhadap kreativitas dan inovasi berbasis tradisi perlu diawali dengan langkah identifikasi dan inventarisasi pengetahuan tradisional. Komitmen untuk menyikapi hal tersebut dituangkan dalam sebuah kebijakan

inventarisasi pengetahuan tradisional, dan pada tahap awal ditindaklanjuti melalui program identifikasi pengetahuan tradisional.

20. Penyediaan Fasilitas Perdagangan.

Sektor perdagangan menduduki peringkat kedua dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB, yaitu sebesar 27 %. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan sangat potensial untuk dikembangkan. Itulah sebabnya, dibutuhkan kebijakan penyediaan fasilitas perdagangan guna mendukung aktivitas perdagangan. Kebijakan tersebut dalam penerapannya dilaksanakan melalui program pengembangan infrastruktur perdagangan.

21. Peningkatan Investasi.

Investasi adalah salah satu jalur hubungan daerah dengan berbagai pihak. Investasi memiliki arti penting bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan dan transfer keahlian dan teknologi. Dengan demikian investasi dapat menjadi salah satu solusi dalam memecahkan persoalan kemiskinan dan pengangguran. Menyadari urgensi investasi maka perlu adanya kebijakan peningkatan investasi dan rencana aksi yang dapat memberikan daya tarik bagi tumbuh dan berkembangnya investasi, melalui program pembangunan pelibatan sumber daya paseduluran, program penciptaan iklim yang mendukung investasi, program peningkatan infrastruktur investasi, dan program pemasaran aktif.

22. Reformasi Kebijakan Bisnis.

Kebijakan ini diperlukan dengan maksud untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Oleh karena itu, kebijakan bisnis yang dinilai menghambat perkembangan bisnis di daerah perlu dikaji dan dilakukan penyempurnaan. Untuk mendukung kebijakan tersebut, dapat dilakukan dengan penerapan program penyederhanaan regulasi bisnis, dan program penciptaan lingkungan legal dan regulasi kondusif.

23. Pengembangan Rumpun Usaha.

Upaya perkuatan rumpun usaha yang saling terkait dalam rantai nilai perlu dilakukan untuk memberikan ungkitan besar pada pendapatan masyarakat. Pada dasarnya setiap pelaku pada mata rantai nilai adalah organ ekonomi yang hidup dan membutuhkan perkuatan untuk meningkatkan aliran barang, jasa, uang, informasi dan pengetahuan. Itulah sebabnya diperlukan adanya kebijakan pengembangan rumpun

usaha yang dilaksanakan melalui program peningkatan kolaborasi ekonomi dan program peningkatan skema pembiayaan berisiko.

24. Pengembangan Eko-Efisiensi.

Melalui kebijakan ini para pelaku usaha dilibatkan untuk memanfaatkan secara efisien sumber daya yang dimiliki termasuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan sosial yang ada di sekitarnya. Kebijakan pengembangan eko-efisiensi melalui pendekatan eko-efisiensi dapat diterapkan dengan mengembangkan usaha kecil dan menengah yang ramah lingkungan, yang pada prinsipnya adalah menyelaraskan perbaikan lingkungan dengan menyentuh sektor ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam tataran operasional kebijakan dan pendekatan pengembangan eko-efisiensi diaplikasikan melalui program pengembangan insentif dan disinsentif.

25. Perbaikan Sistem Produksi.

Dalam dunia usaha, peningkatan produksi menjadi target utama yang terkadang kurang memperhatikan kondisi lingkungan. Fenomena ini merupakan persoalan serius yang harus segera memperoleh perhatian. Akar permasalahannya terletak pada bekerjanya sistem produksi yang dibangun. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan perbaikan sistem produksi dalam rangka mewujudkan penguatan industri yang ramah lingkungan dan penataan daerah industri. Untuk mendukung kebijakan tersebut, terdapat dua program yang akan dijalankan, yaitu program penguatan industri ramah lingkungan dan program penataan daerah industri.

26. Inisiasi Klaster Industri Kreatif.

Pengembangan industri kreatif harus tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan industri kreatif adalah sumber daya manusia, anggaran, teknologi penunjang, kebijakan pemerintah, dan infrastruktur fisik. Tahapan yang paling sulit dalam pengembangan industri kreatif adalah penciptaan apresiasi terhadap industri kreatif itu sendiri. Pengembangan industri kreatif adalah penciptaan apresiasi terhadap industri kreatif itu sendiri. Pengembangan industri kreatif berikutnya membutuhkan adanya kebijakan inisiasi klaster industri kreatif yang diterapkan melalui: (a) program pengembangan nilai ekonomi kegiatan kreatif; (b) program peningkatan transaksi industri kreatif; dan (c) program perbaikan lingkungan klaster.

27. Pembudayaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Dalam tatanan ekonomi modern, HKI merupakan suatu hal yang sangat penting utamanya untuk melindungi keberadaan setiap produk bisnis dan jasa yang dijalankan. Pelaksanaan dan perlindungan HKI akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong investasi dan pengalihan teknologi secara cepat, serta merangsang daya saing masyarakat dan perusahaan setempat. Untuk menyadarkan masyarakat akan urgensi HKI diperlukan kebijakan pembudayaan HKI, yang diimplementasikan melalui program perlindungan dan pemanfaatan HKI dan program fasilitasi perolehan HKI.

28. Peningkatan Manajemen Masalah Sosial.

Mengatasi masalah sosial di daerah tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi dibutuhkan adanya manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial, guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, penanganan masalah sosial yang selama ini dilakukan perlu ditingkatkan dengan menetapkan kebijakan peningkatan manajemen masalah. Kebijakan tersebut lebih lanjut diterapkan melalui : (a). Program pengembangan partisipasi kelembagaan peduli Pekat dan PMKS, (b). Program pengembangan unit rehabilitasi Pekat, dan (c). Program pengembangan unit penanganan PMKS. (d). Program Santunan Sosial Kematian serta (e).Kemitraan dengan dunia usaha (*Corporate Social Responsibility/CSR*)

29. Antisipasi Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Pada dasarnya KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kebijakan antisipasi tindak KDRT sangatlah dibutuhkan agar tindak KDRT ke depan tidak semakin bertambah. Kebijakan tersebut secara operasional dilaksanakan melalui program penguatan lembaga perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender.

30. Peningkatan Kesalehan Sosial.

Kebijakan ini terlahir sebagai bentuk keprihatinan akan kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya menjadikan kesadaran beragama sebagai titik tolak terciptanya kehidupan yang lebih baik pada tingkat kolektif. Kesadaran beragama sebagai titik tolak terciptanya kehidupan yang lebih baik pada tingkat kolektif. Kesadaran beragama yang mestinya melahirkan kesalehan sosial ternyata mulai kehilangan sukma dalam implementasinya. Oleh karena itu, kesadaran beragama harus dimaknai dan didorong untuk mampu melahirkan kesalehan sosial melalui program perkuatan forum komunikasi antar umat dan program dukungan aktivitas keagamaan.

31. Pelestarian Ekosistem Pertanian.

Kabupaten Sukoharjo memiliki wilayah pertanian yang cukup luas tersebut ternyata kondisinya relatif memprihatinkan karena banyaknya pengalihan fungsi. Fenomena ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas pembangunan perumahan dan industri. Oleh karena itu diperlukan Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pertanian, yang didukung dengan Program penataan wilayah.

32. Pemeliharaan Sumber Daya Air.

Peningkatan kualitas daerah tangkapan air ini perlu dilaksanakan melalui program rehabilitasi daerah tangkapan air dan program peningkatan partisipasi masyarakat.

33. Perlindungan Hutan.

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting dalam mempengaruhi iklim mikro dan hidrologi suatu wilayah. Luas hutan baik hutan negara maupun hutan rakyat di Kabupaten Sukoharjo masih dibawah luas ideal yaitu masih kurang dari 30% luas wilayah. Hal ini perlu dipacu dengan pelaksanaan program reboisasi hutan. Pengalaman menunjukkan keterlibatan masyarakat sangat menentukan keberhasilan perlindungan hutan. Oleh sebab itu, perlu digalakkan program peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

34. Kewaspadaan dan Penanganan Bencana Alam.

Kabupaten Sukoharjo termasuk daerah rawan bencana alam. Hampir setiap tahun di beberapa wilayah terlanda banjir, kekeringan, tanah longsor, dan lain-lain. Untuk itu diperlukan langkah-langkah untuk menekan dampak yang lebih parah dari fenomena alam tersebut, melalui

penerapan program antisipasi bencana alam serta program pencegahan dan pemulihan bencana alam.

35. Peningkatan Moral Generasi Muda.

Kabupaten Sukoharjo termasuk daerah penyangga Kota Solo, yang tentunya mempunyai dampak baik positif maupun negatif, dampak negatif kehidupan kota salah satunya adalah pergaulan bebas, hal ini perlu diantisipasi melalui kegiatan bekerja sama dengan organisasi kepemudaan serta mengoptimalkan peran Karang Taruna dalam pemberdayaan generasi muda di Kabupaten Sukoharjo.

Program Prioritas Kabupaten Sukoharjo dijabarkan ke dalam tabel berikut:

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program Prioritas Kabupaten Sukoharjo

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan melalui peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, dalam memberikan pelayanan publik yang mendasarka prinsip – prinsip <i>good Governance</i> .	1. Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	1. Pengelolaan manajemen kepegawaian yang mendukung pemenuhan pelayanan prima	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / wakil Kepala Daerah
			Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
			Program Peningkatan Hubungan Antar Lembaga
			Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
			Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
			Program Pengembangan Data/Informasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
		2. Peningkatan Kapasitas kelembagaan	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
			Program Penataan Daerah Otonomi Baru
	2. Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Peningkatan kinerja pelayanan kelembagaan pemerintah	Program Pelayanan Perijinan Daerah
			Program Penataan Administrasi Kependudukan
	3. Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan efektifitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
			Program Perencanaan Sosial dan Budaya
			Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
			Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah
			Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
			Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
			Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
			Program Pengadaan Lahan Pemerintah
			Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh
			Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
			Program Pendidikan Kedinasan
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
			Program Pengintensifkasan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Meningkatan Pembangunan Manusia dalam rangka untuk peningkatan Index pembangunan manusia atau kulaitas hidup manusia dan pembangunan masyarakat.	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas	Penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
			Program Pendidikan Menengah
			Program Pendidikan Kesiswaan
			Program Pendidikan Anak Usia Dini
			Program Pendidikan Non Formal
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas dan terrjangkau	Program Pengadaan/Perbaikann sarana & Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
			Program Peningkatan Pelayanan BLUD
			Program Pengawasan Obat dan Makanan
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat
			Pelayanan kesehatan masyarakat miskin
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat
			Program Pengembangan Lingkungan Sehat
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
			Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita
			Program Peningkatan Kesehatan Lansia
			Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
			Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rs. Jiwa/ Rs. Paru- Paru

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
	Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas	Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah
			Program Keserasian Kebijakan Peningkatn Kualitas Anak dan Perempuan
			Program Keluarga Berencana
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah
			Program Kesehatan Reproduksi Remaja
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
			Program Pelayanan Kontrasepsi
			Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/ KR Yang Mandiri
			Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat
			Program Pengembangan Pusat Pelayanan dan Informasi dan Konseling KRR

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
			Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
			Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
			Program Pengembangan Model Operasional BKB-POSYANDU-PADU
			Program Penanganan Penduduk Miskin
			Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
			Program Transmigrasi Regional
			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT, dan PMKS Lainnya
			Program Pembinaan Anak Terlantar
			Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
			Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo
		Pengembangan Permukiman yang berkualitas	Program Pengembangan Perumahan
			Program Lingkungan Sehat Perumahan
			Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
			Program Pembangunan Sistem Pendaftaran

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
			Tanah
			Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Penguatan Inovasi, dalam rangka mewujudkan Kemandirian dan Kedaulatan daerah	Terwujudnya kawasan ekonomi baru serta mendorong peningkatan investasi	Penguatan iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
			Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja
			Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
			Program Perencanaan Tenaga Kerja
	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Revitalisasi pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi rakyat	Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
			Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	Terwujudnya peningkatan pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat	Pengembangan dan Pengutan Lingkungan Usaha	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
			Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
			Program Revitalisasi Pasar tingkat Kecamatan
			Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
		Menumbuhkan industri Kreatif	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
			Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
		Menumbuhkan Infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan hidup	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
			Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong
			Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
			Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi
			Program Pengelolaan Areal Pemakaman
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
			Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
			Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
			Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
			Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
			Program Perencanaan Tata Ruang
			Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
			Program Pemanfaatan Ruang
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
			Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
			Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
			Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
			Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
			Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
			Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Pengendalian Polusi
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
			Program Pengendalian Banjir

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
	Terwujudnya Kedaulatan Pangan di Masyarakat dan Komoditi unggulan	Menumbuhkan Ketahanan Pangan di Masyarakat	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)
			Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
			Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat.	1. Terwujudnya peningkatan prasarana keagamaan dan aktivitas Keagamaan di Masyarakat	Revitalisasi sarana dan prasarana keagamaan dan aktivitas pendidikan	Program Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
	2. Terwujudnya Kelestarian Kesenian dan Budaya Daerah sebagai Identitas Daerah	Meningkatkan kecintaan terhadap Seni dan Budaya Daerah	Program Pengembangan Nilai Budaya
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
			Program Pengembangan Kemitraan
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Terciptanya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan	Peningkatan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
			Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
			Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
			Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
		Terciptanya Ketertiban dan Ketenteraman	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
			Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
			Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
			Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
			Program Peningkatan Ketertiban Penyelenggaraan Pemerintahan
			Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
			Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
			Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
			Program Pendidikan Politik Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
			Program Peningkatan Komunikasi Dengan Lingkungan Masyarakat
			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
	Terwujudnya Sinergi pembangunan antara emerintah daerah, kademisi, dunia usaha dan masyarakat.	Membangun kemitraan dengan duniausaha, LSM dan akademika	Program Pengembangan Sumber Daya Iptek
			Program Penelitian dan Pengembangan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mendasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintah yang menjadi urusan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah 23 (dua puluh tiga) urusan kewenangan wajib dan 8 (delapan) urusan kewenangan pilihan.

Berikut secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten Sukoharjo tahun 2018 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas diuraikan sebagaimana berikut:

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH TAHUN 2018

Berikut adalah indikator kinerja utama Kabupaten Sukoharjo yang ditargetkan untuk dicapai di tahun 2018.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018

No	Nama Urusan	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2018	PD
A.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat					
1	Ekonomi	-	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	PD Urusan Penunjang
		-	NTP	%	102	PD Urusan Penunjang
		-	PDRB	Rp. Trilyun	33.350	PD Urusan Penunjang
		-	PDRB per Kapita	Rp. Juta	38.936	PD Urusan Penunjang
		-	Laju Inflasi	%	4,0	PD Urusan Penunjang
2	Sosial Budaya	-	IPM	Point	76,20	PD Urusan Penunjang
		-	Angka Kemiskinan	%	8,2	PD Urusan Penunjang
		-	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,0	PD Urusan Penunjang
		-	Indeks Kepuasan Masyarakat		81	PD Urusan Penunjang
3	Infrastruktur	-	Kualitas Jalan yang baik	%	77	PD Urusan Pekerjaan Umum
		-	Kawasan Kumuh	%	4	PD Urusan Pekerjaan Umum
		-	Prosentase Total Penurunan RTLH	%	5	PD Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Sosial
B.	Aspek Pelayanan Umum					
1	Pendidikan	-	Angka Melek Huruf	%	99,25	PD urusan Pendidikan
		-	APK SMP sederajat	%	100	PD urusan Pendidikan
		-	APM SMP sederajat	%	100	PD urusan Pendidikan
		-	Lama rata-rata sekolah	Tahun	8,8	PD urusan Pendidikan

No	Nama Urusan	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2018	PD
		-	APS SD	%	0	PD urusan Pendidikan
		-	APS SMP	%	0,1	PD urusan Pendidikan
		-	Rasio murid dan guru SD	Rasio	1/20	PD urusan Pendidikan
		-	Rasio murid dan guru SMP	Rasio	1/20	PD urusan Pendidikan
		-	Rasio kelas dan murid SD	Rasio	1/20	PD urusan Pendidikan
		-	Rasio kelas dan murid SMP	Rasio	1/28	PD urusan Pendidikan
		-	APK PAUD	%	50,74	PD urusan Pendidikan
		-	Prosentase Guru SD Berkualifikasi S1/D4	%	79,79	PD urusan Pendidikan
		-	Prosentase Guru SMP Berkualifikasi S1/D4	%	95,07	PD urusan Pendidikan
		-	Prosentase Guru SMP Berkualifikasi S1/D4	%	92,54	PD urusan Pendidikan
2	Kesehatan	-	Angka Harapan Hidup	Tahun	77,54	PD urusan Kesehatan
		-	Angka Kematian Ibu Melahirkan	Per 100.000 Kelahiran Hidup	120	PD urusan Kesehatan
		-	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 Kelahiran Hidup	9,4	PD urusan Kesehatan
		-	Angka Kematian Balita (AKABA)	Per 1.000 Kelahiran Hidup	10,5	PD urusan Kesehatan
		-	Prevalensi Penderita Gizi Buruk	%	<1	PD urusan Kesehatan
		-	Prevalensi Penderita Gizi Kurang	%	<5	PD urusan Kesehatan
		-	Desa Siaga Aktif Mandiri	%	39	PD urusan Kesehatan
		-	Angka Kesakitan DBD	Per 100.000 Penduduk	<49	PD urusan Kesehatan
		-	Prosentase Desa ODF	%	45	PD urusan Kesehatan
			Desa/Kalurahan UCI	%	100	PD urusan Kesehatan
		-	RGD	%	4,8	PD urusan Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	Prosentase Kondisi Jalan Baik	%	54	PD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Nama Urusan	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2018	PD
		-	Prosentase Kondisi Irigasi Baik	%	53	PD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		-	Prosentase Cakupan Air Minum	%	84	PD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		-	Cakupan Sistem Pengolah Air Limbah	%	86	PD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		-	Cakupan Drainase	Km	1400	PD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		-	Cakupan Layanan Persampahan	%	28	PD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		-	Prosentase Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	%	11	PD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		-	Cakupan Pelayanan Sanitasi	%	88,95	PD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		-	Pembangunan Embung	Embung	0	PD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		-	Prosentase jembatan dalam kondisi baik	%	96	PD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	Rasio Kebutuhan Rumah dan Penyediaan Perumahan	%	78	PD yang menangani Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		-	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	%	25	PD yang menangani Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		-	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran kabupaten	%	0,15	PD yang menangani Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan

No	Nama Urusan		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	PD
						Permukiman
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	-	Jumlah Kasus Tindak Pidana	Kasus/Tahun	425	PD urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
		-	Jumlah Kasus Pelanggaran PERDA	Kasus/Tahun	250	PD urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
		-	Indeks Resiko Bencana	Indeks	93	PD urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
		-	Rata-rata waktu respon tanggap bencana	menit	19,5	PD urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
		-	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pengetahuan wawasan kebangsaan	Orang	1.100	PD urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
		-	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	%	68	PD urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6	Sosial	-	Prosentase Penurunan PMKS	%	4,00	PD menangani Urusan Sosial
		-	Prosentase KK miskin dan rentan miskin yang terlindungi jaminan sosial	%	100	PD menangani Urusan Sosial
		-	Rasio Anak Terlantar yang ditangani dibanding Jumlah Anak terlantar	%	40	PD menangani Urusan Sosial
		-	Prosentase rehabilitasi sarana prasarana keagamaan	%	0	PD menangani Urusan Sosial
7	Tenaga Kerja	-	Prosentase Kesempatan Kerja	%	97	PD menangani Urusan Tenaga Kerja
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	Prosentase Cakupan perempuan dan anak korban	%	100	PD menangani Urusan Pemberdayaan

No	Nama Urusan	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2018	PD
			kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum			Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Pangan	-	Skor Pola Pangan Harapan	%	92,9	PD menangani urusan Pangan
		-	Konsumsi Kalori	Kkal/Kap/Hari	2140	PD menangani urusan Pangan
		-	Konsumsi Ikan	Kg/kap/tahun	17,6	PD menangani urusan Pangan
10	Pertanahan	-	Prosentase lahan bersertifikat	%	87,5	PD menangani urusan pertanahan
11	Lingkungan Hidup	-	Indeks Kualitas lingkungan Hidup	Indeks	49,25	PD menanganani urusan Lingkungan Hidup
		-	Prosentase lahan kritis yang ditangani	%	60	PD menanganani urusan Lingkungan Hidup
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	-	Prosentase penduduk ber KTP	%	92,50	PD menangani urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	Jumlah Desa Berdikari	Desa	5	PD menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		-	Prosentase kelompok Masyarakat yang mandiri	%	15,92	PD yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		-	Prosentase Aspirasi masyarakat yang diakomodir.	%	5	PD yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Pengendalian Penduduk dan KB	-	Tingkat Pertumbuhan Alami	%	0,36	PD menangani Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

No	Nama Urusan	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2018	PD
		-	Total Fertility Rate	%	1,44	PD menangani Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
		-	Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need dengan perhitungan baru)	%	11,06	PD menangani Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
		-	Angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) suatu cara	%	74,65	PD menangani Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
		-	Rata-rata laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,47	PD menangani Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
15	Perhubungan	-	Prosentase ruas jalan dengan kecepatan di bawah 40 km/jam	%	26	PD menangani Urusan Perhubungan
		-	Angka fatalitas korban kecelakaan	Kasus/Tahun	110	PD menangani Urusan Perhubungan
16	Komunikasi dan Informasi	-	Prosentase PD yg memanfaatkan media sosial untuk peningkatan akses dan partisipasi	%	100	PD menangani Urusan Komunikasi dan Informasi
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	Prosentase peningkatan produksi UMKM	%	6,03	PD yang menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		-	Prosentase Koperasi aktif	%	83	PD yang menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
18	Penanaman Modal	-	Jumlah Investasi PMA/PMDN	Juta	6.040.259	PD menangani Urusan Penanaman Modal
19	Kepemudaan dan Olahraga	-	Rasio Atlet Berprestasi	%	10	PD yang menangani Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Nama Urusan	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2018	PD
		-	Prosentase Cabang Olahraga yang berprestasi	Unit	407	PD yang menangani Urusan Kepemudaan dan Olahraga
		-	Prosentase Pemuda/organisasi pemuda yang berprestasi di kancah nasional/internasional	%	47	PD yang menangani Urusan Kepemudaan dan Olahraga
20	Statistik	-	Jumlah publikasi data statistik	dokumen	5	PD menangani Urusan Statistik
21	Persandian	-	Tingkat ketersediaan SOP Persandian	%	100	PD menangani Urusan Persandian
22	Kebudayaan	-	Cakupan benda, situs, kawasan budaya yang dilestarikan	Buah	193	PD yang menangani Urusan Kebudayaan
		-	Prosentase peningkatan pertunjukkan seni dan budaya daerah	%	5	PD yang menangani Urusan Kebudayaan
		-	Prosentase sarana pertunjukan seni dan budaya yang representatif	Buah	0	PD yang menangani Urusan Kebudayaan
		-	Prosentase sanggar seni dan budaya yang aktif	%	45	PD yang menangani Urusan Kebudayaan
23	Perpustakaan	-	Rasio perpustakaan tingkat Desa	rasio	35	PD menangani Urusan Perpustakaan
		-	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	20.878	PD menangani Urusan Perpustakaan
24	Kearsipan	-	Kualitas Arsip Layak Pakai	%	100	PD menangani Urusan Kearsipan
25	Kelautan dan Perikanan	-	Prosentase Kenaikan Produksi Perikanan	%	0,40	PD menangani Urusan Kelautan dan Perikanan
26	Pariwisata	-	Nilai Produksi sektor Pariwisata	Rp. Juta	160.000	PD menangani Urusan Pariwisata
27	Pertanian	-	Produktifitas Padi	Kw/ha	75,56	PD menangani Pertanian
		-	Jumlah Produksi Padi	Ton	375499	PD menangani

No	Nama Urusan		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	PD
						Pertanian
		-	Produktifitas Jagung	Kw/ha	89,26	PD menangani Pertanian
		-	Jumlah Produksi Jagung	Ton	22135,5	PD menangani Pertanian
		-	Produktifitas Kedelai	Kw/ha	22,71	PD menangani Pertanian
		-	Jumlah Produksi Kedelai	Ton	3972	PD menangani Pertanian
		-	Jumlah Produksi Daging	Ton	6.751,36	PD menangani Pertanian
		-	Kontribusi terhadap PDRB	%	9,92	PD menangani Pertanian
28	Kehutanan	-	Luas area Lahan Kritis	Ha	7300	PD menangani Urusan Kehutanan
29	Perdagangan	-	Prosentase Pasar Rusak	%	44,23	PD menangani Urusan Perdagangan
		-	Peningkatan Nilai Ekspor	%	59,01	PD menangani Urusan Perdagangan
		-	Revitalisasi pasar	%	53,83	PD menangani Urusan Perdagangan
30	Perindustrian	-	Nilai Produksi	Rp. Juta	10.654.845,08	PD menangani Urusan Perindustrian
		-	Nilai Investasi	Trilyun Rupiah	2,44	PD menangani Urusan Perindustrian
		-	Kontribusi PDRB industri pengolahan, makanan dan minuman	%	39,11	PD menangani Urusan Perindustrian
31	Transmigrasi	-	Prosentase Transmigran yang diberangkatkan	%	100	PD menangani Urusan Transmigrasi
32	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	-	Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	%	100	PD yang menangani Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
33	Fungsi Penunjang	-	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Predika t	B	PD menangani Urusan Pemerintaha

No	Nama Urusan	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2018	PD
						n
		-	Prosentase Pejabat yang selesai melaporkan LHKPN	%	100	PD menangani Urusan Pemerintahan
		-	Penilaian Laporan Keuangan	Penilaian	WTP	PD menangani Urusan Pemerintahan
		-	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah	%	100	PD menangani Urusan Pemerintahan
		-	Waktu pengurusan Perijinan	Hari	3	PD menangani Urusan Pemerintahan
		-	Tingkat kapabilitas APIP	Level	2	PD menangani Urusan Pemerintahan
		-	Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	Level	2,0	PD menangani Urusan Pemerintahan
		-	Prosentase SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan	%	100	PD menangani Urusan Pemerintahan
		-	Prosentase MOU pemerintah dengan perguruan tinggi yang ditindaklanjuti	%	20	PD menangani Urusan Pemerintahan
C.	Aspek Daya Saing Daerah					
1	Ekonomi	-	Infrastruktur Kota dalam kondisi baik	%	75	PD Urusan Penunjang
2	Infrastruktur	-	Persentase Sarana dan Prasarana kegiatan ekonomi yang representatif	%	75	PD Urusan Pekerjaan Umum

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 merupakan penjabaran dari substansi RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2021, mengacu kepada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dan Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

Pengaruh krisis global diperkirakan masih berpengaruh pada tahun 2018, terutama masih bergejolaknya kondisi ekonomi di wilayah Eropa dan Amerika. Demikian juga pergeseran nilai di tengah-tengah masyarakat sebagai dampak dari euforia reformasi dan globalisasi akan mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat. Perlu antisipasi dalam menyikapinya melalui penentuan prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada rencana tindak pemecahan masalah yang komprehensif. Karena itu pola pembangunan pada RKPD Tahun 2018 bukan hanya bertumpu pada pendekatan struktural melalui instrumen kerangka kebijakan dan anggaran semata, tetapi perlu juga dikembangkan pendekatan kultural melalui instrumen pendayagunaan kearifan dan budaya lokal.

RKPD Tahun 2018 merupakan acuan bagi PD dan masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD 2018 sebagai berikut :

1. Perangkat daerah (PD), serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2018 dengan sebaik-baiknya;
2. RKPD Tahun 2018 menjadi acuan dan pedoman bagi PD dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi, maka masing-masing PD setelah menerima pagu sementara Tahun 2018, akan menjadi Rencana Kerja dan Anggaran sebagai berikut:

- a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2018, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Keputusan Kepala PD;
 - b. Uraian tentang penggunaan APBD Tahun Anggaran 2018, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) di atas perlu menguraikan kewenangan penggunaan anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah yang menjadi kewenangan;
 - d. Masing-masing PD wajib melaporkan kegiatan-kegiatannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, yang dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi, ataupun yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan.
3. Pemerintah Kabupaten, di bawah koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan mendapatkan masukan dari seluruh PD merumuskan matriks rencana tindak pada setiap bidang pembangunan (matriks rencana tindak menjadi lampiran dari setiap bidang pembangunan) menjadi dokumen RKPD Tahun 2018;
 4. Masyarakat luas dapat berperanserta seluas-luasnya dalam Perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan;
 5. Pada akhir tahun anggaran 2018, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya;

6. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap PD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

